

**PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN
DI SMAN 3 PONOROGO**

TESIS



Oleh:

Tarissa Farah Jihan

NIM: 502230020

**PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2025**

ABSTRAK

Jihan, Tarissa Farah, 2025. *Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMAN 3 Ponorogo*, Tesis, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing: **Nur Kolis, Ph.D., Dr. Athok Fu'adi, M.Pd.**

Kata Kunci: Peran Komite, Mutu Pendidikan

Komite sekolah SMA Negeri 3 Ponorogo telah menunjukkan kontribusi nyata dalam mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang berkualitas. Komite Sekolah SMA Negeri 3 Ponorogo juga secara aktif terlibat dalam berbagai program sekolah, termasuk memfasilitasi pembangunan ruang kelas melalui kolaborasi dengan instansi pemerintah. Keterlibatan ini tampak nyata dalam mendukung program SICP (*Smaga International Class Program*) yang tidak hanya fokus pada fasilitas fisik, tetapi juga pada penguatan karakter dan pengembangan kompetensi siswa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo dengan fokus pembahasan: 1. Program komite, 2. Tantangan dalam mengimplementasikan program, 3. Efektivitas peran komite.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dari Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi: pengumpulan data, kondensasi data, peyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite sekolah di SMA Negeri 3 Ponorogo memiliki peran yang signifikan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan: 1) Komite SMA Negeri 3 Ponorogo aktif dalam memberikan pertimbangan terhadap kebijakan sekolah, mendukung pendanaan baik finansial maupun non-finansial, serta mengawasi transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Selain itu, komite juga berfungsi sebagai mediator antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam membangun komunikasi yang harmonis. 2) Dalam pelaksanaannya, komite SMA Negeri 3 Ponorogo menghadapi sejumlah tantangan. Sebagai pemberi pertimbangan, kendala yang muncul meliputi kurangnya pemahaman peran, keterbatasan informasi, dan waktu anggota yang terbatas. Sebagai pendukung finansial dan non-finansial, tantangan utama berasal dari beragamnya kondisi ekonomi wali murid serta terbatasnya jaringan dan kapasitas anggota. Dalam peran pengawasan, hambatan muncul dari komunikasi satu arah, rendahnya pemahaman keuangan, serta keterbatasan akses informasi. Sebagai mediator, komite SMA Negeri 3 Ponorogo juga terkendala oleh belum adanya sistem komunikasi yang terstruktur dengan masyarakat. 3) Efektivitas peran komite SMA Negeri 3 Ponorogo terlihat dari kontribusi yang kuat yang tercermin dari tiga dimensi: efektivitas individu, komite aktif memberi masukan hingga mendampingi pelaksanaan kegiatan. Efektivitas kelompok, kerjasama tim komite menyusun program seperti penggalangan dana, dan menjalin kerjasama eksternal. Efektivitas organisasi, sinergi antara komite dan pihak sekolah terjalin dengan baik sehingga mendukung tercapainya peningkatan mutu pendidikan.

ABSTRACT

Jihan, Tarissa Farah, 2025. *The Role of School Committees in Improving the Quality of Education at SMAN 3 Ponorogo*, Thesis, Islamic Education Management Program. Graduate School, State Islamic Institute (IAIN) Ponorogo, Supervisors: **Nur Kolis, Ph.D., Dr. Athok Fu'adi, M.Pd.**

Keywords: Committee Role, Education Quality

The school committee of SMA Negeri 3 Ponorogo has shown real contribution in encouraging the creation of a quality educational environment. The School Committee of SMA Negeri 3 Ponorogo is also actively involved in various school programs, including facilitating the construction of classrooms through collaboration with government agencies. This involvement is evident in supporting the SICP (Smaga International Class Program) program which not only focuses on physical facilities, but also on strengthening character and developing student competencies.

This research aims to explore the Role of the School Committee in Enhancing Education Quality at SMAN 3 Ponorogo, focusing on: 1. Committee Programs, 2. Challenges in Implementing Programs, 3. Effectiveness of the Committee's Role.

This study employs a descriptive qualitative approach. Data collection methods include interviews, observations, and documentation. Data collection techniques follow Miles, Huberman, and Saldana's framework, encompassing data collection, data condensation, data display, and conclusion drawing.

Research findings indicate that the school committee at SMAN 3 Ponorogo plays a significant role in supporting educational quality improvement: 1) The committee actively provides policy considerations, supports both financial and non-financial funding, and oversees transparency and accountability in program implementation. Moreover, the committee serves as a mediator between the school, parents, and the community to foster harmonious communication. 2) In its execution, the SMAN 3 Ponorogo committee faces several challenges. As policy advisors, challenges include misunderstandings about roles, limited information, and time constraints for members. As financial and non-financial supporters, the main challenges arise from varying economic conditions among guardians and limited network and capacity among members. In terms of oversight, barriers include one-way communication, limited financial understanding, and restricted access to information. As mediators, the SMAN 3 Ponorogo committee is hindered by the absence of a structured communication system with the community. 3) The effectiveness of the SMAN 3 Ponorogo committee's role is evident in its strong contributions across three dimensions: individual effectiveness, active input and support in activity implementation. Group effectiveness, team cooperation in program development such as fundraising, and external partnerships. Organizational effectiveness, synergy between the committee and the school ensures support for improving educational quality.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh Tarissa Farah Jihan, NIM 502230020 dengan judul: "Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo", maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Munqashah* Tesis.

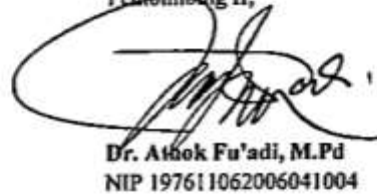
Pembimbing I,



Nur Kolis, Ph.D.
NIP. 197106231998031002

Ponorogo, 6 Mei 2025

Pembimbing II,



Dr. Atok Fu'adi, M.Pd
NIP 197611062006041004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA**

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-
SURV/PT/XI/2016 Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277
Fax. (0352) 461893 Website: www.iainponorogo.ac.id Email:
pascasarjana@iainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh Tarissa Farah Jihan, NIM 502230020, Program Magister Program Studi Manajemen Pendidikan Islam dengan judul: *"Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo"* telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munāqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada hari: Rabu, 28 Mei 2025, dan telah dinyatakan LULUS.

DEWAN PENGUJI

No.	Nama Penguji	Tanda tangan	Tanggal
1.	Dr. Basuki, M.Ag. NIP. 197210102003121003 Ketua Sidang		8/6/25
2.	Dr. Ahmadi, M.Ag. NIP. 196512171997031003 Penguji Utama		03/6/2025
3.	Nur Kolis, Ph.D. NIP. 197106231998031002 Penguji II/Pembimbing I		03/6/2025
4.	Dr. Athok Fu'adi, M.Pd. NIP. 197611062006041004 Sekretaris/Pembimbing II		3/6/2025

Ponorogo, 3 Juni 2025
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.

NIP. 197308011998031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tarissa Farah Jihan

NIM : 502230020

Fakultas : Pasca Sarjana

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Judul Skripsi/ Tesis : Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan
di SMA Negeri 3 Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 05 Juni 2025

Penulis


Tarissa Farah Jihan
NIM. 502230020

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya Tarissa Farah Jihan, NIM 502230020, Program Magister Program Studi Manajemen Pendidikan Islam menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: “Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo” ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 8 Mei 2025
Pembuat Pernyataan,



TARISSA FARAH JIHAN
NIM 502230020

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu.....	7
BAB II KAJIAN TEORITIK PERAN KOMITE DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN.....	14
A. Mutu Pendidikan.....	14
1. Pengertian Mutu Pendidikan	14
2. Indikator Mutu Pendidikan.....	16
3. Tujuan Penerapan Mutu	18
4. Prinsip Mutu.....	21
5. Komponen Mutu	23
B. Komite Sekolah.....	24
1. Pengertian Komite Sekolah.....	24
2. Landasan Hukum Peran Komite Sekolah Dalam Pendidikan.....	26
3. Peran dan Fungsi Komite Sekolah	27
4. Tujuan Komite Sekolah.....	35
C. Kontribusi Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan	36

D. Efektivitas Peran	37
E. Kerangka Berfikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	42
B. Data dan Sumber Data	44
C. Teknik Pengumpulan Data.....	45
D. Teknis Analisis Data	49
E. Pengecekan Keabsahan Data	51
F. Tahapan Penelitian.....	53
BAB IV PROGRAM KOMITE SEKOLAH DI SMA NEGERI 3 PONOROGO	55
A. Paparan Data Umum.....	55
B. Paparan Data Khusus Program Komite Sekolah di SMAN 3 Ponorogo	58
C. Analisis Data.....	76
D. Sinkronisasi dan Transpormasi.....	81
BAB V TANTANGAN KOMITE DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PROGRAM UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SMA NEGERI 3 PONOROGO.....	83
A. Paparan Data	83
B. Analisis Data.....	91
C. Sinkronisasi dan Tranformasi	99
BAB VI EFEKTIVITAS PROGRAM KOMITE DALAM MENDUKUNG KEGIATAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN	102
A. Paparan Data	102
B. Analisis Data.....	106
C. Sinkronisasi dan Transformasi.....	110
BAB VII PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan yang bermutu sejatinya harus dipersiapkan dengan matang mulai dari guru, kelas, media, metode, hingga semua aspek pendukung keberhasilan pendidikan. Pendidikan dengan berbagai macam persoalannya tidak mungkin bisa dipecahkan oleh lembaga sekolah dan sekolah juga perlu mendapat bantuan dari masyarakat sekitar untuk terlibat langsung dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta membantu peningkatan dan pengembangan program sekolah. Pernyataan ini didukung dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003, dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis otonomi daerah dalam konteks Negara kesatuan republik Indonesia (NKRI), kemudian masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan atau komite sekolah.¹

Oleh karena itu, dibentuklah suatu badan yang bertugas sebagai penengah antara pihak sekolah dengan masyarakat dan sebagai badan yang bertugas membantu pihak sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka pemerintah membentuk suatu badan yakni komite sekolah melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 Tahun 2016. Komite sekolah merupakan lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.²

Pembentukan komite sekolah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu pendidikan, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan serta tercapainya demokratisasi pendidikan. Sehingga perlu adanya peran serta masyarakat

¹ Dadang Saputra, *Peran Komite Dalam Manajemen Sarana dan Prasarana di Pesantren Tahfidz Qur'an Dewan Dakwah Lampung*, (UIN Raden Intan Lampung, 2020), 2-3.

² Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 75 Tahun 2016.

yang lebih optimal. Tujuan dari komite sekolah sendiri adalah mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.³ Oleh karena itu, pada setiap sekolah harus memiliki komite sekolah yang berkompeten yang sangat memikirkan tentang kualitas atau mutu pendidikan serta mengetahui benar tugas dan fungsinya sebagai komite sekolah.

Mutu pendidikan berkaitan erat dengan proses pendidikan. Tanpa proses pelayanan pendidikan yang bermutu tidak akan mungkin diperoleh produk layanan yang bermutu. Banyak sekali faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan, salah satunya adalah proses pemberian layanan pendidikan yang masih jauh dari harapan. Di satu pihak pemberian layanan pendidikan belum menemukan cara yang paling tepat, di pihak lain pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta semakin tingginya kehidupan masyarakat dan tuntutan kebutuhan hidup sosial masyarakat sebagai pelanggan pendidikan. Pelayanan pendidikan yang bermutu yaitu pemberian layanan jasa pendidikan di sekolah yang dapat memberikan kepuasan kepada siswa di sekolah ataupun madrasah adalah menjadi peran dari komite sekolah bersama dengan pihak sekolah.⁴

Dunia pendidikan saat ini, sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang dituntut untuk melahirkan keluaran output yang berkualitas dan mampu bersaing dalam dunia kerja ataupun ke jenjang yang lebih tinggi lagi yaitu ke jenjang perguruan tinggi atau universitas. tak hanya itu, tuntutan untuk memperoleh kepuasan pelanggan yang dalam arti orang tua siswa sangat tinggi. sekolah berlomba-lomba untuk memperhatikan dari orang tua dengan cara memberikan pelayanan terbaik dengan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, agar mampu bersaing dalam persaingan global. Dalam era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini pendidikan

³ Suhadi Winoto, *Komite Sekolah atau Madrasah dan Manajemen Mutu Pendidikan*, (Yogyakarta: CV Bildung nusantara, 2021), 6.

⁴ I Putu Eka Amerta, Sudjarwo, Alben Ambarita, "Peran Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan," *Jurnal Manajemen Mutu Pendidikan*, Vol 3, No 1, 2015, 2.

sangat berperan penting dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia-manusia yang terampil guna berpartisipasi dalam pembangunan. *World Bank* mencatat salah satu faktor yang menyebabkan manajemen mutu pendidikan tidak efektif yaitu rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan di sekolah.⁵

Keberhasilan suatu sekolah juga dapat dilihat dari pencapaian kerjasama antara sekolah dengan komite sekolah, oleh karena itu komite sekolah memegang peranan yang sangat penting dan signifikan. Sasaran manajemen pendidikan adalah pengelolaan dari pemberdayaan potensi partisipasi masyarakat untuk memperkuat institusi sekolah, dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan mutu pendidikan sehingga diperoleh sumber daya manusia yang berdaya saing dan kompeten. Namun sejatinya banyak komite sekolah sebagai badan yang mewakili masyarakat belum bekerja secara optimal sebagaimana yang diharapkan. Kebanyakan komite sekolah hanya dianggap sebagai pelengkap dari sekolah tanpa menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar.⁶

Ditambah lagi pada kenyataan bahwa komite sekolah tidak selalu berada di sekolah, dan mereka memiliki pekerjaan lain diluar tugas mereka sebagai komite sekolah. Hal ini, membuat tugas dan kewajiban dari komite sekolah sedikit terhambat. Dengan adanya komite sekolah diharapkan dapat menjadi penampung aspirasi orang tua siswa dengan sekolah yang dijembatani dengan adanya komite sekolah. Begitu juga dengan partisipasi masyarakat yang masih rendah. Partisipasi masyarakat khususnya orang tua dianggap belum besar dan kesadaran masyarakat atau orang tua dianggap masih sangat rendah dan minim jika membicarakan tentang pendidikan.

Komite sekolah harus memiliki peran yang baik, jelas, dan terarah supaya dapat mewujudkan tujuan lembaga pendidikan. Dalam konteks itulah, upaya peran komite sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk diterapkan. Peran komite sekolah

⁵ Syaiful Sagala, *Manajemen Strategi dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 39

⁶ Alben Ambarita, *Kepemimpinan Kepala Sekolah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 2.

merupakan bagian yang cukup signifikan dan akan berpengaruh bagi perkembangan kegiatan sekolah, dalam hal itu pula eksistensi SMA Negeri 3 Ponorogo merupakan representasi dari lembaga pendidikan yang terletak di Kabupaten Ponorogo yang mempunyai berbagai macam keunggulan hal ini dilihat dari akreditasi sekolah dengan predikat A sehingga membuat sekolah tersebut baik dan menjadi sorotan masyarakat.⁷

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, pihak sekolah SMA Negeri 3 Ponorogo selalu melibatkan komite dalam segala jenis kegiatan sekolah. Sesuai dengan pernyataan Bapak Sasmito Pribadi, M.Pd selaku kepala sekolah SMAN 3 Ponorogo bahwasanya komite sekolah terlibat dalam perencanaan program peningkatan mutu pendidikan, seperti penyediaan fasilitas belajar berpartisipasi dalam pengembangan sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu bentuk nyata kontribusi komite sekolah adalah partisipasinya dalam peresmian gedung sekolah. Komite sekolah turut hadir dan melaksanakan peresmian gedung baru untuk kelas *SICP (Smaga International Class Program)* sebagai bentuk dukungan nyata terhadap perkembangan sekolah. Partisipasi ini menunjukkan bahwa keberadaan komite sekolah bukan sekadar pelengkap dalam sistem pendidikan, melainkan mitra strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi peserta didik.⁸ Selain itu komite juga memberikan dukungan finansial dan non finansial melalui penggalangan dana untuk kegiatan sekolah, memanfaatkan dan membangun relasi kerjasama dengan pihak luar untuk mendukung pengembangan karakter siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler diklatsar. Serta aktif berperan sebagai penghubung antara pihak sekolah dan juga masyarakat sehingga terjalin kerjasama yang baik antara keduanya seperti halnya komite sekolah menampung aspirasi, masukan, dan kritik dari orang tua siswa terkait kualitas pembelajaran, biaya pendidikan dan penggunaan dana serta kedisiplinan dan kebijakan sekolah kemudian komite sekolah

⁷ Hasil Observasi pada Senin tanggal 10 Maret 2025 diakses melalui laman https://smagaponorogo.sch.id/about_us.html.

⁸ Hasil Observasi pada Senin tanggal 10 Maret 2025 diakses melalui laman https://www.instagram.com/p/CohBL_VruT-/?img_index=2&igsh=dXQ1cWk5MWJueTZ2.

menyampaikan masukan tersebut dalam kegiatan rapat bersama pihak sekolah.⁹ Oleh karena itu, ketertarikan untuk meneliti peran komite sekolah dikarenakan peneliti ingin menggali lebih dalam lagi terkait peran komite dalam meningkatkan mutu pendidikan di dua lembaga pendidikan tersebut. Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana program komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan, pendukung finansial dan non finansial, pengontrol transparansi dan akuntabilitas, serta mediator agency peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo?
2. Apa tantangan utama yang dihadapi oleh komite sekolah dalam mengimplementasikan program-program yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo?
3. Bagaimana efektivitas peran komite sekolah dalam mendukung kegiatan peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo, baik dari aspek kebijakan, finansial, maupun dukungan moral?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis program komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan, pendukung finansial dan non finansial, pengontrol transparansi dan akuntabilitas, serta mediator agency peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo
2. Menganalisis tantangan utama yang dihadapi oleh komite sekolah dalam mengimplementasikan program-program yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo

⁹ Hasil Wawancara bersama Kepala Sekolah pada Selasa 11 Maret 2025

3. Menganalisis efektivitas peran komite sekolah dalam mendukung kegiatan peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo, baik dari aspek kebijakan, finansial, maupun dukungan moral

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian berupaya untuk memberikan manfaat, berikut dibawah uraiannya:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini dapat menghasilkan wawasan tentang pengetahuan peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, dan dapat mengetahui program-program yang akan dikembangkan komite sekolah.

2. Manfaat praktis

a. Manfaat bagi madrasah

Dengan diadakannya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dari pihak sekolah untuk dapat mengetahui peran komite sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di sekolah dan pihak madrasah juga bisa ikut berkontribusi dengan komite sekolah dalam pengembangan manajemen mutu pendidikan di madrasah ini.

b. Manfaat bagi peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti sendiri dapat memberikan dan menambah pengetahuan sebagai pengalaman yang didapat di sekolah tersebut, dengan begitu peneliti juga bisa mengetahui apa peran dari komite sekolah selama ini untuk kemajuan peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini sebagai bahan info seputar sekolah kepada masyarakat atau wali siswa agar dapat mengetahui bahwasanya pengembangan mutu pendidikan dalam sekolah ini bukan hanya dalam lingkup warga sekolah yang berada di dalamnya saja namun ada peran serta dari pihak masyarakat.

d. Bagi komite sekolah

Penelitian ini sebagai bahan evaluasi serta bahan pertimbangan bagi komite sekolah untuk terus melaksanakan perannya sebagai komite sekolah dan juga sebagai wakil dari masyarakat untuk terus menyampaikan aspirasi atau harapan masyarakat untuk sekolah tersebut.

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan tema penelitian yang akan dikaji, peneliti juga melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan penelitian ini, serta dapat memberikan gambaran tentang ruang lingkup penelitian yang pernah dilakukan terhadap peran komite madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan.

Firdaus Jeka. *“Peran Komite Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTS Swasta Se Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu”* 2022.¹⁰ Penelitian ini berisi tentang peran komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan pada lembaga tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode deksriptif kualitatif, tujuan penelitian dalam tesis ini untuk mengetahui peran komite madrasah sebagai badan pertimbangan, pendukung, pengontrol, serta penghubung dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTS Swasta Se Kecamatan Rokan Hulu. Hasil penelitian dalam penelitian ini antara lain: peran komite madrasah yang telah dilaksanakan sebagai badan pertimbangan serta penghubung sudah berjalan dengan baik, namun peran komite sebagai badan pendukung dan sebagai badan pengawas sudah cukup baik dan masih perlu dimaksimalkan hanya saja ada faktor keterbatasan dari sumber daya manusianya. Kemudian faktor pendukung peran komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan dilakukan dengan yg pertama komite madrasah dipilih melalui musyawarah, semangat, serta loyalitas kuat untuk mewujudkan madrasah yang unggul. Kemudian adanya kedekatan emosional yang menjadikan

¹⁰ Firdaus Jeka, *“Peran Komite Madrasah dalam Meningkatkan Mutu pendidikan di MTS Swasta Se Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu ”* (Tesis, Riau: PascaSarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau), 1-5.

hubungan kerjasama antara komite madrasah dan kepala madrasah lebih mudah, kemudian adanya kepercayaan dan support yang kuat dari masyarakat. Sedangkan.

Miftahul Huda, *“Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan Di Madrasah Aliyah Ma’arif NU Kencong Jember.”*¹¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil dan temuan penelitian ini 1) peran komite sebagai pemberi pertimbangan dalam menyusun rencana kepala madrasah serta program yang disusun oleh madrasah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan yaitu adanya substansi penyusunan rencana serta adanya substansi pelaksanaan perencanaan. 2) peran komite sebagai pendukung dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan yaitu melaksanakan perencanaan kegiatan melalui tim MGMP paling sedikit satu bulan satu kali. Melaksanakan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan serta melakukan monitoring dari kepala madrasah.

Riyanik, *“Peran Komite Sekolah dalam Pembiayaan Pendidikan di SDIT Al-Manan Boyolali.”*¹² Fokus penelitian difokuskan pada peran komite sekolah dalam pembiayaan pendidikan di SDIT Al-Manan Boyolali. Yang meliputi badan pertimbangan, badan pendukung, dan badan pengontrol. Penelitian ini merupakan jenis deskriptif fenomenologis dengan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian berupa Peran komite madrasah adalah sebagai a) peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan sudah berjalan dengan baik terbukti dengan penyusunan RKS dan RKAS, serta saran terkait dengan kekurangan pembiayaan, b) peran sebagai badan pendukung juga berjalan dengan baik yang ditunjukkan melalui dukungan dalam penyusunan dan pelaksanaan RKAS, serta mencari

¹¹ Miftahul Huda, *“Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan Di Madrasah Aliyah Ma’arif NU Kencong Jember”* (Tesis, Jember: PascaSarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember), 9

¹² Riyanik, *“Peran Komite Sekolah dalam Pembiayaan Pendidikan di SDIT Al-Manan Boyolali,”* (Tesis, Semarang: Universitas PGRI Semarang, 2024), 2-6

ide dalam penggalangan dana dan juga berpartisipasi dalam pembangunan rumah Al-Qur'an, c) peran sebagai pengontrol terbukti sangat efektif dalam ,mengawasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran pembangunan rumah Al-Qur'an serta memantau hasil penggalangan dana dari program tersebut.

Joko Wiyanto, *Manajemen Komite Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan di Sekolah Dasar Muhammadiyah Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo*.¹³ Fokus penelitian dalam penelitian ini meliputi: 1) bagaimana penerapan manajemen komite sekolah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SD Muhammadiyah Palur, 2) apa faktor pendukung dan penghambat manajemen komite sekolah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SD Muhammadiyah palur, 3) bagaimana upaya manajemen komite sekolah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SD Muhammadiyah Palur Kecamatan Mojolaban. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian dalam tesis ini antara lain: 1) komite sekolah di SD Muhammadiyah Palur telah berhasil meningkatkan layanan pendidikan dengan cara membantu sekolah dalam menjawab setiap masalah yang dihadapi oleh sekolah juga membantu mendorong keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana sekolah, 2) faktor pendukung yang menjadi pendorong bagi komite sekolah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan adalah komunikasi dan koordinasi yang baik antara komite dan kepala sekolah, sedangkan faktor penghambatnya ialah kurangnya sarana prasarana yang memadai dan adanya keterbatasan anggaran, 3) upaya komite sekolah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan dengan mengoptimalkan peran manajemen komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, dukungan, kontrol, dan mediator.

¹³ Joko Wiyanto, *Manajemen Komite Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan di Sekolah Dasar Muhammadiyah Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo*, " (Tesis, Surakarta: UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022), 2

Leni Rosnani, *Analisis Peran dan Keterlibatan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu pendidikan di SMA Taman Siswa PematangSiantar*.¹⁴ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, narasumber penelitian dalam penelitian ini adalah anggota komite sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru. Hasil penelitian dalam tesis ini telah terjadi koordinasi yang baik antara komite sekolah dengan pihak sekolah. Komite sekolah cukup berperan dalam pengelolaan pendidikan di SMA Taman siswa Pematangsiantar. Koordinasi juga dilakukan secara teratur dan pelaksanaan telah terorganisir dengan struktur yang jelas sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Table 1.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Firdaus Jeka. <i>“Peran Komite Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTS Swasta Se Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, 2022 (UIN Syarif Kasim Riau)”</i>	Tema yang diteliti sama yaitu membahas tentang peran komite sekolah/madrasah untuk meningkatkan mutu pendidikan pada suatu lembaga pendidikan. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.	Penelitian terdahulu berfokus terhadap strategi komite madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan serta faktor pendukung dan penghambat dari peran komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTS Swasta se kecamatan Tambusai Utara. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus kepada peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, peran komite madrasah pendukung finansial dan non finansial,

¹⁴ Leni Rosnani, *Analisis Peran dan Keterlibatan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu pendidikan di SMA Taman Siswa PematangSiantar*, (Tesis, Sumatera Utara: Universitas muhammadiyah Sumatera Utara, 2021), 3

NO	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
			kemudian peran komite sekolah terhadap pengontrol transparansi dan akuntabilitas, dan sebagai mediator agency antara sekolah dan masyarakat di lingkungan sekolah.
2	Miftahul Huda, <i>“Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan Di Madrasah Aliyah Ma’arif NU Kencong Jember, 2023 (UIN KH As-Siddiq Jember)”</i>	Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan penelitian kualitatif, kemudian terletak pada tema yang diteliti yaitu membahas tentang peran komite sekolah/madrasah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan pada lembaga pendidikan.	Fokus penelitian pada penelitian Miftahul Huda yaitu mengenai faktor penghambat komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Ma’arif NU Kencong, Sedangkan penelitian ini lebih berfokus kepada peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, pendukung finansial dan non finansial, pengontrol transparansi dan akuntabilitas.
3	Riyanik, <i>“Peran Komite</i>	Tema yang diteliti sama yaitu	Penelitian terdahulu berfokus terhadap strategi komite

NO	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
	<i>Sekolah dalam Pembiayaan Pendidikan di SDIT Al-Manan Boyolali, 2024 (Universitas PGRI Semarang)</i>	membahas tentang peran komite sekolah/madrasah untuk meningkatkan mutu pendidikan pada suatu lembaga pendidikan. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.	madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan di SDIT Al-Manan Boyolali. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus kepada peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, peran komite sekolah pendukung finansial dan non finansial, kemudian peran komite sekolah terhadap pengontrol transparansi dan akuntabilitas.
4.	Joko Wiyanto, <i>Manajemen Komite Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan di Sekolah Dasar Muhammadiyah Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, 2022</i>	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang ini yaitu terkait dengan tema yang dibahas mengenai komite sekolah pada lembaga pendidikan, kemudian juga terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif.	Fokus penelitian dalam penelitian terdahulu meliputi: bagaimana penerapan manajemen komite sekolah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SD Muhammadiyah Palur, apa faktor pendukung dan penghambat manajemen komite sekolah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SD Muhammadiyah palur, bagaimana upaya manajemen komite sekolah dalam

NO	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
			meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SD Muhammadiyah Palur Kecamatan Mojolamban. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus kepada peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, peran komite sekolah pendukung finansial dan non finansial, kemudian peran komite sekolah terhadap pengontrol transparansi dan akuntabilitas. Kemudian perbedaan pada tingkat sekolah yang diteliti yaitu penelitian terdahulu dilaksanakan pada sekolah dasar sedangkan penelitian ini dilaksanakan di sekolah menengah atas.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

PERAN KOMITE DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN

A. Mutu Pendidikan

1. Pengertian Mutu Pendidikan

Mutu merupakan sebuah topik penting dalam diskusi tentang pendidikan pada sekarang ini. Mutu menciptakan lingkungan bagi pendidik, orang tua, pejabat pemerintah, wakil-wakil masyarakat dan pemuka bisnis untuk bekerja sama guna memberikan kepada para siswa sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi tantangan masyarakat dan akademik sekarang dan masa depan.¹⁵

Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat.¹⁶ Mutu adalah sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan. mutu bukanlah benda magis atau sesuatu yang rumit, mutu didasarkan pada akal sehat. Fokus mutu didasari upaya positif yang dilakukan oleh Individu.¹⁷ Mutu dapat dipandang sebagai sebuah konsep yang *absolute* sekaligus *Relative*. Mutu dalam percakapan sehari-hari sebagian besar dipahami sebagai sesuatu yang *absolute* misalnya restoran yang mahal Dan mobil-mobilan mewah, menurut Edward Salis sebagai suatu konsep yang absolut mutu Sama halnya dengan sifat baik, cantik dan benar, merupakan suatu idealisme yang tidak dapat dikompromikan. Dalam definisi yang absolut, sesuatu yang bermutu merupakan bagian dari standar yang sangat tinggi dan tidak dapat diungguli.¹⁸

¹⁵ Jarome S. Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 77.

¹⁶ Edy Karno, *Mutu Pendidikan dan Inovasi Pembelajaran*, (Kendari, Uho EduPress, 2019), 10.

¹⁷ Ibid, 75.

¹⁸ Sri Minarti, *Manajemen Sekolah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 326.

Ishikawa mengatakan bahwa "*quality is customer satisfaction*" dengan demikian pengertian mutu tidak dapat dilepaskan dari kepuasan pelanggan. Mutu pendidikan bersifat relatif karena tidak semua orang memiliki ukuran yang sama persis. Namun demikian apabila mengacu kepada pengertian mutu secara umum dapat dinyatakan bahwa pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang seluruh komponennya memiliki persyaratan dan ketentuan yang diinginkan pelanggan dan menimbulkan kepuasan. Mutu pendidikan adalah baik jika pendidikan tersebut dapat menyajikan jasa yang sesuai dengan kebutuhan para pelanggannya.¹⁹

Mutu dari segi proses mengandung arti efektivitas atau ketetapan dan efisiensi keseluruhan faktor atau unsur-unsur yang berperan dalam proses pendidikan. Dengan demikian mutu dalam dunia pendidikan yang dihasilkan berarti gambaran dan karakteristik menyeluruh dari output pendidikan yang dihasilkan oleh suatu jenjang jenis atau lembaga pendidikan dalam memenuhi harapan dan keinginan masyarakat sebagai pengguna dan pelanggan lembaga pendidikan.²⁰

Menurut Hari Sudrajat pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu menciptakan lulusan yang memiliki kemampuan atau kompetensi, baik kompetensi akademik maupun kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh kompetensi personal dan social, serta nilai-nilai akhlak mulia, yang keseluruhannya merupakan kecakapan hidup (life skill), pendidikan yang mampu menghasilkan manusia seutuhnya (manusia paripurna) atau manusia dengan pribadi yang integral (integrated Personality) mereka yang dapat mengintegrasikan iman, ilmu dan amal.²¹ Dengan output atau produk yang berhasil dalam mencapai target atau ketentuan dari lembaga pendidikan tertentu maka mutu atau kualitas pada

¹⁹ Engkoswara dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: C.V Alfabeta, 2012), 305.

²⁰ Hasyim Asy'ari, Zahruddin, Syifa Fauziah, "Implementasi Prinsip-Prinsip Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di SMK Ekonomika Depok Jawa Barat." *Jurnal Manageria* Vol. 2 Nomor 2 September 2017), 211.

²¹ Hari Suderajat, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah: Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Implementasi KBK* (Bandung: Cipta Lekas Grafika, 2005), 17.

lembaga tersebut dapat dikatakan baik sesuai dengan mutu yang telah ditetapkan.

Mutu pendidikan merupakan kesesuaian antara kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan dengan layanan yang diberikan oleh pengelola pendidikan. Berarti dengan kata lain produk pendidikan yang dimaksud adalah lulusan-lulusan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau masyarakat pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan terdiri dari pihak internal dan eksternal. Stakeholder pendidikan internal meliputi; peserta didik, guru, kepala sekolah dan tenaga pendidik lainnya. Sedangkan stakeholder pendidikan eksternal meliputi: calon peserta didik, orang tua, pemerintah atau pusat dan daerah, masyarakat umum dan lingkungan sekolah.

2. Indikator Mutu Pendidikan

Secara nasional standar mutu pendidikan merujuk kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 57/Tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan (SNP) meliputi:²²

- a. Standar kompetensi lulusan, merupakan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- b. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- c. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan penjabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
- e. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi serta sumber belajar

²² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)

lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi

- f. Standar pengelolaan merupakan kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
- g. Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
- h. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria yang mengenai mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian hasil belajar peserta didik.

Menurut Tjiptono yaitu sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya.²³

- a. Daya tahan (*durability*), berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat terus digunakan.
- b. Kemampuan pelayanan (*serviceability*) merupakan karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan atau kesopanan, kompetensi, kemudahan, serta penanganan keluhan yang memuaskan
- c. Estetika (*aesthetic*) merupakan sebuah karakteristik mengenai keindahan yang bersifat subjektif sehingga berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari preferensi atau pilihan individual.
- d. Kualitas yang dipersepsikan atau (*perceived quality*) yang merupakan suatu karakteristik yang berkaitan dengan reputasi (*brand name dan image*)

Indikator atau kriteria yang dapat dijadikan tolok ukur mutu pendidikan, antara lain sebagai berikut:²⁴

- a. Hasil akhir pendidikan

²³ Fandy Tjiptono, *Total Quality Manajemen*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), 27

²⁴ Nur Hasan, *Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia, Kurikulum untuk Abad 21: Indikator Cara Pengukuran dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Mutu Pendidikan*, (Jakarta: PT Sindo, 1994), 390.

- b. Hasil langsung pendidikan, hasil langsung inilah yang dipakai sebagai titik tolak pengukuran mutu pendidikan suatu lembaga pendidikan, misalnya adanya tes tertulis, daftar cek, anekdot, skala rating, dan skala sikap.
- c. Proses pendidikan
- d. Instrument input, yaitu adalah untuk berinteraksi dengan raw input (siswa).
- e. Raw input dan lingkungan.

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu dalam hal ini mengacu pada konteks hasil pendidikan yang mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu setiap catur wulan, semester, setahun, lima tahun, dan sebagainya. Prestasi yang dicapai dapat berupa hasil tes kemampuan akademis (misalnya ulangan umum serta UN), dapat pula prestasi dibidang lain misalnya dalam cabang olahraga atau seni bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang intangible seperti suasana disiplin, keakraban, serta saling menghormati.²⁵

3. Tujuan Penerapan Mutu

Penerapan mutu dilingkungan sekolah bertujuan untuk :²⁶

- a. Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan melalui pelayanan pendidikan
- b. Membangun kesadaran tentang perlunya melakukan pelayanan secara prima terhadap pelanggan
- c. Mendidik diri sendiri (pengelola lembaga pendidikan) agar taat terhadap suatu yang disepakati
- d. Menyiapkan dokumen mutu.

Menurut Aminatul Zahro, tujuan peningkatan mutu yaitu mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru, unsur komite sekolah atau majelis sekolah dalam aspek manajemen berbasis sekolah

²⁵ Arbangi, Dakir, Umiarso, *Manajemen Mutu Pendidikan*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 91.

²⁶ Mulyono, *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 307.

untuk meningkatkan mutu sekolah, mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru, unsur komite sekolah majelis di sekolah dalam melaksanakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat setempat dan mengembangkan peran serta masyarakat yang lebih aktif dan menyenangkan baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat setempat dan mengembangkan peran serta masyarakat yang lebih aktif dalam masalah maupun persekolahan dari unsur komunitas sekolah dalam membantu peningkatan mutu sekolah.²⁷

Dari pemaparan diatas disimpulkan bahwa dasarnya tujuan penerapan mutu adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di sekolah agar kepuasan pelanggan terpenuhi. Bila tujuan dalam penerapan mutu terlaksana dengan baik maka lembaga pendidikan atau sekolah akan memperoleh manfaat dan pada dasarnya tujuan penerapan mutu ditetapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja stakeholder sekolah, sehingga nanti akan berdampak pada kepuasan pelanggan pendidikan baik internal maupun eksternal.

Upaya peningkatan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Terkait dengan hal itu William Edward Deming memaparkan sebuah teori yang diadaptasi dari perkembangan industri di Jepang pada tahun 1947 pasca perang dunia kedua. Teori tersebut kemudian dikenal dengan *Total Quality management* (TQM) atau manajemen mutu terpadu. TQM adalah sebuah pendekatan yang berorientasi pada kualitas dan kepuasan pelanggan berdasarkan partisipasi semua anggota lembaga. Menurut Deming mutu terbentuk dari inisiatif untuk meningkatkan daya produksi dan pengembangan kualitas. Peningkatan mutu dikelola dan dikembangkan oleh sebuah lembaga sebagai sarana pemenuhan kebutuhan baik untuk penerima layanan maupun lembaga itu sendiri. Oleh karena itu Deming menjelaskan bahwa untuk mencapai mutu yang optimal diperlukan kesadaran dari para

²⁷ Aminatul Zahroh, *Total Quality Management*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 32.

pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam menanamkan kualitas baik berupa proses, produk ataupun layanan lembaga. Inisiatif peningkatan mutu tidak lepas dari konsep pemenuhan kebutuhan pelanggan yang mendorong pimpinan lembaga beserta pihak-pihak yang terlibat didalamnya agar dapat melaksanakan manajemen mutu secara terpadu, berkesinambungan dan berkelanjutan.²⁸

Tujuan utama dari TQM adalah memenuhi kebutuhan pelanggan. Lembaga yang berkualitas adalah lembaga yang selalu menjaga kepuasan pelanggannya. Tujuan tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya pengelolaan yang baik oleh seluruh pihak yang terlibat dalam lembaga. Artinya harus ada Kerjasama dan upaya Bersama dalam meningkatkan kualitas layanan dan produk yang dihasilkan. Jika TQM tidak dibarengi dengan inisiatif pengelola untuk memaksimalkan diri, maka tujuan transformasional yang ditetapkan tidak akan terwujud.²⁹

Dalam bidang Pendidikan, TQM diterapkan oleh Lembaga Pendidikan sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan. Tujuan akhir dari penerapan TQM adalah meningkatnya kualitas yang dimiliki Lembaga baik dari segi layanan pendidikan, kurikulum, sarana, maupun output berupa lulusan yang memiliki kompetensi yang tinggi. Praktik ini tidak dapat berjalan secara langsung dan membutuhkan proses yang berkesinambungan agar dapat tercipta produktifitas yang tinggi.³⁰ Selain itu diperlukan partisipasi dan kerjasama dari seluruh pihak penyelenggara pendidikan Lembaga dalam meningkatkan layanan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki.

²⁸ Muh Syafaat Anwalul Falah, Muhammad Baihaqi, dan Nuzula Indana Maulidah, "Implementasi Total Quality Management (TQM) Perspektif Teori Edward Deming Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Kitab Kuning," *Ico Edusha* 4, No 1, 2023, 1-10.

²⁹ Jasuri, Total Quality Management (TQM) Pada Lembaga Pendidikan Islam," *Journal STIT Pemalang*, Vol 4, No 1, 2011, 50.

³⁰ Husna Nashihin Dkk, "Implementasi Total Quality Management (TQM) Perspektif Teori Edward Deming, Juran, dan Crosby," *At-Turots: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 3, No 1, 2021, 50-60.

Terdapat indikator bagaimana TQM dilaksanakan secara efektif, yaitu: ³¹

- a. Berfokus pada kualitas layanan dan kepuasan pelanggan, dalam pendidikan orangtua dan masyarakat dianggap sebagai pelanggan.
- b. Adanya peningkatan kualitas pada segala aspek yang berlangsung terus menerus.
- c. Adanya Inisiatif Bersama dari pihak Lembaga untuk meningkatkan kualitas sumber daya yang dimiliki.
- d. Terdapat yang terjalin dengan baik secara horizontal dan vertikal, artinya sebuah lembaga dapat menjalankan manajemen mutu terpadu jika memiliki hubungan yang baik antara sesama pemangku kepentingan ataupun dengan masyarakat.
- e. Terdapat siklus yang saling berkaitan, yakni perencanaan (*plan*), pelaksanaan (*do*), pemeriksaan (*check*) dan tindakan penyesuaian (*action*).
- f. Melibatkan seluruh komponen lembaga yang bekerja secara aktif dan total (*total involvement*).

4. Prinsip Mutu

Menurut Edward deming mengembangkan 14 perkara yang menggambarkan apa yang dibutuhkan sebuah kegiatan bisnis untuk mengembangkan budaya mutu. Deming mengaitkan 14 perkara tersebut dengan berlangsungnya hidup bisnis dari 14 perkara yang dijabarkan oleh Edward deming salah satunya adalah mengadopsi filosofi mutu total yang di mana pendidikan berada pada lingkungan yang benar-benar kompetitif dan hal tersebut dipandang sebagai salah satu alasan mengapa Amerika kalah dalam keunggulan kompetitif. Sistem sekolah mesti menyambut baik tantangan untuk kompetisi dalam sebuah perekonomian global, setiap anggota sistem sekolah mesti belajar keterampilan baru untuk mendukung revolusi mutu. Orang mesti berkeinginan untuk menerima tantangan mutu orang mesti bertanggung jawab untuk memperbaiki mutu produk atau jasa

³¹ Ibid, 53.

yang diberikan oleh customer internal maupun eksternal. Setiap orang mesti belajar menjalankan pekerjaannya secara efektif dan produktif setiap orang mengikuti prinsip-prinsip mutu.³²

Menurut Philip Crosby mengemukakan 4 prinsip mutu yaitu:

- a. *Quality is defined as conformance to requirements, not goodness.* (Mutu didefinisikan sebagai kesesuaian dengan tuntutan, bukan kebaikan).
- b. *The system for delivering quality is the prevention of poor-quality through process control, not appraisal or correction* (Sistem untuk mengantarkan/mencapai mutu adalah rendahnya melalui proses pengawasan, bukan penilaian atau koreksi).
- c. *The performance standard is zero defects, not that's close enough.* (standar performa adalah tidak ada kesalahan, bukan hal itu hampir mendekati).

Sedangkan menurut Joseph Juran untuk membantu manajer dalam merencanakan mutu Juran telah mengembangkan sebuah pendekatan disebut manajemen mutu strategis (*strategi Quality Management*), SQM adalah sebuah proses tiga bagian yang didasarkan pada staf pada tingkat berbeda yang memberi kontribusi unik terhadap peningkatan mutu. Manajemen senior memiliki pandangan strategis tentang organisasi manajer menengah memiliki pandangan operasional tentang mutu dan para karyawan memiliki tanggung jawab terhadap kontrol mutu.³³

Dari uraian di atas prinsip mutu tidak hanya sebagai pedoman tetapi harus diterapkan dan dilaksanakan pada dasarnya prinsip mutu berorientasi pada kebutuhan pelanggan pada saat ini dan masa yang akan datang. Untuk merealisasikan ke pelanggan harus dengan keterlibatan serta kemampuan yang dimiliki pemimpin untuk mewujudkan prinsip-prinsip mutu dan keterlibatan SDM untuk meningkatkan esensi organisasi atau

86. ³² Jerome S. Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 85-

³³ Edward Sallis, *Total Quality Management*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 109.

lembaga agar dapat memuaskan kebutuhan pelanggan baik pelanggan internal maupun eksternal.

5. Komponen Mutu

Komponen-komponen mutu merupakan bagian-bagian yang harus ada dalam upaya untuk mewujudkan mutu. Bagian-bagian ini merupakan pendukung dan menjadi prasyarat dimilikinya mutu, beberapa komponen mutu yang dimaksud adalah:³⁴

- a. Kepemimpinan yang berorientasi pada mutu
- b. Pendidikan dan pelatihan (diklat)
- c. Struktur pendukung
- d. Komunikasi
- e. Ganjaran dan pengakuan
- f. Pengukuran.

Sedangkan menurut Gronroos dalam Engkoswara dan Aan Komariah menunjukkan tiga kriteria pokok menilai kualitas atau mutu, yaitu *outcomerelated*, *process-related*, dan *related criteria*. Dalam ketiga kriteria itu memiliki enam unsur mutu yaitu:³⁵

- a. *Professionalism and skills*
- b. *Attitude and behavior*
- c. *Accessibility and flexibility*
- d. *Reliability and trustworthiness*
- e. *Recovery*
- f. *Reputation and credibility*.

Lebih lanjut komponen mutu adalah mutu lulusan sebagai hasil pendidikan, mutu isi dan proses, mutu pendidik dan tenaga kependidikan, mutu sarana dan prasaranan, mutu pengelolaan, mutu pembiayaan, dan mutu penilaian..³⁶ Dalam sistem pendidikan, lulusan adalah tujuan dalam

³⁴ Tim Dosen Administrasi pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2020), 302-304.

³⁵ Engkoswara, dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 305-306.

³⁶ Engkoswara, dan Aan Komariah, 313.

pencapaian mutu. Mutu lulusan tidak akan dicapai apabila tidak ada proses dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar. Dalam sebuah proses belajar mengajar adanya peningkatan mutu yang harus diperhatikan baik dari kinerja tenaga pendidiknya, sarana dan prasarannya, sistem pengelolaannya serta penilaian dan evaluasi untuk terus melakukan koreksi dan perbaikan secara continue. “Pada dasarnya komponen mutu ini bagian yang harus ada dalam upaya mewujudkan mutu, karena mutu gambaran menyeluruh dari barang atau jasa bagaimana kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan pelanggan.”³⁷

Pada dasarnya komponen mutu harus diimbangi dengan tindakan kepemimpinan yang mampu mengendalikan sekolah yang melibatkan stakeholder, agar mampu menciptakan sekolah yang bermutu. Karna menjaga reputasi dan kepercayaan pelanggan adalah salah satu bentuk pelayanan yang diberikan sekolah kepada pelanggan agar pelanggan merasa puas.

B. Komite Sekolah

1. Pengertian Komite Sekolah

Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra-sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan diluar sekolah.³⁸ Munculnya dewan pendidikan dan komite sekolah merupakan keinginan masyarakat, karena dewan pendidikan dan komite madrasah lahir berdasarkan undang-undang tentang propenas dan otonomi daerah. Dewan pendidikan dan komite madrasah ini mendapat respon yang berbeda-beda dari berbagai macam masyarakat.³⁹ Sebagaimana UU Nomor

³⁷ Muhammad Nurul Fadhli, “Implementasi Manajemen Mutu Untuk Meningkatkan Kompetensi Guru di SDIT AL HIJRAH Laut Dendang, *Journal Educational Research and Sosial Studies*, Vol 2, No 2, 2021, 50.

³⁸ Depdiknas 2004, *Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2004), 56

³⁹ Ali Imron, *Manajemen Hubungan dan Partisipasi Masyarakat Sekolah* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2017), 47

20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas bagian ketiga Pasal 56 yang menyebutkan bahwa “komite madrasah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.”⁴⁰

Menurut Kepmendiknas RI no.044/U/2002 tanggal 2 April 2002, keanggotaan komite sekolah/madrasah terdiri dari, *Pertama*, unsur masyarakat, yang dapat berasal dari orang tua peserta didik, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan dan wakil alumni. *Kedua*, unsur dewan guru, yayasan atau lembaga yang menyelenggarakan pendidikan, badan pertimbangan desa dapat juga dilibatkan sebagai anggota komite sekolah/madrasah, anggota komite sekolah sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara, pengurus sendiri di pilih dari dan oleh anggota dan kepala bukan berasal dari satuan pendidikan.⁴¹

Menurut Bedjo Sujanto, komite madrasah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh *stakeholder* pendidikan. Nama generic, disesuaikan dengan kondisi kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. BP3, komite madrasah dan majelis madrasah yang sudah ada dapat memperluas fungsi, peran, dan keanggotaannya sesuai dengan acuan.⁴²

Menurut Engkoswara dan Aan Komariah, dewan sekolah atau komite sekolah adalah lembaga atau badan khusus yang dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokrasi oleh para *stakeholders* pendidikan di tingkat sekolah sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan mutu pendidikan di

⁴⁰ Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), 37.

⁴¹ Mulyono, *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 261

⁴² Bedjo Sujanto, *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah: Model Pengelolaan Sekolah di Era Otonomi Daerah*, (Jakarta: CV. Sagung Seto, 2007), 61.

sekolah.⁴³ Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa komite sekolah sebagai badan pelaksana pendidikan harus melibatkan peran serta masyarakat dalam mengatur dan menampung aspirasi masyarakat di lingkungan sekolah guna tercapainya tujuan mutu di lembaga pendidikan.

Komite sekolah atau madrasah dalam mengevaluasi program pendidikan juga ikut membantu proses perencanaan, pengawasan dan pengelolaan sekolah. selain itu, komite sekolah juga sebagai lembaga mandiri yang dibentuk untuk berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang memiliki tugas salah satunya ikut membantu penyediaan sarana prasarana pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Upaya untuk meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu senantiasa dilakukan oleh pihak sekolah, sehingga dapat mewujudkan lembaga pendidikan yang lebih baik, maka di setiap satuan pendidikan atau sekolah dibentuk suatu organisasi yaitu komite sekolah.⁴⁴

Komite sekolah bukan lembaga birokrasi baru. Kedudukan komite sekolah sama sekali tidak berada dibawah atau diatas kepala sekolah, melainkan sejajar. Komite sekolah juga sama sekali bukan sebagai institusi pemerintah, yang harus membuat pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat. Komite sekolah tak lain adalah orang tua dan masyarakat. Komite sekolah adalah badan mandiri yang menjadi wadah peran serta orang tua siswa dan masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pendidikan di madrasah dan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan sekolah.⁴⁵

2. Landasan Hukum Komite Sekolah Dalam Pendidikan

Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Komite sekolah diatur dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah. Peraturan Menteri

⁴³ Engkoswara dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 297.

⁴⁴ Kompri, *Manajemen Sekolah Teori dan Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 367.

⁴⁵ Sri Renani Pantjastuti, dkk, *Komite Sekolah: Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan* (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008), 95.

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah ditetapkan oleh Mendikbud Muhadjir Effendy pada tanggal 30 Desember 2016 tentang komite sekolah mulai diberlakukan setelah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham, Widodo Ekadjahjana, dalam berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 2117 pada tanggal 30 Desember 2016 di Jakarta.⁴⁶

Adapun tugas komite sekolah adalah memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, menggalang dana serta sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan, organisasi, dunia usaha, dunia industri maupun pemangku kepentingan melalui upaya inovatif dan kreatif, mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menindaklanjuti keluhan, saran, kritik serta aspirasi dari peserta didik, wali peserta didik, dan masyarakat.

3. Peran dan Fungsi Komite Sekolah

Peran merupakan suatu yang dimainkan atau dijalankan, peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang dimainkan atau diperankan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Menurut terminology peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dapat dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.⁴⁷

Peran erat kaitannya dengan status, dimana diantara keduanya sangat sulit dipisahkan. Peran adalah pola perilaku yang terkait dengan status. Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan kewajiban sesuai dengan kedudukan ia menjalankan suatu peran.⁴⁸ Teori peran adalah sebuah teori yang berbicara

⁴⁶ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, 2016.

⁴⁷ Syamsir Torang, *Organisasi dan Manajemen* (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali, 1982), 33

tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan daripadanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpang” dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.⁴⁹

Pengurus komite sekolah adalah personal yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut: pengurus komite sekolah dipilih oleh anggota secara demokratis dan terbuka dalam musyawarah komite. Masa kerja komite selama tiga tahun, sebagaimana dalam permendikbud, dan anggota komite bisa berasal dari pakar pendidikan. Jika diperlukan pengurus komite sekolah dapat menunjuk atau dibantu oleh tim ahli sebagai konsultan sesuai dengan bidang keahliannya.⁵⁰

Berdasarkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No004/U/Tahun 2002, serta permendikbud No 75 Tahun 2016 tentang pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah disebutkan bahwa ada empat peran yang dapat dijalankan oleh komite sekolah. Keempat peran tersebut antara lain:⁵¹

- a. Memberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.⁵²

Sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*). Salah satu fungsi utamanya adalah sebagai pemberi pertimbangan kepada pihak sekolah, terutama kepala sekolah dalam pengambilan keputusan yang strategis dan berdampak langsung pada proses pendidikan. Fungsi pemberi pertimbangan komite sekolah yaitu memberi masukan terhadap kebijakan sekolah, yang artinya komite memberikan saran atau

⁴⁹ Ibid, 4.

⁵⁰ Depdiknas, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Buku I* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2002), 25

⁵¹ Suhadi Winoto, *Komite Sekolah atau Madrasah dan Manajemen Mutu Pendidikan*, (Yogyakarta: CV Bildung Nusantara, 2021), 17.

⁵² Ibid, 18.

pendapat terhadap kebijakan yang akan ditetapkan sekolah, seperti kebijakan akademik, kurikulum tambahan, tata tertib siswa, hingga alokasi anggaran.

Adapun menurut Hasbullah dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan indikator kinerjanya dengan memberikan masukan dan pertimbangan mengenai:⁵³

- 1) Kebijakan pendidikan
- 2) Program pendidikan
- 3) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)

Kriteria fasilitas pendidikan

Membantu menyelaraskan program sekolah dengan harapan masyarakat komite menjadi penghubung antara sekolah dan masyarakat (orang tua, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya), memastikan bahwa program sekolah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lingkungan. Selain itu, dalam peran ini komite juga berfungsi mengawal transparansi dan akuntabilitas, yang dimaksud komite memberi pertimbangan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sumbangan dari orang tua, atau pendanaan lainnya, agar sesuai aturan dan terbuka kepada publik. Terlibat dalam Penyusunan Rencana Kerja Sekolah Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS), komite dilibatkan untuk memberikan perspektif dari pihak luar sekolah, sehingga rencana menjadi lebih menyeluruh.

Mendorong keputusan yang berorientasi pada mutu komite mendukung keputusan yang memprioritaskan peningkatan mutu pendidikan, termasuk dalam hal perbaikan fasilitas sekolah, atau pengembangan program pembinaan siswa. Contoh bentuk-bentuk pertimbangan yang diberikan komite sekolah: memberi saran terkait pemilihan ekstrakurikuler baru, menyampaikan aspirasi orang tua tentang kebutuhan sarana pembelajaran. Memberi masukan dalam pembentukan kebijakan pemanfaatan dana BOS.

⁵³ Hasbullah, Otonomi Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Press, 2007), 90.

- b. Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan (non finansial).⁵⁴

Komite sekolah tidak hanya berperan dalam memberikan pertimbangan kebijakan, tetapi juga memiliki peran penting sebagai pendukung finansial. Dalam peran ini, komite membantu sekolah dalam memastikan tersedianya sumber daya keuangan yang cukup untuk menunjang proses pendidikan, terutama ketika dana dari pemerintah masih terbatas atau belum mencukupi seluruh kebutuhan operasional dan pengembangan sekolah.

Hasbullah mengemukakan bahwa Komite sekolah berperan sebagai baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, indikator kinerjanya yaitu:⁵⁵

- 1) Memantau kondisi sarana dan prasarana.
- 2) Menggalang dana dalam rangka pembiayaan pendidikan
- 3) Mendorong tumbuhnya perhatian masyarakat terhadap penyelenggara pendidikan yang bermutu.
- 4) Mengevaluasi pelaksanaan dukungan anggaran di sekolah

Fungsi dan tanggung jawab komite sekolah sebagai pendukung finansial, antara lain: menggalang dana (Fundraising) komite sekolah dapat menginisiasi atau mendukung kegiatan penggalangan dana seperti bazar, konser amal, donasi orang tua, hingga kerja sama dengan mitra luar (perusahaan atau lembaga sosial) untuk membantu membiayai kegiatan sekolah. Menjadi penghubung dengan donatur atau sponsor anggota komite, yang biasanya berasal dari berbagai latar belakang (orang tua murid, tokoh masyarakat, atau profesional), bisa menggunakan jejaring mereka untuk mencari sponsor atau pihak yang

⁵⁴ Hasmiana Hasan, "Fungsi Komite Sekolah Dalam Perkembangan dan Implementasi Program Sekolah Di SD Negeri 19 Kota Banda Aceh", Jurnal Pesona Dasar, Vol. 2 No. 3 (2014), 3-4.

⁵⁵ Hasbullah, Otonomi Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Press, 2007), 94.

bersedia memberikan bantuan finansial kepada sekolah. Mendukung pembiayaan kegiatan sekolah komite turut membantu menyediakan dana atau mencari sumber dana untuk kegiatan siswa seperti lomba, kegiatan ekstrakurikuler, pelatihan guru, renovasi fasilitas, dan program unggulan sekolah lainnya.

Fungsi dan tanggung jawab komite sekolah dalam mendukung non finansial, antara lain: mendukung pelaksanaan program sekolah komite membantu pelaksanaan kegiatan seperti lomba, upacara, peringatan hari besar, kegiatan ekstrakurikuler, atau program literasi dengan menjadi panitia atau relawan. Menjadi narasumber atau fasilitator kegiatan, anggota komite yang memiliki keahlian tertentu bisa menjadi pembicara dalam seminar, pelatihan guru, pembinaan karakter siswa, atau bimbingan karier. Menjembatani komunikasi antara sekolah dan orang tua

Contoh bentuk dukungan finansial dari komite sekolah: menyumbangkan dana pembangunan toilet atau perpustakaan, menggalang iuran sukarela untuk mendanai pelatihan guru atau pembangunan gedung, menyediakan dana transportasi untuk siswa yang mengikuti lomba di luar kota, membantu pengadaan peralatan praktik atau alat bantu belajar.

- c. Mengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan output pendidikan di satuan pendidikan

Komite Sekolah memegang peran penting dalam menjaga transparansi atau (keterbukaan informasi) serta akuntabilitas (pertanggungjawaban) dalam pengelolaan sekolah, terutama dalam aspek keuangan, kebijakan, dan pelaksanaan program pendidikan. Peran ini sangat krusial untuk memastikan bahwa proses pendidikan berjalan jujur, adil, dan sesuai dengan peraturan serta harapan masyarakat.

Komite sekolah ikut berperan aktif dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, indikator kerjanya yaitu:⁵⁶

- 1) Mengawasi proses pengambilan keputusan di sekolah.
- 2) Kontrol terhadap perencanaan sekolah.
- 3) Mengontrol proses pelaksanaan program sekolah.

Fungsi komite sekolah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas, antara lain: mengawasi penggunaan dana sekolah komite ikut memantau pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana sumbangan sukarela, dan sumber dana lainnya agar digunakan sesuai rencana dan kebutuhan nyata sekolah. Mendorong keterbukaan informasi komite mendorong sekolah untuk menyampaikan informasi penting kepada orang tua dan masyarakat, seperti penggunaan anggaran, laporan pertanggungjawaban, hasil evaluasi program, hingga kebijakan yang akan dijalankan. Mendampingi penyusunan dan evaluasi RKAS Dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), komite dilibatkan agar seluruh rencana dan penggunaan dana memiliki dasar pertimbangan yang kuat, serta diawasi pelaksanaannya secara berkala. Mengawasi pelaksanaan program sekolah komite ikut memantau pelaksanaan program kerja sekolah agar sesuai dengan rencana dan tidak menyimpang dari tujuan awal. Jika ditemukan ketidaksesuaian, komite dapat memberikan masukan atau rekomendasi perbaikan. Mendorong etika dan integritas komite juga memiliki fungsi moral untuk memastikan bahwa pihak sekolah (terutama kepala sekolah dan guru) menjalankan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan menghindari praktik penyimpangan atau korupsi.

⁵⁶ Hasbullah, Otonomi Pendidikan, 94

- d. Mediator antara sekolah, pemerintah (eksekutif) dan dengan masyarakat di satuan pendidikan.⁵⁷

Komite Sekolah memiliki peran strategis sebagai mediator agency, yaitu sebagai perantara atau penghubung antara berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Pihak-pihak ini meliputi sekolah, orang tua siswa, masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan stakeholder lainnya. Dalam peran ini, komite berfungsi untuk menjaga komunikasi yang baik, menyelaraskan kepentingan, serta membangun kerja sama yang saling menguntungkan demi peningkatan mutu pendidikan.

Menurut Sagala komite sekolah berperan sebagai mediator dengan masyarakat di satuan pendidikan, indikator kinerjanya yaitu:⁵⁸

- 1) Melakukan kerjasama dengan masyarakat.
- 2) Menampung aspirasi, ide, tuntutan dan juga berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- 3) Menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

Fungsi komite sekolah sebagai Mediator Agency: Menjembatani komunikasi antara sekolah dan orang tua, komite menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran dari orang tua kepada pihak sekolah, serta menjelaskan kebijakan dan program sekolah kepada orang tua agar tercipta saling pengertian. Memfasilitasi kerja sama antara Sekolah dan masyarakat komite berperan dalam membangun kemitraan dengan masyarakat, tokoh lokal, atau organisasi sosial untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pembinaan karakter siswa. Menjadi penengah saat terjadi konflik jika terjadi konflik antara pihak sekolah dengan siswa, guru, atau orang tua, komite dapat menjadi pihak yang netral dan objektif untuk memfasilitasi penyelesaian secara damai.

⁵⁷ M. Misbah, "Peran dan Fungsi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan", *Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, Vol. 14 No. 1 (2009), 4.

⁵⁸ Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Bandung: Cv: Pustaka Setia), 251.

Menurut Bedjo Sujanto dalam bukunya manajemen berbasis sekolah, komite sekolah atau madrasah berfungsi dalam hal sebagai berikut:⁵⁹

- 1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan
 - 2) Melakukan sebuah kerjasama bersama-sama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi/ dunia usaha/ pada dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
 - 3) Menampung serta menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
 - 4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 - a) Kebijakan dan program pendidikan
 - b) Rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS)
 - c) Kriteria kinerja satuan pendidikan
 - d) Kriteria tenaga kependidikan
 - e) Kriteria fasilitas pendidikan, Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan
 - 5) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
 - 6) Menggalang dana dari masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
 - 7) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
- Sebagai realisasi dari berbagai peran dan fungsi komite sekolah serta manifestasi sistem pendidikan yang demokratis (dimana pendidikan adalah milik rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat).

⁵⁹ Bedjo Sujanto, *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah: Model Pengelolaan Sekolah di Era Otonomi Daerah*, (Jakarta: CV. Sagung Seto, 2007), 62.

4. Tujuan Komite Sekolah

Selain itu, tujuan komite madrasah dalam buku Engkoswara dan Aan Komariah adalah:⁶⁰

- a. Mewadahi dan meningkatkan peran serta para stakeholder pendidikan di tingkat sekolah dalam merumuskan berbagai kebijakan sekolah.
- b. Mewadahi dan meningkatkan peran serta para stakeholder pendidikan di tingkat sekolah dalam memecahkan masalah pendidikan.
- c. Memfasilitasi upaya peningkatan kinerja dan profesionalisme kepala sekolah, guru dan staf.
- d. Menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan sekolah.
- e. Mengembangkan dan menetapkan program kurikulum yang efektif
- f. Memfasilitasi dan mengontrol penerapan sistem manajemen sekolah yang transparan dan demokrasi.

Seperti halnya dikemukakan juga oleh Dadang Dally bahwa tujuan komite sekolah diantaranya ialah untuk:⁶¹

- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di madrasah.
- b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
- c. Menciptakan kondisi yang transparansi, akuntabel, dan demokrasi dalam penyelenggaraan dan pelayanan yang bermutu dalam sekolah.

Dari kesimpulan diatas tujuan komite sekolah tidak hanya sebagai tempat aspirasi masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan saja, melainkan dalam pelaksanaannya dibutuhkan tanggung jawab serta ikut berperan aktif dalam membantu pada semua kegiatan sekolah bersama stakeholder sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan dalam pengelolaannya dibutuhkan transparansi dibutuhkan transparansi, akuntabel, dan demokratis. Komite sekolah dalam peningkatan partisipasi

⁶⁰ Engkoswara dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 298.

⁶¹ Mulyasa, *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 128.

harus menciptakan lingkungan yang terbuka dan demokratis, dimana warga sekolah (karyawan, guru, staf, siswa) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, usahawan, dan sebagainya) dapat terlibat langsung dalam proses penyelenggaraan pendidikan.

C. Kontribusi Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

Kontribusi komite sekolah terhadap sekolah sangat beragam dan variatif. Sedangkan kontribusi masyarakat melalui komite sekolah terhadap sekolah ada empat, yaitu dana, sarana prasarana dan pemikiran atau moral.⁶² Yang lebih dominan biasanya berwujud dana karena dorongan partisipasi yang dilakukan oleh kepala sekolah lebih diarahkan untuk menghimpun dana bagi kepentingan pengembangan sekolah. Sementara untuk penggerakan partisipasi untuk menjaring pemikiran, dukungan dan fasilitas belum banyak dilakukan.

Menurut Satori dalam Syaiful Sagala, antara lain menyangkut hal-hal berikut:⁶³

1. Penyusunan perencanaan strategik sekolah
2. Mengadakan pertemuan untuk menampung dan membahas berbagai masukan, masalah, ide-ide, aspirasi yang disampaikan oleh anggota komite sekolah
3. Memikirkan upaya-upaya yang mungkin dilakukan untuk memajukan sekolah
4. Membahas laporan tahunan sekolah sehingga memperoleh gambaran yang tepat atas penerimaan komite sekolah.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran komite sekolah secara umum dalam suatu lembaga pendidikan atau sekolah. Pertama, sebagai badan pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan di tingkat satuan pendidikan. Kedua, sebagai badan pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam

⁶² Baharudin dan Moh. Makin, *Manajemen Pendidikan Islam; Transformasi menuju Sekolah Unggul* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 93-94.

⁶³ Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Bandung: Cv: Pustaka Setia), 251.

penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Apapun yang menjadi keputusan sekolah, keputusan tersebut merupakan hasil dari kesepakatan bersama sehingga komite sekolah pasti akan mendukungnya.

Ketiga, sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Keempat, sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan. Adapun fungsi komite sekolah sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat adalah komite sekolah sebagai perantaranya dan berfungsi sebagai jembatan penghubung di antara keduanya.⁶⁴

Dengan demikian, keberadaan komite sekolah sangatlah penting dalam sebuah lembaga pendidikan. Di samping komite sekolah sebagai wadah ide dan aspirasi dari masyarakat, komite sekolah juga berperan sebagai pendukung terlaksananya semua program yang telah direncanakan oleh pengelola pendidikan. Komite sekolah juga berperan sebagai pengontrol terhadap semua aktivitas yang ada di lembaga pendidikan. Khususnya komite sekolah mengawal keharmonisan antara pihak pengelola lembaga pendidikan dengan masyarakat sekitar.

D. Efektivitas Peran

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan kegunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Steers mengemukakan bahwa “Efektivitas adalah jangkaun usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”. Menurut Gibson, “Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu

⁶⁴ Aminatul Zahroh, Total Quality Management “teori dan praktek manajemen untuk mendongkrak mutu pendidikan (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 110-111.

menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan”.⁶⁵

David J. Lawless dalam Gibson, Invancevich dan Donnelly mengatakan bahwa efektifitas memiliki tiga tingkatan yaitu:⁶⁶

- a. Efektivitas Individu, efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi
- b. Efektivitas kelompok, Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektifitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota dari organisasi.
- c. Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya. Efektivitas organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah tercapai.

Menurut Sondang P. Siagian memberikan definisi sebagai berikut: Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.⁶⁷ Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Abdulrahmat Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.

⁶⁵ Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly, Organisasi, terjemahan Agus Dharma, (Jakarta:erlangga,2001), hal 120.

⁶⁶ Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly, Organisasi, terjemahan Agus Dharma, (Jakarta:erlangga,2001), hal 120.

⁶⁷ Sondang P. Siagian, Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2002)

Menurut Mulyasa Efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumberdaya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional. Efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi anggota.⁶⁸

Dari beberapa pendapat diatas mengenai efektivitas, dapat kita simpulkan bahwa Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat, yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.⁶⁹

2. Indikator Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan.

E. Kerangka Berfikir

Mutu pendidikan merupakan ukuran kesesuaian pelayanan yang diberikan oleh pengelola pendidikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian mutu pendidikan menjadi tolak ukur kualitas layanan pendidikan sebuah sekolah. Sekolah dapat dikatakan

⁶⁸ Mulyasa, *Management Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hal 82

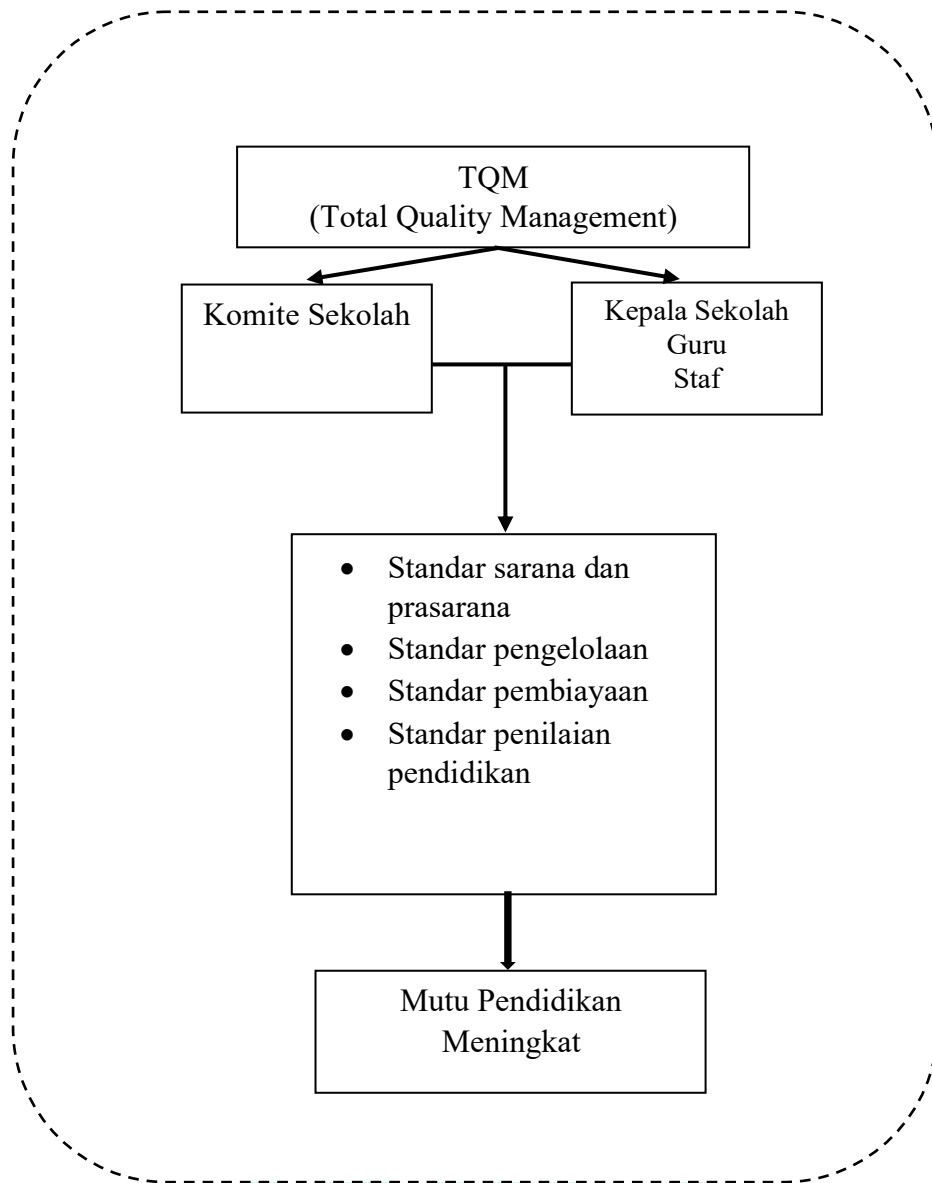
⁶⁹ Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1996), hal 15

bermutu apabila mampu memberi pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan memberi kepuasan pada pelanggan.

Komite sekolah merupakan suatu badan yang bersifat independen sebagai wadah masyarakat untuk meningkatkan mutu dan pengelolaan pendidikan di sekolah. Komite sekolah berperan sebagai pendukung, pengendali, dan pendorong pelaksanaan dan peningkatan mutu pendidikan. Dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan di sekolah, komite sekolah bekerjasama dengan kepala sekolah beserta guru dan staf sehingga komite sekolah memiliki posisi yang sejajar dengan pemangku kepentingan sekolah.

Peningkatan mutu pendidikan di sekolah akan berjalan optimal jika terdapat inisiatif bersama dari penyelenggara pendidikan. Untuk itu diperlukan kerjasama yang harmonis dan terpadu dari komite sekolah beserta para pemangku kepentingan agar mengelola pendidikan secara menyeluruh dan berkesinambungan. William Edward Deming menyebutnya dengan TQM (Total Quality Management). TQM merupakan pendekatan yang berfokus pada pengelolaan pendidikan yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan sekolah. Tujuan dari TQM adalah meningkatkan mutu pendidikan yang dimiliki sehingga memperoleh kepuasan pelanggan. Proses pengelolaan mutu pendidikan di sekolah terangkum dalam 8 Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.

Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme dan digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.⁷⁰ Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti secara langsung kepada pihak yang terlibat langsung dalam pendidikan, yaitu siswa, wali murid, serta pihak pengelola sekolah di SMAN 3 Ponorogo. Melalui penelitian ini, peneliti akan menganalisis peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, baik dari aspek pemberian pertimbangan kebijakan, dukungan finansial dan non-finansial, pengawasan transparansi, hingga perannya sebagai mediator dalam membangun hubungan antara sekolah, siswa, dan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji mengenai tantangan utama yang dihadapi oleh komite sekolah serta efektivitas komite sekolah dalam mendukung kegiatan peningkatan mutu pendidikan pada dua sekolah tersebut.

Penelitian kualitatif mampu memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.⁷¹ Pendekatan ini ditujukan untuk menekankan catatan secara terperinci, lengkap, dan mendalam yang menggambarkan situasi yang sebenarnya guna mendukung proses penyajian data.⁷²

Dalam penyusunan karya ilmiah ini jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah study kasus (*case study*). Studi kasus adalah suatu penelitian

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 15.

⁷¹ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 9.

⁷² Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), 96.

dengan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok, atau situasi. Menurut Smith, studi kasus dapat menjadi berbeda dari bentuk-bentuk penelitian kualitatif lain oleh fakta bahwa studi ini berfokus pada satu “unit tunggal” atau “suatu sistem terbatas”. Keterbatasan tersebut ditentukan apakah terdapat suatu batasan pada jumlah orang yang terlibat dapat diwawancarai atau suatu jumlah waktu tertentu untuk observasi. Jika terdapat jumlah orang tak terbatas (secara aktual atau teoritis) yang dapat diwawancarai atau pada observasi yang dapat dilaksanakan, maka fenomena tersebut tidak cukup terbatas untuk menjadi sebuah kasus.⁷³ Oleh karena itu berdasarkan pendapat tersebut, maka penelitian berfokus pada Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMAN 3 Ponorogo. Karena studi kasus merupakan jenis penelitian yang membutuhkan pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena yang sedang terjadi sehingga dapat dijadikan sebagai acuan bagi riset selanjutnya.⁷⁴ Penelitian ini juga dilakukan secara langsung yaitu melalui penelitian lapangan dimana untuk mendapat data yang akurat dan obyektif, maka peneliti secara langsung mendatangi lokasi penelitian.

Ciri penelitian kualitatif adalah peneliti sebagai instrumen penelitian itu sendiri dan menjadi kunci dari penelitian. Sebab, kehadiran peneliti menentukan seluruh jalan penelitiannya sendiri. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai human instrument, yaitu peneliti adalah instrument penelitian itu sendiri, berkaitan dengan hal itu, maka seorang peneliti harus berinteraksi dengan sumber data dan benar-benar mengenal orang atau informan yang memberikan data.⁷⁵ Oleh karena itu, sebagai instrumen utama dalam penelitian ini peneliti melakukan interaksi dan keterlibatan langsung dengan informan. Melalui pendekatan ini peneliti juga berupaya menggali data secara mendalam mengenai peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMAN 3 Ponorogo.

⁷³ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 10

⁷⁴ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 7.

⁷⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014),

B. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber-sumber utama atau asli yang memuat informasi persoalan penelitian.⁷⁶ Data tersebut diperoleh dari informan terkait peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, baik melalui tahap wawancara maupun observasi kepada responden atau informan. Pada penelitian ini peneliti mencari data serta menggali informasi dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan yang ada di SMA Negeri 3 Ponorogo.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, data sekunder juga bisa dikatakan sebagai data pelengkap yang dapat digunakan untuk memperkuat data, agar data yang diberikan benar-benar sesuai dengan harapan peneliti dan mencapai titik jenuh. Menurut penjelasan diatas data primer yang diperoleh telah dilengkapi serta didukung oleh data sekunder sehingga dapat memperkuat penelitian ini. Data sekunder pada penelitian ini meliputi: dokumentasi terkait peran komite sebagai pertimbangan, pendukung finansial dan non finansial, pengontrol transparansi dan akuntabilitas, serta mediator agency, tantangan utama yang dihadapi komite dalam mengimplementasikan program, serta efektivitas peran komite sekolah dalam mendukung kegiatan peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo dan dokumen lain mengenai kinerja komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Terdapat dua informan penelitian, meliputi informan kunci dan informan pendukung sebagai acuan perolehan informasi data penelitian. Selain itu, data diperoleh melalui kegiatan observasi yang

⁷⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014),

mencakup keterlibatan dan aktivitas komite sekolah dalam mendukung kebijakan pendidikan, baik dalam aspek perencanaan, dukungan finansial dan non-finansial, pengawasan transparansi, serta perannya sebagai mediator dalam meningkatkan mutu pendidikan. Selain sumber data primer, terdapat sumber data sekunder merupakan data penunjang atau tambahan yang diperoleh dari sumber kedua yang mengacu pada informasi yang telah dikumpulkan oleh sumber data yang sudah ada, dalam artian sumber data yang diberikan secara tidak langsung. Data tersebut merupakan hasil dari 1). Observasi yang mencakup kegiatan dan keterlibatan komite sekolah dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan dana, serta adanya partisipasi dalam mendukung program pendidikan di sekolah. 2). Wawancara yang dilakukan dengan panduan wawancara berdasarkan pengembangan topik terkait peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan. Proses wawancara ini bersifat fleksibel dengan pertanyaan yang ditujukan kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua dan anggota komite sekolah, guru, siswa, serta wali murid. 3). Dokumentasi yang mencakup berbagai arsip dan laporan terkait kebijakan sekolah, kegiatan komite sekolah, laporan transparansi keuangan, serta program-program yang mendukung peningkatan mutu pendidikan di SMAN 3 Ponorogo.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Oleh karena itu peneliti memerlukan prosedur pengumpulan data secara lengkap dan rinci guna memperoleh data yang diperlukan sebagai penunjang dalam penelitian yang diteliti.

Adapun beberapa prosedur pengumpulan data pada penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik utama yang dilakukan dalam upaya pengumpulan data. Menurut Imam Gunawan, Pada hakikatnya wawancara dalam penelitian kualitatif dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu yang diawali dengan pertanyaan informal.⁷⁷ seperti yang dikemukakan juga oleh Stewart dan Cash bahwa wawancara merupakan proses komunikasi antara dua pihak yang dilakukan secara langsung berupa tanya jawab mengenai suatu pembahasan, dimana salah satu pihak memiliki satu tujuan yang hendak dicapai.⁷⁸ Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan, penggunaanya lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.⁷⁹ Dari wawancara ini, peneliti akan mendapatkan banyak informasi dari pengembangan pertanyaan yang dilakukan. Wawancara ini dilakukan untuk menggali data berupa informasi tentang peran atau keterlibatan dan aktivitas komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan kebijakan, pendukung finansial dan non finansial, pengontrol transparansi dan akuntabilitas, serta sebagai mediator penghubung antara pihak sekolah dan masyarakat di SMAN 3 Ponorogo.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara semistruktur di mana peneliti dalam pelaksanaannya lebih bebas dan leluasa dengan tujuan menemukan permasalahan lebih terbuka terkait pendapat dan ide yang diperoleh dari informan. Untuk memperoleh data

⁷⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 160.

⁷⁸ Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta: UNJ Press, 2020), 2.

⁷⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 73.

maka diperlukannya sumber data yang akan dijadikan sebagai informan di antaranya sebagai berikut.⁸⁰

- a. Informan kunci (*key informan*), yaitu kepala sekolah, komite sekolah, anggota komite terkait peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam kebijakan, pendukung finansial dan non-finansial, pengontrol transparansi dan akuntabilitas, serta mediator dalam peningkatan mutu pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji tantangan utama yang dihadapi komite dalam mengimplementasikan program sekolah, serta efektivitas peran komite sekolah dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan. Penentuan informan kunci dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan bahwa informan tersebut dianggap paling tahu terhadap objek dan situasi yang diteliti.
- b. Informan pendukung yaitu guru, siswa, dan wali murid terkait peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam kebijakan, pendukung finansial dan non-finansial, pengontrol transparansi dan akuntabilitas, serta mediator dalam peningkatan mutu pendidikan. Penentuan informan pendukung dilakukan dengan teknik *snowball sampling*, yaitu teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan bahwa data yang diperoleh belum memenuhi kapasitas sehingga mencari informan lain yang digunakan sebagai sumber data.

2. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi partisipan untuk mengamati peristiwa sebagaimana yang terjadi di lapangan secara alamiah.⁸¹ dimana peneliti mendatangi langsung lokasi penelitian yaitu SMA Negeri 3 Ponorogo. Observasi dilakukan untuk menggali data berupa kegiatan terkait peran komite sekolah berupa pemberi pertimbangan dalam penentuan kebijakan, pendukung finansial dan non finansial, pengontrol transparansi dan akuntabilitas, mediator

⁸⁰ Ibid, 71

⁸¹ Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 72.

penghubung antara sekolah dan masyarakat. Juga tantangan utama dalam mengimplementasikan program sekolah serta efektivitas peran komite sekolah dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non-partisipan, di mana peneliti hanya bertindak sebagai pengamat tanpa terlibat langsung dalam aktivitas yang dilakukan oleh komite sekolah di SMAN 3 Ponorogo. Observasi ini dilakukan untuk menggali data terkait peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, mencakup keterlibatan mereka dalam pemberian pertimbangan kebijakan, dukungan finansial dan non-finansial, pengawasan transparansi dan akuntabilitas, serta perannya sebagai mediator dalam membangun hubungan antara sekolah, siswa, dan masyarakat.

3. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto, “Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.”⁸² Dokumentasi merupakan sebuah data pendukung dalam sebuah penelitian, dengan adanya dokumentasi maka akan memperkuat data penelitian. Studi dokumen merupakan sebuah pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi. Dengan dokumentasi maka akan memperkaya data dalam sebuah penelitian, karena dokumentasi adalah sebuah bukti fisik yang menjadi landasan dalam sebuah penelitian.⁸³ Dokumentasi dilakukan untuk menggali data berupa keterlibatan dan aktivitas komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMAN 3 Ponorogo.

Dokumen yang diambil peneliti untuk dijadikan data adalah dan foto kegiatan komite sekolah seperti pada saat peresmian gedung sekolah, kegiatan ekstrakurikuler diklatsar yang dijembatani oleh komite sekolah,

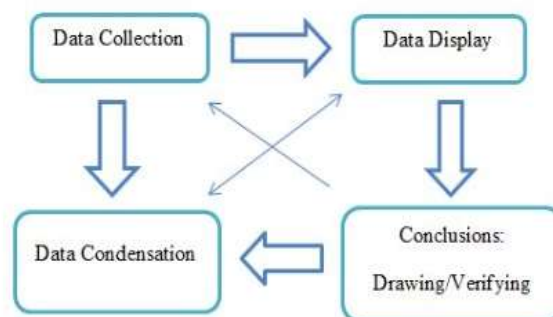
⁸² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 234.

⁸³ Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 329.

struktur kepengurusan komite, program-program komite sekolah yang dapat meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo.

D. Teknis Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data dilakukan sejak tahap wawancara, bila jawaban wawancara dirasa belum memuaskan, maka pertanyaan wawancara akan dikembangkan hingga diperoleh data yang dianggap kredibel. Milles dan Huberman dan Saldana dalam buku *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *condensation* (kondensasi data), data *display* (penyajian data), dan *conclusion drawing or verifications* (penarikan kesimpulan atau verifikasi).⁸⁴



Gambar 3.1 Analisis Data Milles, Huberman, dan Saldana

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data dari metode yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Semua jenis data ini memiliki satu aspek kunci secara umum, analisisnya terutama tergantung pada keterampilan integratif dan interpretatif dari peneliti. Interpretasi diperlukan karena data

⁸⁴ Miles Mathew B, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebooks Edition 3* (SAGE Publications: Singapore, 2014), 14.

yang dikumpulkan jarang berbentuk angka, data kaya rincian dan panjang.⁸⁵ Setelah pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, peneliti memilah mana data yang sesuai dengan rumusan masalah 1, mana data yang sesuai dengan rumusan masalah 2 dan mana data yang sesuai dengan rumusan masalah 3. Dalam memilah milih peneliti menggunakan teknik domain analisis. Data rumusan masalah 1 *is the kind of teori/konsep perencanaan Pemasaran Pendidikan*, data rumusan masalah 2 *is the kind of teori/konsep pelaksanaan Pemasaran Pendidikan* dan data rumusan masalah 3 *is the kind of teori/konsep dampak positif dari pelaksanaan Pemasaran Pendidikan*.⁸⁶ Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. *Data Condensation* (Kondensasi Data)

Miles, Huberman dan Saldana mengatakan bahwa Dalam kondensasi data merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut: /

- a. *Selecting* (pemilihan) Menurut Miles, Huberman dan Saldana peneliti harus bertindak selektif, yaitu menentukan dimensi-dimensi mana yang lebih penting, hubunganhubungan mana yang mungkin lebih bermakna, dan sebagai konsekuensinya, informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis.
- b. *Focusing* (pengerucutan) Miles, Huberman dan Saldana menyatakan bahwa memfokuskan data merupakan bentuk pra-analisis. Pada tahap ini, peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap seleksi data. Peneliti hanya membatasi data yang berdasarkan dari rumusan masalah.

⁸⁵ Ibid, 15

⁸⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 248.

- c. *Abstracting* (peringkasan) Tahap membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul dievaluasi khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan cukupan data.
- d. *Data Simplifying and Transforming* (penyederhanaan dan transformasi) Data dalam penelitian ini selanjutnya disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai cara yakni melalui seleksi yang ketat melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Tahapan setelah adanya kondensasi data adalah penyajian data, pada penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dengan bagan, hubungan antar kategori, uraian singkat dan sejenisnya. Dalam penyajian data biasanya menggunakan teks yang bersifat naratif, bertujuan untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi selanjutnya berdasarkan informasi yang telah dipahami atau yang sudah didapat.

4. *Conclusion Drawing or Verifications* (Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi)⁸⁷

langkah berikutnya yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang telah disampaikan di awal masih bersifat sementara, dan akan berubah setelah adanya bukti-bukti yang diperoleh saat pengumpulan data. Namun apabila bukti-bukti yang diperoleh bersifat valid dan terbukti kebenarannya serta sesuai dengan kesimpulan di awal, maka kesimpulan yang dikemukakan bersifat konsisten dan kredibel. Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan temuan.

E. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas) dan disesuaikan

⁸⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: alfabeta, 2015), 252.

dengan tuntutan pengetahuan, kriteria, serta paradigmanya sendiri.⁸⁸ Adapun tekniknya dalam pengecekan keabsahan data yang digunakan peneliti, yaitu meliputi:

1. Pengamatan yang Tekun

Kegigihan pengamatan yang disebutkan dalam penelitian ini adalah untuk menemukan karakteristik dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang terkait tentang kegiatan-kegiatan perencanaan, pembelajaran dan kegiatan lain yang berkaitan dengan LMS. Jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan suatu (kedalaman).⁸⁹ Ketekunan pengamatan ini dilaksanakan peneliti dengan cara mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol yang ada hubungannya dengan program LMS yang diterapkan di pembelajaran kitab kuning, kemudian menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik, sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi adalah teknik untuk memeriksa keabsahan data, dengan menggunakan sesuatu selain data untuk mengecek atau membandingkan dengan data tersebut. Ada tiga jenis teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi penyidik.⁹⁰ Pertama, dengan triangulasi sumber, dengan triangulasi sumber, adalah perbandingan dan tinjauan kredibilitas metodologis kualitatif dari informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Adapun bukti real dalam melaksanakan triangulasi dalam penelitian ini yaitu mengecek kebenaran hasil wawancara dan dokumen serta foto yang diperoleh dari lembaga yang diteliti. Kedua, triangulasi dengan metode, triangulasi dengan menggunakan metode dalam konteks penelitian ini,

⁸⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 321.

⁸⁹ Ibid, 335.

⁹⁰ Norman K Denzin, *Sociological Method* (New York: MC Grow Hill, 1978), 65.

digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan melakukan check data kepada sumber yang sama dengan metode yang berbeda. Aplikasinya dalam penelitian ini adalah menanyakan langsung kepada kepala dan komite sekolah mengenai peran komite sekolah baik sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan, pendukung finansial dan non finansial, pengontrol transparansi dan akuntabilitas, serta mediator agency dalam peningkatan mutu pendidikan. Ketiga, triangulasi dengan penyidik, triangulasi dengan penyidik dalam konteks penelitian ini, digunakan untuk pengecekan kembali derajat keabsahan data dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya. Contoh penerapannya dengan sumber dalam konteks penelitian ini adalah menguji ulang ataupun mengobservasi ulang peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dalam penelitian ini, teknik triangulasi yang digunakan oleh penulis ada 2 yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode/ teknik. Penggunaan 2 jenis triangulasi ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan keabsahan data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

3. Kecukupan Referensial

Konsep kecukupan referensial dalam konteks penelitian mulamula diusulkan oleh Eisner dalam Lincoln dan Guba sebagai alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan data tertulis untuk keperluan evaluasi. Kecukupan referensial dalam proses penelitian ini adalah dengan menggunakan *camera*, *tape-recorder*, *handycame* sebagai alat perekam yang pada saat senggang dimanfaatkan untuk membandingkan hasil yang diperoleh dengan kritik yang telah terkumpul.

F. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian mencakup langkah – langkah pelaksanaan dari awal sampai akhir, adapun langkahnya sebagai berikut:⁹¹

⁹¹ Miles, Huberman, and Saldana, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, 17-

1. *Selecting a sosial situation*, Pada tahapan ini, peneliti melakukan studi lapangan dan mengkaji secara teoritis untuk memilih masalah yang sesuai fakta dan mampu diangkat menjadi sebuah kasus yang layak untuk diteliti. (waktu)
2. *Doing participant observation*, Pada tahap selanjutnya, peneliti melakukan observasi ke lapangan (lokasi penelitian), untuk melihat seberapa jauh kegiatan yang berkaitan dengan masalah yang akan dikaji. Dalam tahapan ini peneliti hanya sebatas melakukan observasi saja dan mengambil data-data yang diperlukan.
3. *Making an ethnographic record*, Setelah tahapan observasi dilakukan, langkah selanjutnya adalah mencari narasumber yang dijadikan sebagai informan untuk di wawancarai sebagai penguat data observasi yang sudah dilakukan. Informa yang dipilih oleh peneliti merupakan informan yang memiliki peran didalam masalah yang bersangkutan serta mampu memberikan informasi secara tepat.
4. *Making descriptive observation*, Langkah ini adalah uraian dari hasil data yang telah didapat, kemudian dinarasikan sesuai dengan kebutuhan dan sasaran dari masalah yang di kaji. Dalam tahap ini, peneliti memilah informasi yang bisa dijadikan sebagai data untuk menjawab rumusan masalah yang akan diteliti.
5. *Making a domain analysis*, Dari informasi yang dinarasikan menjadi sebuah data, kemudian pada tahap ini peneliti menjabarkan data tersebut menjadi bagian-bagian dari teori literature yang sesuai. Teori inilah yang kemudian menjadi acuan bagi peneliti untuk mengkaji masalah yang ada dilapangan dengan teori yang ada. Sehingga pada tahapan ini nanti semua data dan teori akan terdisplay dengan jelas dan akan dapat ditemukan kesimpulan dari gabungan teori dan masalah yang dikaji.

BAB IV

PROGRAM KOMITE SEKOLAH DI SMA NEGERI 3 PONOROGO

Bab ini merupakan jawaban atas rumusan masalah yang pertama, menyangkut program komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan, pendukung finansial dan non finansial, pengontrol transparansi dan Akuntabilitas, Serta Mediator Agency Peningkatan Mutu Pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo, uraian bab disusun secara sistematis yang dimulai dari pembahasan tentang peran komite. Hasil tinjauan lapangan oleh peneliti terkait hal tersebut, ditutup dengan analisis mendalam peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo.

A. Paparan Data Umum

1. Sejarah Berdirinya Sekolah

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 03/10/U/1989 pada 5 Juni 1989, yang mengatur alih fungsi sekolah SPG dan SGO menjadi sekolah kejuruan atau SMA, Bapak Soetono, Kepala SPG Negeri Ponorogo, berkoordinasi dengan Kepala Depdikbud Kabupaten Ponorogo dan BP3 untuk memilih jenis sekolah yang tepat. Pilihan jatuh pada SMA, dan pada tahun ajaran 1989-1990, dibuka pendaftaran siswa baru untuk SMA Negeri 3 Ponorogo dengan 200 siswa yang dibagi menjadi 5 rombongan belajar. Proses Kegiatan Belajar Mengajar dimulai pada Juli 1989.

Pada tahun ajaran 1990/1991, siswa kelas 1 dipilih untuk penjurusan, dengan tiga jurusan: Fisika, Biologi, dan IPS. SPG Negeri resmi tutup pada 1991/1992, sesuai dengan keputusan tersebut, dan SMA Negeri 3 menjadi satu-satunya lembaga pendidikan di lokasi tersebut. Pada 2003, istilah SMU dihapus dan diganti dengan SMA. Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional pada 21 Oktober 2009 menyatakan SMA

Negeri 3 Ponorogo mendapatkan peringkat A, yang berlaku hingga tahun ajaran 2014/2015.⁹²

2. Lokasi Penelitian

SMA Negeri 3 Ponorogo merupakan salah satu dari beberapa sekolah yang ada di daerah Ponorogo. Sekolah ini memiliki predikat akreditasi A dan merupakan salah satu sekolah unggulan di Kabupaten Ponorogo. Secara geografis SMA Negeri 3 Ponorogo terletak di Jalan Laks. Sudarso Gg.III No.1, Lingkung Dua, paju, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Provinsi Jawa Timur 63419.⁹³

3. Visi Misi Sekolah

a. Visi Sekolah

Menjadi lembaga pendidikan yang mewujudkan peserta didik sebagai profil pelajar pancasila berdaya saing global.

b. Misi Sekolah

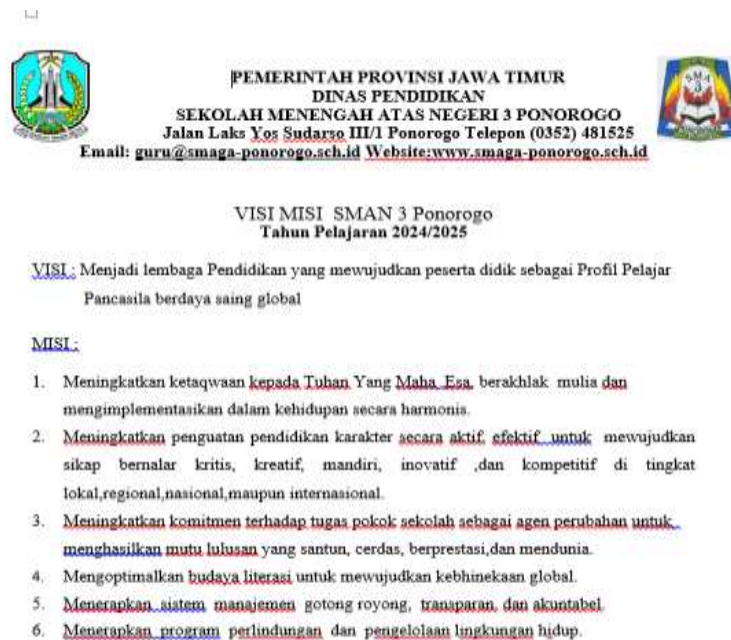
Sejalan dengan Visi diatas, SMA Negeri 3 Ponorogo memiliki Misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mengimplementasikan dalam kehidupan secara harmonis
- 2) Meningkatkan penguatan pendidikan karakter secara aktif, dan efektif untuk mewujudkan sikap bernalar kritis, kreatif, mandiri, inovatif, dan kompetitif di tingkat local, regional, nasional, maupun internasional.
- 3) Meningkatkan komitmen terhadap tugas pokok sekolah sebagai agen perubahan untuk menghasilkan mutu lulusan yang santun, cerdas, berprestasi, dan mendunia.
- 4) Mengoptimalkan budaya-budaya literasi untuk mewujudkan kebhinekaan global.

⁹² Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 01/D/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

⁹³ Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 02/D/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

- 5) Menerapkan sistem manajemen gotong royong, transparan, dan akuntabel.
- 6) Menerapkan program perlindungan dan pengelolaan bagi lingkungan hidup.⁹⁴



Gambar 4.1 Visi dan Misi SMA Negeri 3 Ponorogo

3. Struktur Kepemimpinan

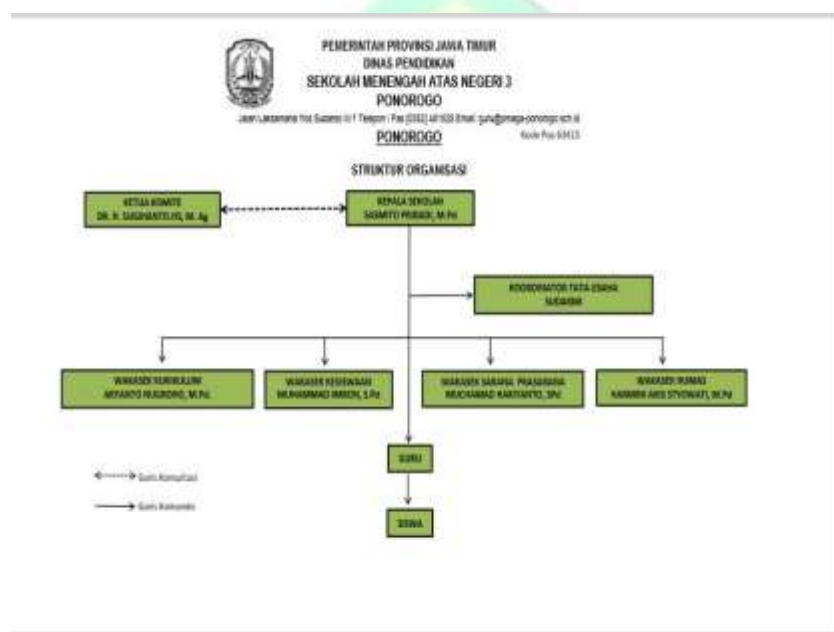
Struktur organisasi adalah pola tugas dan hubungan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi merupakan suatu pola atau gambar yang menggambarkan tipe organisasi kedudukan dan jenis wewenang pejabat.⁹⁵ Di SMA Negeri 3 Ponorogo yang menempati kedudukan tertinggi yaitu kepala sekolah, dibawahnya ada koordinator tata usaha, kemudian di lanjut bawahnya wakil kepala kurikulum, wakil kepala kesiswaan, wakil kepala sarana pra sarana, dan wakil kepala humas. Dibawahnya wakil kepala ada guru dan bawahnya lagi siswa.

Unsur Pimpinan SMA Negeri 3 Ponorogo, sebagai berikut:

⁹⁴ Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 03/D/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

⁹⁵Nurlia, 'Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Pengukuran Kualitas Pelayanan (Perbandingan Antara Ekspektasi/Harapan Dengan Hasil Kerja)', *Meraja Journal*, 2.2 (2019), pp. 53–54.

Kepala Sekolah	: Sasmito Pribadi, M.Pd.
Ketua Komite	: Dr. H. Sugihanto. HS, M.Ag.
Koordinator Tata Usaha	: Sudarmi
Waka Kurikulum	: Aryanto Nugroho, M.Pd.
Waka Kesiswaan	: Muhammad Imron, S.Pd.
Waka Sarpras	: Muchamad Hariyanto, S.Pd.
Waka Humas	: Harmini Aris Styowati, M.Pd. ⁹⁶



Gambar 4.2 Struktur Kepemimpinan SMA Negeri 3 Ponorogo

B. Paparan Data Khusus Program Komite Sekolah di SMAN 3 Ponorogo

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 19 Desember 2024. Pada tahap ini peneliti memaparkan data yang diperoleh dari sebuah proses kegiatan yang berupa tahapan yang sudah peneliti lakukan sebelumnya. Baik berupa wawancara, observasi maupun dokumentasi sesudah peneliti melakukan paparan data yang diperoleh, kemudian peneliti melakukan analisis terhadap data yang sudah didapatkan.

⁹⁶ Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 04/D/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

Peneliti melakukan analisis yang digunakan adalah analisis teori milik Miles, Huberman, dan Saldana deskriptif kualitatif. Berikut ini pemaparan data lapangan yang berkaitan tentang program komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan, pendukung finansial dan non finansial, pengontrol transparansi dan akuntabilitas, serta mediator agency peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo dan SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo.

1. Sebagai Pemberi Pertimbangan dalam Penentuan dan Pelaksanaan kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo

Setiap lembaga pendidikan tentunya memiliki badan komite sekolah sebagai perwakilan masyarakat dalam membantu program pendidikan di sekolah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Sasmito Pribadi, M.Pd. selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Ponorogo:

Sesuai dengan Permendiknas Nomor 75 Tahun 2016 terkait dengan peran komite sekolah, tentu saja sekolah memiliki komite sekolah yang kami pilih sesuai dengan harapan kami yang dapat membantu memberi masukan saran serta menjadi perwakilan masyarakat dan wali murid dalam menyampaikan aspirasi mereka. Komite sekolah yang kami pilih merupakan tokoh masyarakat yang berpengaruh dengan harapan dapat memberi peluang untuk meningkatkan mutu sekolah.⁹⁷

Sebagaimana juga disampaikan oleh Bapak Dul Aziz selaku ketua komite SMA Negeri 3 Ponorogo, bahwa komite dibentuk juga untuk menjembatani hubungan pihak sekolah dan juga masyarakat:

Komite sekolah itu badan yang dibentuk sekolah untuk menjadi penengah antara pihak sekolah dan masyarakat. Walaupun pada kenyataannya kami tidak begitu terlihat, tapi komite juga dilibatkan dalam rapat atau pertemuan di sekolah khususnya ketika rapat perumusan kegiatan sekolah.⁹⁸

Bapak Muhammad Iskak selaku anggota komite SMA Negeri 3 Ponorogo juga menyampaikan bahwa: “Komite sekolah dibentuk oleh

⁹⁷ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

⁹⁸ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

sekolah dengan harapan dapat menjadi penghubung antara pihak sekolah dan juga masyarakat terutama orang tua siswa. dengan upaya menjadi akses komunikasi dari pihak sekolah dan masyarakat untuk mencapai tujuan pendidikan”.⁹⁹

Hal ini sesuai dengan hasil observasi mengenai struktur komite sekolah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan sekolah, komite sekolah diambil dari perwakilan tokoh masyarakat terkemuka dan memiliki integritas tinggi atau wali murid yang memiliki relasi luas. Dengan latar belakang dan pengalaman mereka, komite ini dapat memberikan kontribusi berharga dalam meningkatkan kualitas sekolah.¹⁰⁰

Komite sekolah SMA Negeri 3 Ponorogo dilibatkan dalam pemberian masukan atau pemberi pertimbangan melalui rapat yang diselenggarakan di sekolah, setara dengan pernyataan Bapak Sasmito Pribadi, M.Pd:

Jadi begini, komunikasi antara pihak sekolah dan komite itu kami bangun lewat berbagai cara, nggak cuma lewat satu jalur aja. Biasanya kami rutin adakan rapat triwulanan, yang memang jadi forum utama buat menyampaikan laporan perkembangan sekolah, termasuk penggunaan dana dan pelaksanaan program. Dalam rapat itu, komite bisa memberikan saran, kritik, maupun masukan yang membangun, dan semuanya kami tampung serta bahas bersama.¹⁰¹

Bapak Dul Aziz selaku ketua komite juga menyampaikan pernyataan yang sama mengenai:

Untuk komunikasi baik antara kami dari pihak komite dengan sekolah alhamdulillah sejauh ini berjalan cukup baik ya. Biasanya pihak sekolah rutin mengundang kami untuk hadir dalam rapat contohnya dalam rapat di awal semester tahun ajaran baru, yang disitu kita bahas banyak hal mulai dari laporan kegiatan, penggunaan dana, sampai rencana program ke depan.¹⁰²

⁹⁹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 03/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

¹⁰⁰ Lihat Transkrip Observasi Nomor: 01/O/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

¹⁰¹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

¹⁰² Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

Bapak Muhammad Iskak juga berpendapat yang sama mengenai mekanisme pelibatan komite sekolah biasanya dilaksanakan melalui forum rapat.

“Kalau dari kami yang di komite, ya komunikasi ini penting banget. Biasanya kami diajak rapat tiap tiga bulan sekali, dan di situ kami bisa tahu perkembangan sekolah, apa yang sudah jalan, dan apa yang masih jadi PR. Kita juga punya ruang buat kasih pendapat, bahkan kalau perlu kritik yang membangun. Tapi komunikasi itu nggak selalu harus nunggu rapat. Kadang kita bisa langsung kontak pihak sekolah lewat WA, atau pas kebetulan datang ke sekolah, bisa ngobrol langsung sama kepala sekolah atau guru. Jadi lebih cair dan cepat ditindaklanjuti kalau ada saran.”¹⁰³

Diketahui bahwa komite sekolah SMA Negeri 3 Ponorogo sebagai mitra lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah, juga sebagai mitra sekolah yang memiliki wewenang dalam memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan program pendidikan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Sasmito Pribadi, M.Pd. selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Ponorogo:

Jadi begini, komite sekolah disini sangat aktif berpartisipasi dalam beberapa kegiatan sekolah, tentu saja kami melibatkan mereka karena dengan adanya komite sekolah ini sangat membantu kami merealisasikan kegiatan dan program sekolah. Tentu dalam beberapa kegiatan kami memberikan kesempatan komite untuk memberikan masukan serta saran sekaligus juga mempertimbangkan rencana kegiatan tersebut, jika ada masukan atau saran dari komite tentu akan kami revisi dan akan kami pertimbangan dengan musyawarah bersama.¹⁰⁴

Hal ini juga diperkuat dengan penjelasan Bapak Dul Aziz selaku Ketua Komite Sekolah SMA Negeri 3 Ponorogo, Selain dilibatkan dalam rapat kegiatan komite sekolah juga diberi wewenang untuk memberi pertimbangan sebelum kegiatan tersebut benar-benar disahkan. sebagai berikut:

¹⁰³ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 03/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

¹⁰⁴ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

Kami dari komite sekolah biasanya dilibatkan secara resmi saat pihak sekolah akan mengadakan rapat penyusunan kegiatan, terutama ketika mulai menyusun RKAS tahunan yang dilakukan pada awal tahun ajaran baru. Biasanya kami diajak rapat setelah sekolah menyusun draft awal. Dalam rapat itu, kami membaca dan mencermati rencana kegiatan maupun alokasi anggaran, lalu kami memberikan beberapa masukan atau pertimbangan, baik dari segi prioritas kegiatan maupun efisiensi penggunaan anggaran. Kami biasanya juga membawa aspirasi dari orang tua siswa. sehingga sasarannya lebih konkret, karena bersumber dari kebutuhan di lapangan. Dan alhamdulillah, komunikasi kami dengan pihak sekolah sangat terbuka. Tentunya kami juga paham batasan mana yang menjadi wewenang sekolah, dan mana yang bisa kami bantu pertimbangkan.¹⁰⁵

Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, salah satunya dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), peran ini bertujuan agar program dan anggaran yang disusun oleh pihak sekolah benar-benar relevan dengan kebutuhan peserta didik, mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Sasmito Pribadi, M.Pd. selaku Kepala Sekolah SMAN 3 Ponorogo, sebagai berikut:

Peran komite sekolah sangat penting, ya. Komite itu bukan hadir sebagai formalitas, tapi benar-benar kami libatkan dalam rapat penyusunan kegiatan terutama dalam penyusunan RKAS. Biasanya setelah kami menyusun draft awal bersama tim manajemen sekolah, kami undang komite untuk memberikan masukan. Misalnya, pada tahun kemarin, komite menyarankan agar anggaran untuk pengembangan sarana pembelajaran digital ditingkatkan, karena melihat kebutuhan siswa yang makin banyak belajar menggunakan laptop dan internet.¹⁰⁶

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Dul Aziz selaku ketua komite bahwasanya dalam rapat terkait RKAS, komite selalu hadir dan memberi masukan terkait apa saja yang menyangkut kegiatan sekolah untuk satu tahun kedepan.

¹⁰⁵ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

¹⁰⁶ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

Dalam rapat awal tahun terkait RKAS, saya selaku komite sekolah dan anggota lainnya ikut menghadiri rapat tersebut. Kemudian kami membahas mengenai apa saja kegiatan yang perlu ditingkatkan atau perlu ditambahkan untuk mendukung peningkatan mutu sekolah. Kemudian juga membahas mengenai fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan, dan sekolah akan memberikan rincian anggaran. Dan tentunya jika dirasa cukup kami sama-sama menyetujui atas apa yang sudah dianggarkan pihak sekolah untuk kemajuan sekolah.¹⁰⁷

Pertimbangan komite tentu saja memiliki pengaruh terhadap penentuan kebijakan sekolah, karena SMA Negeri 3 Ponorogo sangat terbuka dan mendengar setiap aspirasi wali murid salah satunya melalui pertimbangan komite sekolah. Karena komite sekolah merupakan perwakilan dari wali murid. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sasmito Pribadi, M.Pd: “Pengaruh kami cukup besar, terutama karena kami mewakili suara orang tua dan masyarakat. Pihak sekolah juga sangat terbuka terhadap usulan kami. Tentu saja setiap usulan atau masukan kami mengenai kebijakan sekolah akan diperhatikan oleh pihak sekolah”.¹⁰⁸

Sesuai dengan pernyataan tersebut, Bapak Muhammad Iskak selaku anggota komite juga menyampaikan bahwa:

Tentu saja sekolah akan mendengar usulan kami mbak, karena menurut mereka kami adalah perwakilan wali murid yang akan selalu menyuarakan aspirasi dan harapan wali murid serta masyarakat terhadap kebijakan sekolah. Jika kami keberatan atau tidak setuju dengan suatu kebijakan mengenai kegiatan sekolah maka sekolah akan mempertimbangkan itu dan meminta pertimbangan kepada komite.¹⁰⁹

Bapak Dul Aziz selaku ketua komite juga memperkuat pernyataan diatas, beliau menyampaikan bahwa:

¹⁰⁷ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

¹⁰⁸ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

¹⁰⁹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 03/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

Jika ditanya berpengaruh atau tidak tentu usulan kami selaku komite akan didengarkan dan diperhatikan sekolah juga akan mempertimbangkan kembali mengenai masukan yang kami sampaikan. Tentu dalam beberapa kegiatan kami memberikan kesempatan komite untuk memberikan masukan serta saran sekaligus juga mempertimbangkan rencana kegiatan tersebut, jika ada masukan atau saran dari komite tentu akan kami revisi dan kami pertimbangan dengan musyawarah bersama.¹¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMAN 3 Ponorogo, diketahui bahwa Komite Sekolah berperan aktif dalam sejumlah kebijakan yang berkaitan langsung dengan pengembangan siswa maupun pengelolaan program sekolah. Kepala Sekolah menyampaikan:

Iya, Komite Sekolah sangat kami libatkan, terutama dalam kebijakan-kebijakan yang bersentuhan langsung dengan siswa. Misalnya dalam penyusunan RKAS diawal tahun ajaran baru, juga dalam program pengembangan karakter siswa, kami selalu minta masukan dari pihak komite karena mereka juga tahu kebutuhan dan harapan dari orang tua. Terus, waktu kami mau menentukan ekstrakurikuler apa aja yang bisa difasilitasi sekolah, komite juga ikut rembukan bareng supaya kegiatannya sejalan dengan nilai-nilai sekolah, minat anak-anak, serta harapan orang tua.¹¹¹

Bapak ketua komite juga menyampaikan pernyataan serupa, bahwa:

Betul sekali. Kami dari komite sekolah memang aktif dilibatkan dalam beberapa kebijakan penting yang menyangkut siswa. Salah satunya adalah kebijakan tentang penguatan karakter. Biasanya kami duduk bareng dengan pihak sekolah untuk diskusi tentang program-program yang bisa menanamkan nilai kedisiplinan, gotong royong, dan tanggung jawab pada siswa. Misalnya program keagamaan seperti pesantren kilat, kegiatan bakti sosial, atau program mengenai peduli lingkungan sekolah. Dalam hal ekstrakurikuler, kami juga dilibatkan dari awal. Pihak sekolah terbuka dalam menyampaikan rencana, lalu kami bantu memberi masukan. Kadang kami juga bantu mencari pembina atau narasumber dari luar, apalagi kalau ada anggota komite yang punya latar belakang atau relasi yang relevan. Contohnya, saat kegiatan Diklatsar PKS (Patroli Keamanan Sekolah), kami bantu fasilitasi

¹¹⁰ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

¹¹¹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

lewat relasi kami di kepolisian. Selain itu juga pernah ada pelatihan anti-narkoba yang melibatkan pihak Polres, itu juga atas kerja sama yang kami bantu jembatani.¹¹²

Selain itu, Bapak Muhammad Iskak juga menambahkan bahwa komite turut memantau dan memberi evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan siswa berupa kebijakan pemilihan ekstrakurikuler, serta penggunaan dana BOS:

Tentu saja selain ikut dilibatkan dalam penyusunan RKAS komite juga ikut memantau dan memberi evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemilihan ekstrakurikuler wajib, penggunaan dana BOS, dan kegiatan keagamaan serta karakter siswa. Nah, alokasi dan penggunaannya tentu harus transparan, dan di situ komite ikut memantau supaya tepat sasaran, dan biasanya setelah kegiatan, kita adakan evaluasi bareng.¹¹³

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Komite Sekolah SMA Negeri 3 Ponorogo telah menjalankan perannya sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan sekolah dengan cukup baik. Komite tidak hanya hadir sebagai pelengkap administrasi, tetapi juga menjadi mitra aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan strategis di lingkungan sekolah. Peran mereka terlihat nyata dalam berbagai forum, terutama dalam pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), perencanaan program sekolah, serta pengadaan dan perbaikan sarana prasarana.

Kerjasama yang sinergis antara kepala sekolah, tenaga pendidik, dan komite sekolah akan menghasilkan keputusan-keputusan yang lebih matang dan berpihak pada kepentingan peserta didik. Komite sekolah juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara orang tua dan sekolah, memastikan bahwa aspirasi orang tua tersampaikan serta membantu pihak sekolah dalam menyosialisasikan kebijakan dan program yang dirancang.

¹¹² Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

¹¹³ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 03/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

Melalui peran aktif dalam rapat dan forum musyawarah, komite sekolah turut memberikan masukan-masukan yang konstruktif serta ikut mengevaluasi jalannya kebijakan yang telah diambil. Hal ini menjadi bukti bahwa keterlibatan komite bukan hanya simbolik, melainkan memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo. Dengan demikian, keberadaan komite sekolah yang solid, responsif, dan partisipatif menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang lebih baik.

2. Sebagai Pendukung Finansial dan Non Finansial Peningkatan Mutu Pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, peran Komite Sekolah tidak hanya terbatas pada pemberian pertimbangan terhadap kebijakan, tetapi juga sebagai pendukung dalam bentuk finansial dan non-finansial. Komite Sekolah SMA Negeri 3 Ponorogo turut ambil bagian dalam membantu sekolah menjalankan program-program pengembangan yang tidak sepenuhnya terakomodasi oleh dana operasional pemerintah. Dukungan ini menjadi salah satu bentuk sinergi antara sekolah dan masyarakat dalam mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas dan merata. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Bapak Sasmito Pribadi, M.Pd selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Ponorogo:

Iya, tentu ada, Mbak. Kami dari pihak sekolah memang sering dibantu komite dalam bentuk dukungan finansial. Jadi selama ini, hubungan kami dengan komite sekolah memang sangat erat, khususnya dalam hal mendukung program-program peningkatan mutu pendidikan. Salah satu bentuk dukungan yang paling terasa itu ya dari sisi finansial.¹¹⁴

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Dul Aziz selaku komite sekolah SMA Negeri 3 Ponorogo, bahwa dukungan finansial Komite sekolah turut memberikan dukungan finansial sebagai bentuk partisipasi nyata dalam peningkatan mutu pendidikan. Dukungan ini biasanya

¹¹⁴ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

diwujudkan melalui penggalangan dana untuk membantu kebutuhan yang belum tercakup dalam dana BOS.

Nah, disinilah komite hadir untuk membantu. Biasanya kami melakukan penggalangan dana, tentu tetap melibatkan wali murid dan dilakukan secara transparan. Dukungan ini bisa dalam berbagai bentuk, tergantung kebutuhan sekolah, dan semuanya dilakukan dengan semangat gotong royong demi kebaikan bersama. Yang terpenting, kami selalu menjalin komunikasi yang baik dengan pihak sekolah agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan.¹¹⁵

Diperkuat pula dari penjelasan Bapak Muhammad Iskak selaku anggota komite SMA Negeri 3 Ponorogo:

Jadi begini, kami sebagai komite sangat memahami bahwa anggaran dari pemerintah, seperti dana BOS itu memang sudah ada porsinya masing-masing, dan biasanya diperuntukkan untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu yang sifatnya prioritas. Tapi kenyataannya di lapangan, kebutuhan sekolah itu bisa berubah-ubah dan seringkali bersifat mendesak atau tidak terduga. Nah, tidak semua kebutuhan itu bisa langsung diakomodasi dari dana resmi yang tersedia. Di situlah peran komite sekolah kami coba hadir, sebagai mitra yang membantu menutupi kekurangan tersebut. Kami berusaha mencari solusi bersama, terutama untuk hal-hal yang benar-benar dibutuhkan oleh siswa dan guru dalam proses belajar-mengajar sehari-hari.¹¹⁶

Dukungan finansial dari komite sekolah SMA Negeri 3 Ponorogo berupa penggalangan dana yang dilakukan secara sukarela. Biasanya, penggalangan ini melibatkan wali murid dan dilakukan dengan prinsip transparansi. Dana yang terkumpul kemudian digunakan untuk membantu kebutuhan sekolah yang belum tercakup dalam anggaran resmi, seperti perbaikan fasilitas, pengadaan alat pembelajaran yang mendukung kegiatan-kegiatan siswa. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sasmito Pribadi, M.Pd selaku ketua komite SMA Negeri 3 Ponorogo:

Bentuk dukungannya salah satunya melalui penggalangan dana secara sukarela dari wali murid. Misalnya, ketika kalau ada ruang kelas yang perlu direnovasi, atau fasilitas sekolah yang butuh

¹¹⁵ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

¹¹⁶ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 03/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

perbaikan tapi belum bisa dibiayai penuh dari dana BOS, komite biasanya langsung bergerak tentu kami pihak sekolah merasa terbantu.¹¹⁷

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Bapak Muhammad Iskak selaku Anggota komite SMA Negeri 3 Ponorogo, bahwa dukungan finansial yang diberikan berupa penggalangan dana yang dilaksanakan atas dasar persetujuan dari orang tua siswa atau wali murid. “jadi, ketika ada kebutuhan atau program sekolah yang tidak sepenuhnya bisa dibiayai dari dana BOS, kami mencoba untuk membantu mengisi kekurangannya. Semuanya tentu dilakukan atas dasar musyawarah bersama, dan orang tua pun kami libatkan supaya tahu tujuan dan manfaat dari setiap dana yang disalurkan.”¹¹⁸

Hal tersebut juga serupa dengan penjelasan Bapak Dul Aziz selaku ketua komite SMA Negeri 3 Ponorogo:

Iya, tentu saja mbak. Kami dari komite akan selalu berupaya memberikan dukungan yang terbaik untuk menunjang mutu pendidikan di sekolah ini. Salah satu bentuk dukungan kami itu ya dalam hal finansial. Kami melakukan penggalangan dana dari wali murid, terutama ketika ada kebutuhan yang tidak bisa langsung dipenuhi oleh dana BOS. untuk renovasi fasilitas atau bantuan siswa kurang mampu.¹¹⁹

Peran komite sekolah tidak hanya terbatas pada dukungan dalam bentuk finansial saja. Lebih dari itu, komite juga berkontribusi secara non-finansial demi mendukung kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Bentuk dukungan non-finansial komite SMA Negeri 3 Ponorogo ini mencakup berbagai hal, mulai dari pemanfaatan jaringan dan relasi yang dimiliki anggota komite, penyediaan tenaga atau keahlian dalam kegiatan tertentu, hingga menjadi motivator bagi siswa dalam kegiatan sekolah. Keterlibatan seperti ini membuktikan bahwa komite sekolah

¹¹⁷ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

¹¹⁸ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 03/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

¹¹⁹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

bukan hanya mitra pasif, melainkan mitra yang hadir secara nyata dan aktif dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sasmito Pribadi, M.Pd selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Ponorogo:

Iya, komite sekolah juga memberikan dukungan dari sisi non-finansial, yang dampaknya tidak kalah penting. Misalnya, bantuan tenaga itu bisa dalam bentuk keterlibatan langsung anggota komite dalam kegiatan sekolah. beberapa anggota komite kan punya latar belakang yang cukup kuat, ada yang tokoh masyarakat, ada juga yang punya relasi dengan instansi pemerintah. Nah, itu dimanfaatkan untuk membuka peluang kerjasama yang bermanfaat buat sekolah.¹²⁰

Hal ini serupa dengan pernyataan Bapak Dul Aziz selaku Ketua Komite SMA Negeri 3 Ponorogo:

Sebagai ketua komite sekolah, saya merasa punya tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan, bukan hanya dalam bentuk dana, tapi juga lewat peran dan jaringan yang saya miliki. Kebetulan saya sendiri dari Polres Ponorogo, jadi saya mencoba memanfaatkan posisi ini untuk menjalin kerjasama antara pihak sekolah dengan instansi kepolisian. Kami menghadirkan anggota Polri untuk terlibat langsung dalam kegiatan ekstrakurikuler, terutama di bidang kedisiplinan, tata tertib lalu lintas, dan pembinaan karakter. Misalnya, dalam kegiatan baris-berbaris, sosialisasi keselamatan berkendara, bahkan sampai pada pelatihan kepemimpinan. Tujuannya agar siswa tidak hanya mendapat ilmu secara akademik, tetapi juga pengalaman pembelajaran dari praktik langsung di lapangan.¹²¹

Hal tersebut serupa dengan hasil pengumpulan data berupa observasi, berdasarkan hasil observasi pelaksanaan kegiatan Diklatsar Patroli Keamanan Sekolah (PKS) yang diselenggarakan di lingkungan SMA Negeri 3 Ponorogo. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama antara

¹²⁰ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

¹²¹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

pihak sekolah dan Komite Sekolah, dengan dukungan langsung dari Ketua Komite yang juga menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Ponorogo.¹²²

3. Sebagai Pengontrol Transparansi dan Akuntabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo

Dalam upaya menciptakan tata kelola sekolah yang baik dan terpercaya, peran komite sekolah sebagai pengontrol transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting. Komite tidak hanya hadir sebagai mitra sekolah dalam merancang program atau memberikan masukan kebijakan, tetapi juga bertindak sebagai pengawas yang memastikan setiap kebijakan dan penggunaan dana dilakukan secara terbuka, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan ketua komite SMA Negeri 3 Ponorogo, dapat diketahui bahwa komite sekolah memiliki peran penting dalam mengontrol transparansi dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan program-program pendidikan di sekolah. Komite tidak hanya berfungsi sebagai pendukung atau pemberi pertimbangan, tetapi juga aktif dalam memastikan bahwa proses perencanaan hingga pelaksanaan program, khususnya yang berkaitan dengan anggaran, dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sasmito Pribadi selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Ponorogo bahwasanya komite sekolah ikut serta dalam kegiatan musyawarah penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Jadi begini, karena menurut kami transparansi dan akuntabilitas itu sangat penting untuk sekolah. Biasanya sebelum RKAS difinalkan, kami mengadakan musyawarah terlebih dahulu yang dihadiri oleh tim manajemen sekolah dan pengurus komite. disitu kami jelaskan rencana program sekolah, estimasi anggaran, hingga kebutuhan-kebutuhan prioritas yang harus dipenuhi. Komite juga bebas menyampaikan masukan atau keberatan kalau ada poin-poin yang mereka rasa perlu dikaji ulang. dari sinilah bentuk keterbukaannya

¹²² Lihat Transkrip Observasi Nomor: 02/O/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

bisa dilihat. Semua kami bahas secara terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi.¹²³

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Dul Aziz selaku ketua komite, bahwasanya:

Iya, Mbak. Kami dari komite memang punya akses terhadap laporan keuangan sekolah, terutama yang berkaitan dengan penggunaan dana BOS atau bantuan lainnya. Jadi setiap kali ada rapat evaluasi atau penyusunan anggaran, kami selalu diundang untuk hadir dan ikut serta memberikan masukan. Biasanya pihak sekolah memaparkan dulu realisasi penggunaan dana, lalu kami dari komite ikut mencermati dan berdiskusi kalau ada hal-hal yang perlu dikaji lebih dalam atau disesuaikan.¹²⁴

Sebagaimana sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti, bahwasanya pihak sekolah melakukan kerjasama dengan komite sekolah dalam hal penggunaan anggaran.¹²⁵ Mekanisme pelaporan ini dilakukan melalui forum rapat yang dijadwalkan secara berkala, seperti setiap akhir semester atau setelah pelaksanaan kegiatan besar yang menggunakan anggaran. Hal ini sangat sesuai dengan penjelasan Bapak Muhammad Iskak selaku anggota komite sekolah:

Begini mbak, untuk model pelaporannya yang saya terima biasanya pihak sekolah itu ngasih laporan ke kami setiap tiga bulan sekali, melaporkan realisasi anggaran secara rinci, misalnya untuk apa saja dana digunakan, besarnya, dan hasil dari kegiatan yang telah dijalankan. Laporan ini biasanya juga disertai dokumen pendukung seperti kuitansi nota pembelian atau juga dokumentasi kegiatan.¹²⁶

Sebagaimana juga ditambahkan oleh Bapak Dul Aziz bahwasanya komite sekolah juga mendapat pelaporan langsung dari pihak sekolah mengenai realisasi anggaran:

Sekolah tetap kami memberitahu kami mbak, dan kami akan mendapat pelaporannya setiap ada kegiatan yang terselenggara atau

¹²³ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

¹²⁴ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

¹²⁵ Lihat Transkrip Observasi Nomor: 09/O/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

¹²⁶ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 03/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

ada perbaikan fasilitas dengan rincian anggaran yang terpakai. Nanti ketika rapat bareng di sekolah, laporan itu dibahas bareng-bareng. Jadi kita tau dana BOS itu dipakai buat apa aja, berapa jumlahnya, dan kegiatannya apa aja yang dibiayai. Kalau ada yang kurang jelas, kita bisa langsung tanya dan diskusi waktu itu juga. Dengan cara ini, kita di komite jadi ikut ngerti kondisi keuangan sekolah dan bisa bantu ngawasin juga. Jadi sekolah nggak kerja sendirian, semua terbuka dan tentu transparan ya.¹²⁷

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa transparansi dan akuntabilitas sangat diterapkan, sehingga antara pihak sekolah dan masyarakat khususnya wali murid benar-benar menjaga kepercayaan satu sama lain. Tentu hal tersebut akan menciptakan kontribusi yang lain. Dengan begitu juga komite sekolah menjadi lebih nampak berinisiatif walaupun tidak harus setiap hari mengunjungi sekolah, namun dengan adanya keterbukaan mengenai anggaran dapat maka peran komite sebagai transparansi dan akuntabilitas sangat didukung penuh oleh pihak sekolah.

4. Sebagai Mediator Agency Peningkatan Mutu Pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo

Dalam menjalankan fungsinya, komite sekolah tidak hanya berperan dalam urusan kebijakan atau keuangan saja, tetapi juga memiliki peran penting sebagai mediator agency. Maksudnya, komite sekolah menjadi jembatan penghubung antara berbagai pihak yang terlibat dalam lingkungan pendidikan mulai dari pihak sekolah, orang tua, masyarakat, sampai lembaga-lembaga eksternal. Dengan posisinya yang strategis, komite sekolah SMA Negeri 3 Ponorogo membantu memperlancar komunikasi dan kerja sama antar pihak, agar program-program sekolah dapat berjalan dengan baik dan didukung secara luas. Peran ini menjadi sangat penting terutama ketika ada kebijakan baru, aspirasi dari orang tua murid, atau kerja sama dengan pihak luar. Komite sekolah hadir untuk menjembatani agar semuanya berjalan selaras dan tujuan pendidikan bisa

¹²⁷ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/W/25-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

tercapai dengan lebih maksimal. Serupa dengan penyampaian Bapak Sasmito Pribadi, M.Pd:

Iya, menurut saya peran komite sekolah dalam hal ini sangat terasa, Mbak. Komite benar-benar jadi penghubung yang efektif antara kami pihak sekolah dengan wali murid. Kadang kan nggak semua orang tua bisa langsung menyampaikan pendapat atau unek-uneknya ke sekolah, entah karena waktu yang terbatas atau mungkin merasa sungkan. Nah, biasanya mereka lebih nyaman menyampaikan lewat perwakilan komite. Dari pihak sekolah sendiri, kami juga sangat terbantu. Kalau ada program baru, kebijakan, atau rencana kegiatan, komite itu ikut membantu menyosialisasikan ke orang tua. Mereka bantu ngejelasin dengan bahasa yang lebih sederhana dan dekat, jadi pesan yang kami sampaikan bisa lebih diterima dan dipahami. Kalau pun ada miskomunikasi atau perbedaan pendapat, komite juga bantu meredam dan menyampaikan kembali ke kami secara lebih bijak.¹²⁸

Sesuai dengan penjelasan Bapak Dul Aziz selaku komite sekolah, bahwasanya: “Komite mampu menjaga hubungan baik antara pihak sekolah dan masyarakat, sehingga tetap terjalin silaturahmi yang baik. Komite juga menjadi tempat keluh kesah bagi orang tua siswa jika ada beberapa kegiatan atau program sekolah yang dirasa kurang efektif oleh mereka dan kami akan sampaikan hal tersebut.”¹²⁹

Dalam hal memberikan kontribusi kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak luar komite sekolah SMA Negeri 3 Ponorogo kurang memfasilitasi hal tersebut, akan tetapi ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler sekolah yang difasilitasi langsung melalui kontribusi komite Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak Sasmito Pribadi, M.Pd:

Iya, betul sekali, Mbak. Komite sekolah juga punya peran penting dalam menjalin kemitraan dengan pihak luar, terutama yang bisa mendukung kegiatan pendidikan di sekolah. tidak hanya menjadi jembatan antara sekolah dan orang tua atau wali murid, tapi juga berupaya memperluas jaringan kerjasama ke instansi-instansi yang

¹²⁸ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

¹²⁹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

relevan. Akan tetapi hal ini sudah diupayakan oleh sekolah sendiri.¹³⁰

Sesuai dengan penjelasan Bapak Dul Aziz selaku ketua komite SMA Negeri 3 Ponorogo, bahwasanya:

Untuk hubungan kerjasama dengan pihak atau lembaga luar, komite mungkin kurang memfasilitasi ya mbak, karena sekolah tentunya sudah mengupayakan hal tersebut. Tetapi kami selaku komite memberikan akses kerjasama dengan instansi pemerintah seperti kepolisian untuk mengisi beberapa kegiatan untuk membangun karakter disiplin siswa.¹³¹

Adapun kerjasama yang difasilitasi komite sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan yaitu menjalin kerjasama dengan instansi kepolisian mengenai kegiatan ekstrakurikuler pembentukan karakter disiplin siswa. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sasmito Pribadi:

Salah satu bentuknya, komite pernah menjalin komunikasi dan kerjasama dengan polres ponorogo untuk bisa menunjang keterampilan siswa diluar pelajaran akademik. Yaitu pelaksanaan ekstrakurikuler diklatsar yang dikomandoi langsung oleh anggota kepolisian dengan tujuan membentuk karakter disiplin bagi siswa.¹³²

Sebagaimana juga disampaikan oleh Bapak Dul Aziz selaku komite sekolah SMA Negeri 3 Ponorogo, komite dengan latar belakang dan jejaring yang dimiliki oleh para anggotanya, memiliki potensi besar untuk memfasilitasi kolaborasi tersebut:

Iya, betul sekali. Komite sekolah juga sangat membantu menjembatani kerjasama kami dengan pihak luar, Mbak. Jadi nggak cuma soal urusan internal sekolah saja, tapi mereka juga aktif membuka relasi ke luar yang bisa mendukung peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Contohnya, ketua komite kami yang kebetulan adalah seorang anggota Polri beliau pernah memfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler Diklatsar PKS (Patroli Keamanan Sekolah), di mana pembinanya langsung dari anggota kepolisian.

¹³⁰ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

¹³¹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

¹³² Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

Nah, selain itu, beliau juga pernah menginisiasi kegiatan penyuluhan tentang bahaya narkoba yang pesertanya adalah seluruh siswa. Kegiatan itu sangat bermanfaat banget untuk menambah wawasan dan kesadaran anak-anak akan pentingnya menjauhi narkoba. Jadi, peran komite ini benar-benar terasa, bukan cuma sebagai pendamping, tapi juga sebagai jembatan yang membuka peluang kerja sama yang positif untuk sekolah.¹³³

Selanjutnya hasil dari kontribusi komite dengan dunia luar yaitu menambah wawasan dan kesadaran siswa atau peserta didik bahwa pentingnya menanamkan karakter disiplin dalam diri dan juga pentingnya hidup sehat tanpa narkoba. Tentu hal ini selaras dengan visi peningkatan mutu pendidikan. Dengan adanya kontribusi ini, sekolah dapat lebih optimal dalam mengembangkan potensi seluruh warga sekolah. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak Sasmito Pribadi selaku kepala sekolah, bahwasanya:

Sangat membantu, Mbak, apalagi dalam hal-hal yang kadang nggak bisa kita penuhi dari program sekolah sendiri. Lewat kerjasama yang difasilitasi komite, siswa jadi punya lebih banyak kesempatan buat ngembangin soft skill kayak kemampuan komunikasi, kepemimpinan, kerjasama tim, dan lainnya. Itu penting banget buat bekal mereka nanti di luar sekolah. Jadi, dari kemitraan ini, manfaatnya bisa dirasain langsung, baik oleh siswa maupun guru. Ini semua berkat peran aktif komite sekolah yang terus menjalin hubungan baik dengan pihak luar.¹³⁴

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, terlihat bahwa kegiatan ekstrakurikuler diklatsar berjalan dengan baik, dan siswa dengan semangat mengikuti kegiatan tersebut, tentu hal tersebut menumbuhkan karakter disiplin pada diri peserta didik.¹³⁵

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa peran komite sekolah sebagai mediator agency memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Komite sekolah tidak hanya

¹³³ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

¹³⁴ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

¹³⁵ Lihat Transkrip Observasi Nomor: 02/O/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

berfungsi sebagai penghubung antara pihak sekolah dan orang tua peserta didik, tetapi juga berperan aktif dalam menjalin kerja sama dengan berbagai pihak eksternal, seperti instansi pemerintah, Kemitraan ini memberikan manfaat nyata, khususnya dalam mendukung pengembangan *soft skill* peserta didik, serta penyediaan berbagai peluang yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya kolaborasi tersebut, sekolah dapat lebih optimal dalam menjalankan program-program pendidikan secara berkelanjutan dan terarah.

C. Analisis Data

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/Tahun 2002 tentang pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah, terdapat empat peran utama yang dapat dijalankan oleh komite sekolah, yaitu:¹³⁶

1. Sebagai Pemberi Pertimbangan atau Masukan (*Advisory Agency*)

Dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan indikator kinerjanya dengan memberikan masukan dan pertimbangan mengenai:¹³⁷

- a. Kebijakan pendidikan
- b. Program pendidikan
- c. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
- d. Kriteria fasilitas pendidikan

Komite sekolah berperan sebagai pemberi saran atau pertimbangan dalam membuat dan melaksanakan kebijakan pendidikan di tingkat sekolah. Komite SMA Negeri 3 Ponorogo ikut serta dalam memberikan masukan terhadap kebijakan strategis sekolah terutama Rencana Kerja Sekolah (RKS) serta ikut aktif dalam penyusunan RKS¹³⁸, RKAS dan rencana program peningkatan mutu pembelajaran. Selain itu komite SMA

¹³⁶ Suhadi Winoto, Komite Sekolah atau Madrasah dan Manajemen Mutu Pendidikan, (Yogyakarta: CV Bildung Nusantara, 2021), 17.

¹³⁷ Hasbullah, Otonomi Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Press, 2007), 90.

¹³⁸ Syaiful Sagala, Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, (Bandung: Cv: Pustaka Setia), 251.

Negeri 3 Ponorogo ikut serta dalam merancang kebijakan yang berdampak pada mutu lulusan, proses pembelajaran, serta kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Komite SMA Negeri 3 Ponorogo juga ikut menilai dan menyarankan program-program peningkatan mutu seperti pelatihan guru, pengadaan sarana prasarana pendidikan, maupun kegiatan kesiswaan yang mendukung pengembangan karakter dan kompetensi siswa.

2. Sebagai Pendukung (*Supporting Agency*)

Komite sekolah berperan sebagai baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, indikator kinerjanya yaitu:¹³⁹

- a. Memantau kondisi sarana dan prasarana.
- b. Menggalang dana dalam rangka pembiayaan pendidikan
- c. Mendorong tumbuhnya perhatian masyarakat terhadap penyelenggara pendidikan yang bermutu.
- d. Mengevaluasi pelaksanaan dukungan anggaran di sekolah

Komite sekolah berperan sebagai pemberi dukungan dalam bentuk dana, ide/gagasan,¹⁴⁰ maupun tenaga untuk membantu penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Komite sekolah SMA Negeri 3 Ponorogo mendukung pendanaan pendidikan dan ikut serta dalam menggalang dana partisipasi dari orang tua siswa untuk mendukung program-program sekolah yang belum sepenuhnya dibiayai oleh dana BOS. Selain itu komite SMA Negeri 3 Ponorogo berpartisipasi dalam memberi pertimbangan dalam penggunaan dana agar tepat guna dan transparan terutama untuk kebutuhan seperti pengadaan alat bantu belajar, pembangunan dan renovasi sarana dan prasarana seperti gedung kelas *SICP* pada tahun 2023, dan pendanaan kegiatan ekstrakurikuler.

Komite juga berperan sebagai pendukung non finansial dalam bentuk memberikan ide dan gagasan inovatif terkait program pengembangan karakter siswa, serta memfasilitasi jaringan dan kerjasama

¹³⁹ Hasbullah, Otonomi Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Press, 2007), 94.

¹⁴⁰ Syaiful Sagala, Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, (Bandung: Cv: Pustaka Setia), 251.

dengan berbagai pihak seperti instansi pemerintah salah satunya polri. Ketua komite SMA Negeri 3 Ponorogo merupakan salah satu anggota polri sehingga hal ini memudahkan dalam memfasilitasi kerja sama berupa kegiatan Diklatsar yang bertujuan untuk membentuk karakter kedisiplinan siswa. Komite sekolah menjalin hubungan baik serta membangun membangun komunikasi dengan masyarakat bertujuan untuk membangun citra positif SMA Negeri 3 Ponorogo di hadapan masyarakat.

3. Sebagai Pengawas (*Controlling Agency*)

Komite sekolah ikut berperan aktif dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan pada satuan pendidikan, indikator kerjanya yaitu:¹⁴¹

- a. Mengawasi proses pengambilan keputusan di sekolah.
- b. Kontrol terhadap perencanaan sekolah.
- c. Mengontrol proses pelaksanaan program sekolah.

Dalam hal ini komite sekolah berperan penting serta ikut serta mengawasi agar pelaksanaan pendidikan berjalan secara transparan dan akuntabel, serta memastikan hasil pendidikan sesuai harapan. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan komite sekolah sebagai representasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan control terhadap kebijakan, pelaksanaan program, dan pengelolaan dana pendidikan di sekolah.

Berdasarkan hasil temuan di SMA Negeri 3 Ponorogo *pertama* komite sekolah ikut serta dalam pengontrolan transparansi pengelolaan dana yang berkaitan dengan pengawasan dana BOS dan sumbangan masyarakat. Dalam hal ini, *Pertama* komite terlibat dalam menyetujui dan memantau penggunaan dana BOS serta sumbangan partisipasi dari orang tua siswa melalui kegiatan rapat pembahasan RKAS dan peninjauan laporan penggunaan dana setiap semester. *Kedua* komite sekolah terlibat dalam keterbukaan informasi yaitu dengan memastikan informasi keuangan dapat diakses melalui rapat tahunan wali murid, *ketiga* komite

¹⁴¹ Hasbullah, Otonomi Pendidikan, 94

ikut memantau pelaksanaan program seperti kegiatan pembelajaran tambahan seperti bimbingan UTBK, kegiatan ekstrakurikuler dan pelaksanaan kurikulum merdeka dan asesmen nasional.

d. Sebagai Penghubung (*Mediator*)

Komite sekolah berperan sebagai mediator dengan masyarakat di satuan pendidikan, indikator kinerjanya yaitu:¹⁴²

- 1) Melakukan kerjasama dengan masyarakat.
- 2) Menampung aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- 3) Menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

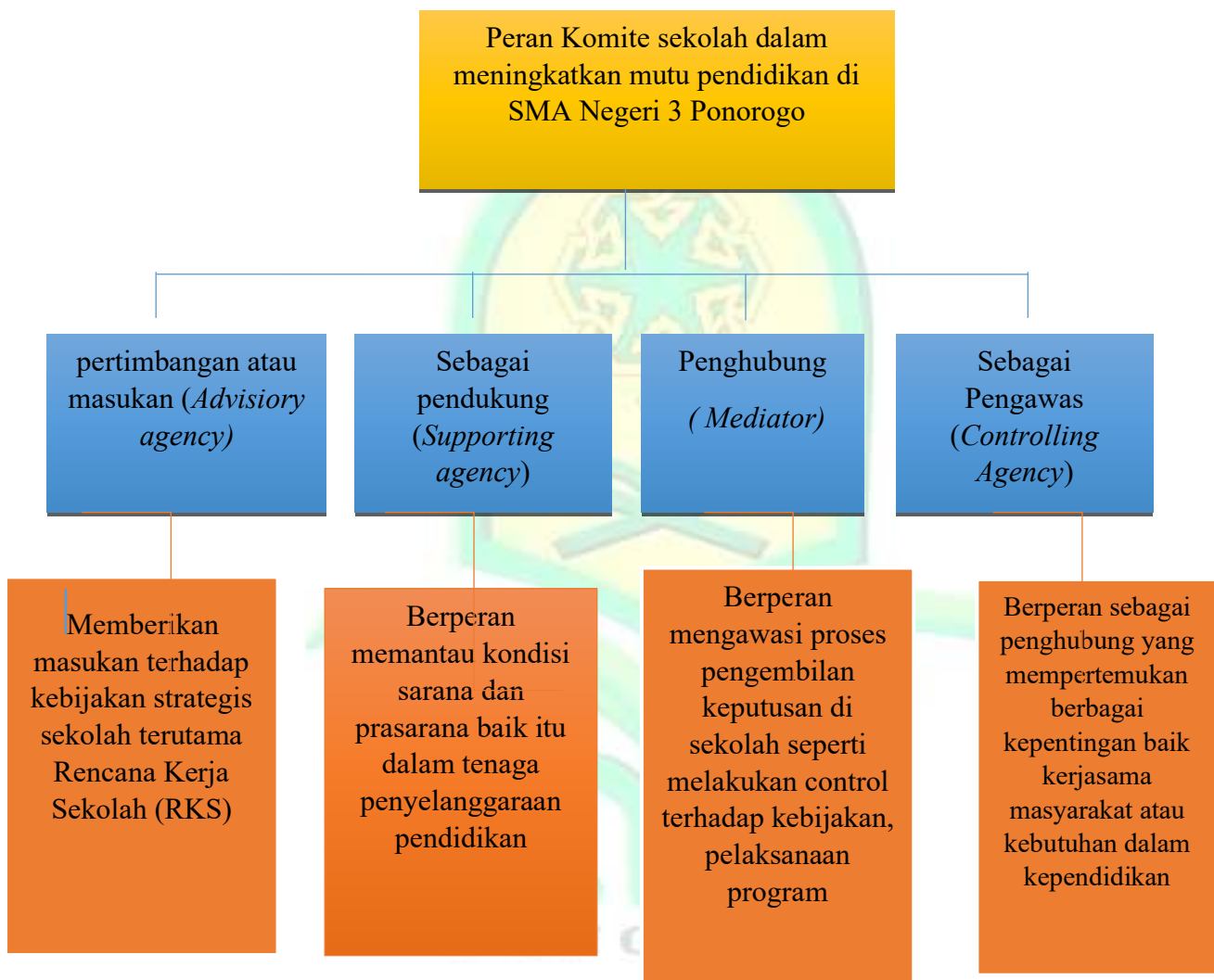
Komite sekolah menjembatani komunikasi dan kerjasama antara pihak sekolah, pemerintah, dan masyarakat di lingkungan pendidikan. Peran mediator memiliki makna sebagai fungsi mediasi atau perantara yang dilakukan komite sekolah antara pihak sekolah dengan stakeholder eksternal yakni orang tua wali murid, masyarakat, dunia usaha, instansi pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan. Komite sekolah berperan sebagai penghubung yang mempertemukan berbagai kepentingan untuk mendukung mutu pendidikan yang lebih baik.

Berdasarkan hasil temuan data di SMA Negeri 3 Ponorogo komite sekolah menampung aspirasi, masukan, dan kritik dari orang tua siswa terkait kualitas pembelajaran, biaya pendidikan dan penggunaan dana serta kedisiplinan dan kebijakan sekolah kemudian komite sekolah menyampaikan masukan tersebut dalam kegiatan rapat bersama pihak sekolah. Selain itu komite sekolah sebagai mediasi antara sekolah dan pemerintah hal ini berupa jalinan kerjasama dengan polri melalui kegiatan diklatsar. Selain itu juga komite sekolah aktif dalam menjembatani komunikasi antara sekolah dengan dinas pendidikan. Komite sekolah ikut serta membantu menyusun proposal bantuan pendidikan ke Dinas

¹⁴² Syaiful Sagala, Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, (Bandung: Cv Pustaka Setia), 251.

Pendidikan berupa pembangunan gedung kelas yang diresmikan pada tahun 2023.

Secara analisis data peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo dapat dilihat melalui gambar 4.3 dibawah ini:



Gambar 4.3 Peta Konsep Analisis Peran Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu Pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo

D. Sinkronisasi dan Transpormasi

Peran komite SMA Negeri 3 Ponorogo berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/Tahun 2002 sudah sesuai dengan indikator peran komite berserta implementasi nyata.

1. Peran Komite Sekolah sebagai Pemberi Pertimbangan

Komite SMA Negeri 3 Ponorogo berperan aktif dalam proses penyusunan dokumen perencanaan seperti RKS dan RKAS. Dalam hal ini menunjukkan bahwa komite ikut serta dalam memberikan masukan terhadap berbagai kebijakan yang berdampak pada mutu lulusan. Kemudian komite SMA Negeri 3 Ponorogo juga aktif dalam pelaksanaan program pendidikan serta memberikan kontribusi berupa ide dan mengevaluasi program yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Komite SMA Negeri 3 Ponorogo aktif dalam program pengembangan karakter siswa. Hal ini menunjukkan bahwa komite tidak hanya berperan sebagai pemberi kebijakan namun juga sebagai pengarah dalam penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan. Selain itu komite SMA Negeri 3 Ponorogo terlibat secara langsung dalam pembahasan dan persetujuan RAPBS serta memastikan bahwa perencanaan anggaran perlu dilakukan secara terbuka. Yang terakhir yaitu komite SMA Negeri 3 Ponorogo ikut serta memberikan pertimbangan dalam proses pengadaan dan peningkatan fasilitas pendidikan hal ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran nyaman serta berdampak pada peningkatan mutu dan mencapai tujuan pendidikan.

2. Peran Komite Sekolah sebagai Pendukung Finansial dan Non Finansial

Komite SMA Negeri 3 Ponorogo ikut serta memantau saran dan prasarana seperti dalam pemantauan pembangunan gedung SICP. Hal ini menunjukkan keterlibatan komite dalam memastikan kualitas sarana dan prasarana. Komite SMA Negeri 3 Ponorogo aktif dalam menjalin kerja sama baik eksternal maupun membangun cira positif untuk memperluas jaringan

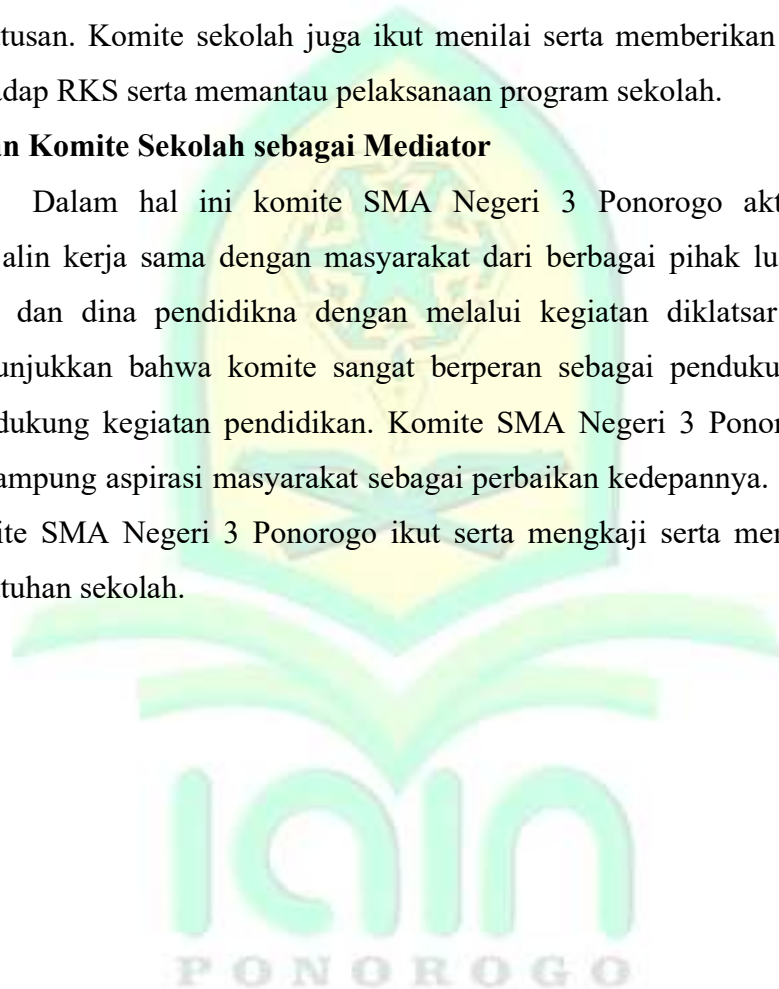
dengan masyarakat. Selain aktif menjalin kerja sama komite SMA Negeri 3 Ponorogo juga ikut serta memberikan pertimbangan dalam penggunaan dana sekolah agar sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran.

2. Peran Komite Sekolah sebagai Pengawas

Peran komite SMA Negeri 3 Ponorogo dalam mengambil keputusan yaitu sebagai pengontrol yang menjaga agar keputusan sekolah tetap seimbang sesuai aturan serta ikut serta memberikan persetujuan atas keputusan. Komite sekolah juga ikut menilai serta memberikan masukan terhadap RKS serta memantau pelaksanaan program sekolah.

3. Peran Komite Sekolah sebagai Mediator

Dalam hal ini komite SMA Negeri 3 Ponorogo aktif dalam menjalin kerja sama dengan masyarakat dari berbagai pihak luar seperti polri dan dinas pendidikan dengan melalui kegiatan diklatsar. Hal ini menunjukkan bahwa komite sangat berperan sebagai pendukung untuk mendukung kegiatan pendidikan. Komite SMA Negeri 3 Ponorogo juga menampung aspirasi masyarakat sebagai perbaikan kedepannya. Selain itu komite SMA Negeri 3 Ponorogo ikut serta mengkaji serta menganalisis kebutuhan sekolah.



BAB V

TANTANGAN KOMITE DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PROGRAM UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SMA NEGERI 3 PONOROGO

Bab ini merupakan jawaban atas rumusan masalah yang kedua, yaitu bagaimana tantangan utama yang dihadapi komite dalam mengimplementasikan program-program yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo. Uraian pada bab ini disusun secara sistematis yang dimulai dari pembahasan tentang faktor penghambat komite dalam mengimplementasikan program. Hasil tinjauan peneliti di lapangan terkait tantangan utama komite di tutup dengan analisis mendalam terkait peningkatan mutu pendidikan di SMAN 3 Ponorogo.

A. Paparan Data

1. Tantangan Komite Sekolah Sebagai Pemberi Pertimbangan dalam Penentuan dan Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan

Dalam pelaksanaan tugasnya, komite sekolah di SMA Negeri 3 Ponorogo tidak hanya berperan sebagai pelengkap administrasi, tetapi menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Salah satu peran utamanya adalah memberikan pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan di sekolah. Dalam pelaksanaan program terdapat tantangan utama yang menghambat berjalannya program sekolah, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kepala SMA Negeri 3 Ponorogo:

Kalau dari pandangan kami sebagai pihak sekolah, memang harus kami akui bahwa salah satu tantangan yang sering muncul adalah kurangnya pemahaman tentang tugas dan fungsi komite. Selain itu tantangan yang lain juga mengenai keterbatasan dari beberapa anggota komite dalam memahami secara teknis tentang kebijakan pendidikan, hal tersebut dilatarbelakangi oleh latar belakang anggota komite yang berbeda-beda. Tidak semua anggota berasal dari dunia pendidikan, sehingga kadang saat memberikan usulan, kurang tepat. misalnya, ada usulan program yang sebenarnya bagus, tetapi tidak sejalan dengan kebijakan kurikulum nasional,

atau ada masukan terkait penganggaran yang tidak sesuai dengan juknis penggunaan dana BOS. Tapi kami memahami bahwa semua itu berangkat dari niat baik mereka untuk memajukan sekolah. Maka dari itu, biasanya kami tindaklanjuti dengan memberikan penjelasan tambahan, diskusi lebih dalam di forum rapat, supaya semua pihak bisa memahami arah kebijakan sekolah dengan lebih baik.¹⁴³

Selain itu faktor penghambat lainnya juga berupa keterbatasan waktu komite sekolah, banyak anggota komite sekolah yang merupakan tokoh masyarakat atau wali murid dengan kesibukan profesi masing-masing, sehingga keterlibatan komite sekolah menjadi kurang maksimal. Sesuai dengan penjelasan Ketua Komite sekolah juga menjelaskan bahwa:

Tantangannya mengenai waktu mbak, karena anggota komite tentu memiliki profesi masing-masing diluar perannya sebagai komite, jadi kesibukan ini terkadang membuat kami komite sulit untuk hadir dalam rapat-rapat penting atau aktif terlibat dalam perumusan kebijakan secara rutin. Akibatnya, keterlibatan mereka tidak maksimal, sehingga masukan dan pertimbangannya menjadi terbatas. Selain itu minimnya informasi yang diberikan sekolah terhadap komite juga menjadi tantangan bagi komite, sehingga akses informasi yang diberikan kurang terbuka.”¹⁴⁴

Selaras dengan hal tersebut Bapak Muhammad Iskak selaku anggota komite SMA Negeri 3 Ponorogo menyampaikan, bahwa:

Menurut saya pribadi, tantangan utama komite sebagai pemberi pertimbangan adalah kurangnya waktu yang terjalin sehingga banyak terjadi kesenjangan antara pihak sekolah dan juga komite. Kemudian penghambat lainnya yaitu ketidakpahaman kami sebagai komite dengan tugas dan fungsi kami. Karena mungkin beberapa dari anggota bukan berasal dari dunia pendidikan, sehingga kurang mengerti mengenai fungsi dan tugas komite. Namun secara garis besar tentu setiap anggota komite tau bahwa tujuan dari dibentuknya komite sebagai wadah yang menjadi penengah antara pihak sekolah, wali murid, serta masyarakat sekitar.¹⁴⁵

¹⁴³ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

¹⁴⁴ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

¹⁴⁵ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 03/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

Setiap tantangan tentunya memiliki upaya untuk menghadapi tantangan yang terjadi, pada penentuan dan pelaksanaan kebijakan program peningkatan mutu pendidikan. SMA Negeri 3 Ponorogo juga melakukan upaya dalam menghadapi tantangan mengenai keterbatasan komite sekolah dalam meluangkan waktu, yaitu SMA Negeri 3 Ponorogo mengupayakan adanya rapat terstruktur dengan tujuan agar komunikasi antara pihak sekolah dan juga komite berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah, beliau menyampaikan: “untuk mengatasi tantangan minimnya pemahaman terhadap fungsi dan tugas komite, upaya yang dapat kami lakukan yaitu melakukan sosialisasi rutin mengenai peran dan tanggung jawab komite, dan juga menjadwalkan pertemuan rapat secara fleksibel agar anggota komite tetap dapat berkontribusi meskipun memiliki keterbatasan waktu.”¹⁴⁶

Ketua komite SMA Negeri 3 Ponorogo juga menyampaikan bahwasanya:

Upaya yang dapat dilaksanakan untuk menghadapi tantangan dalam keterbatasan waktu yaitu pihak sekolah menjadwalkan rapat yang fleksibel yang artinya tidak harus di hari kerja. SMA Negeri 3 Ponorogo membuat jadwal rapat dengan ketersediaan waktu mayoritas anggota komite. atau seperti rapat juga bisa dilaksanakan melalui *zoom meeting* jika memang tidak memungkinkan komite untuk hadir dalam rapat tersebut.¹⁴⁷

Selaras dengan yang disampaikan Bapak Muhammad Iskak, bahwa: “upayanya tentu lebih kepada pelaksanaan rapat yang tidak harus seluruh anggota datang sekolah, jika memang bisa diwakilkan dengan satu anggota maka itu sudah cukup. Kemudian mengenai tantangan dari keterbatasan informasi yaitu dengan upaya pihak sekolah membuka akses informasi yang lebih terbuka.”¹⁴⁸

¹⁴⁶ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

¹⁴⁷ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

¹⁴⁸ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 03/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

2. Tantangan Komite Sekolah Sebagai Pendukung Finansial dan Non Finansial

Tantangan komite sekolah dalam melaksanakan program komite sebagai pendukung finansial dan non finansial. Adapun faktor penghambat komite SMA Negeri 3 Ponorogo yaitu terletak pada kondisi ekonomi orang tua yang beragam yang menjadi penghambat dalam penggalangan dana pendidikan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak Sasmito Pribadi selaku kepala SMA Negeri 3 Ponorogo:

Dalam pelaksanaan program penggalangan dana yang dilakukan bersama komite sekolah, tantangan utama yang kami hadapi mengenai kondisi ekonomi wali murid yang sangat beragam. Karena tidak semua wali murid disini tergolong kategori menengah keatas, jadi ada wali murid yang memang mampu dan dengan sukarela memberikan dukungan finansial yang cukup besar, tapi ada juga yang kondisinya pas-pasan sehingga partisipasi yang diberikan jumlahnya tidak sama. Dan tentu sekolah sangat memahami situasi ini. Sedangkan dalam tantangan non finansial, tantangan utama yaitu mengenai keterbatasan jaringan kerjasama dengan pihak luar.¹⁴⁹

Selaras dengan penjelasan diatas, Bapak Ketua Komite juga menyampaikan bahwasanya:

Tantangan utamanya mengenai minimnya dukungan wali murid dalam program atau kegiatan sekolah, karena tentu baik kami maupun pihak sekolah paham bahwa tidak semua wali murid berasal dari ekonomi menengah keatas. Kemudian minimnya kapasitas dan wawasan yang dimiliki oleh komite karena tidak semua komite berasal dari dunia pendidikan, seperti saya yang berada dibawah naungan instansi pemerintah non pendidikan.¹⁵⁰

Selain itu tantangan dalam kegiatan non finansial yaitu terletak pada minimnya relasi yang dimiliki komite SMA Negeri 3 Ponorogo. Hal ini disampaikan oleh Bapak Muhammad Iskak selaku anggota komite: “Dalam pelaksanaan program kerjasama dengan pihak luar, faktor utama yang menghambat kegiatan tersebut yaitu kurangnya jaringan yang

¹⁴⁹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

¹⁵⁰ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

dimiliki komite, sehingga relasi yang kami berikan tidak meluas dan tentu kurang.”¹⁵¹

Adapun upaya yang dilakukan dalam menghadapi tantangan diatas pihak sekolah dan juga komite melakukan pengembangan program dana alternatif dan juga melakukan kemitraan dengan pihak eksternal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sasmito Pribadi:

Untuk menghadapi tantangan finansial, upaya yang dilakukan adalah komite bersama pihak sekolah melakukan pendekatan yang lebih inklusif dan proporsional dalam penggalangan dukungan, dengan mempertimbangkan kemampuan masing-masing pihak. Sedangkan upaya dalam menghadapi tantangan non finansial yaitu Kemitraan dengan Pihak Eksternal. Komite SMA Negeri 3 Ponorogo membangun kerjasama dengan instansi luar yaitu Cambridge University untuk mendukung program non-finansial sekolah yaitu peningkatan mutu pendidikan dan menjalin kerjasama dengan polri melalui kegiatan diklatsar untuk meningkatkan kedisiplinan siswa.¹⁵²

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Dul Aziz selaku ketua komite SMA Negeri 3 Ponorogo:

Upaya yang jelas terlaksana yaitu membangun kemitraan dengan pihak eksternal. Komite SMA Negeri 3 Ponorogo membangun kerjasama dengan instansi luar hal ini dilaksanakan untuk mendukung program non-finansial sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan, salah satunya yaitu menjalin kerjasama dengan polri melalui kegiatan diklatsar untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Hal ini diperkuat lagi dengan tambahan dari Bapak Muhammad Iskak, bahwasanya: “Usaha yang pertama dilakukan yaitu melakukan kemitraan dengan pihak luar. Ada beberapa kegiatan yang dijembatani oleh komite SMA Negeri 3 Ponorogo dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan.”¹⁵³

¹⁵¹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 03/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

¹⁵² Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

¹⁵³ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil Dokumentasi yang didapatkan, peneliti memperoleh dokumen kerjasama antara SMA Negeri 3 Ponorogo dan Cambridge University.¹⁵⁴

3. Tantangan Komite Sekolah sebagai Pengontrol Transparansi dan Akuntabilitas

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, Faktor penghambat dalam pengimplementasian program komite SMA Negeri 3 Ponorogo sebagai pengontrol transparansi dan akuntabilitas terletak pada kurangnya pemahaman komite terhadap mekanisme pelaporan keuangan yang diberikan sekolah. Bapak Sasmito Pribadi menjelaskan bahwa:

Kurangnya pemahaman tentang mekanisme pelaporan keuangan terkadang menjadi salah satu kendala yang membuat fungsi kontrol dari komite sekolah kurang optimal. Beberapa anggota komite mungkin belum sepenuhnya memahami prosedur administrasi keuangan sekolah, seperti format laporan penggunaan Dana BOS, alur pertanggungjawaban anggaran, ataupun batasan regulasi terkait pengelolaan keuangan pendidikan.¹⁵⁵

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Dul Aziz selaku ketua komite sekolah: “kalau tantangan dari komite tentu masih kesulitan dalam memahami laporan keuangan yang dijelaskan oleh bendahara sekolah atau pihak sekolah. Pemahaman kami yang kurang justru akan berdampak pada komunikasi yang kurang efektif dan tidak adanya *feedback* masukan komite.”¹⁵⁶

Diperkuat lagi oleh penjelasan Bapak Muhammad Iskak, Bahwasanya tantangan yang kerap dihadapi mengenai kurangnya pemahaman komite mengenai format laporan keuangan dan akses informasi yang terbatas: “kurangnya anggota komite mungkin belum sepenuhnya memahami prosedur administrasi keuangan sekolah, seperti format laporan penggunaan Dana BOS dan alur pertanggungjawaban

¹⁵⁴ Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 06/D/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

¹⁵⁵ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

¹⁵⁶ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

anggaran. Kemudian juga mengenai informasi laporan keuangan yang masih terbatas dan tidak transparan.”¹⁵⁷

Upaya yang dilakukan sekolah dalam menghadapi tantangan diatas adalah dengan membuat laporan keuangan lebih mudah dipahami semua pihak, pihak sekolah bisa membuat sistem pelaporan yang lebih sederhana, jelas, dan transparan. Selain itu upaya lain yang dapat dilakukan adalah mengadakan forum untuk membahas anggaran.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Sasmito, sebagai berikut: Menerapkan mekanisme evaluasi bersama secara berkala, yang dilaksanakan setiap akhir semester atau akhir tahun ajaran. Melalui forum ini, komite dan pihak sekolah duduk bersama untuk membahas secara terbuka penggunaan anggaran, pelaksanaan program, serta kebijakan yang telah dijalankan. Evaluasi ini tidak hanya menjadi sarana untuk memperkuat transparansi, tetapi juga meningkatkan pemahaman anggota komite terhadap sistem pelaporan keuangan serta mendorong terwujudnya akuntabilitas yang lebih baik di lingkungan sekolah.¹⁵⁸

Sebagaimana serupa dengan yang disampaikan Bapak Dul Aziz, bahwasanya:

Kami berharap laporan keuangan disajikan dengan format yang lebih ringkas, pakai bahasa yang lebih umum, dan penjelasan yang jelas tentang sumber pemasukan serta penggunaannya. Selain itu, kami juga sangat mendukung kalau sekolah mengadakan forum musyawarah atau pertemuan khusus untuk membahas laporan keuangan secara berkala. Dengan begitu kami di komite bisa ikut memahami lebih dalam, memberi saran yang lebih tepat, dan sama-sama menjaga agar pengelolaan keuangan sekolah berjalan transparan dan akuntabel. Kalau komunikasinya lancar seperti itu, kami sebagai komite juga merasa lebih percaya diri menjalankan tugas pengawasan kami.¹⁵⁹

Bapak Muhammad Iskak selaku anggota komite SMA Negeri Ponorogo juga menyampaikan hal serupa: “supaya laporan keuangan lebih mudah dipahami semua pihak, pihak sekolah mengupayakan untuk

¹⁵⁷ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 03/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

¹⁵⁸ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

¹⁵⁹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

membuat sistem pelaporan yang lebih sederhana, jelas, dan transparan. Dengan tujuan lebih memudahkan komite dalam memahami pelaporan keuangan. Juga mengupayakan pelaporan yang lebih terbuka dan transparan untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada komite, masyarakat, serta wali murid.”¹⁶⁰

4. Tantangan Komite Sekolah Sebagai *Mediator Agency*

Sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa salah satu faktor penghambat yang menjadi tantangan dalam implementasi program komite sebagai mediator agency terletak pada keterbatasan waktu komite, dan komunikasi yang tidak terstruktur sehingga menghambat pelaksanaan program. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sasmito: “faktor penghambatnya mungkin akan saya ulang berkali-kali mengenai keterbatasan waktu komite, karena kami menyadari bahwa komite juga memiliki kesibukan dengan profesi mereka masing-masing diluar tugas dan perannya sebagai seorang komite di sekolah.”¹⁶¹

Hal serupa juga ditegaskan oleh Bapak Dul Aziz selaku ketua komite sekolah SMA Negeri 3 Ponorogo, bahwasanya: “Tantangan dalam pelaksanaan lebih ke keterbatasan waktu yang saya miliki, mungkin juga komite lain merasakan hal yang sama. Kami tidak bisa selalu hadir ke sekolah untuk memantau secara langsung perkembangan kegiatan siswa yang di jembatani oleh komite sekolah.”¹⁶²

Kemudian mengenai upaya yang dilakukan pihak sekolah bersama komite SMA Negeri 3 Ponorogo, untuk mengatasi keterbatasan relasi, komite sekolah perlu aktif memperluas jaringan melalui berbagai cara. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah membangun komunikasi lebih erat dan terstruktur. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sasmito Pribadi:

¹⁶⁰ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 03/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

¹⁶¹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

¹⁶² Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

Dalam menghadapi tantangan berupa kurangnya komunikasi yang efektif serta belum terstrukturanya mekanisme penyampaian aspirasi dari orang tua atau masyarakat sekitar. Untuk mengatasi hal tersebut, SMA Negeri 3 Ponorogo bersama komite sekolah membentuk sebuah forum komunikasi resmi, seperti Forum Wali Murid, yang menjadi wadah interaktif untuk menyampaikan masukan, saran, maupun keluhan secara terbuka. Pertemuan rutin dijadwalkan minimal enam bulan sekali, melibatkan komite, perwakilan orang tua siswa, dan pihak sekolah.¹⁶³

Sebagaimana juga selaras dengan yang disampaikan ketua komite, bahwasanya:

Untuk mengatasi keterbatasan komunikasi yang terjadi antara komite dan pihak sekolah, yaitu melaksanakan rapat pleno sebuah forum wali murid, yang menjadi wadah interaktif untuk menyampaikan masukan, saran, maupun keluhan secara terbuka. Pertemuan rutin dijadwalkan minimal enam bulan atau setahun sekali yang melibatkan komite, perwakilan orang tua siswa, dan pihak sekolah.¹⁶⁴

B. Analisis Data

Dalam pelaksanaan menjalankan perannya, komite SMA Negeri 3 Ponorogo menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai tugas dan fungsi komite serta keterbatasan waktu dan sumber daya yang dimiliki oleh anggota. Tantangan utama dalam pelaksanaan peran komite di SMA Negeri 3 Ponorogo mencakup:

1. Tantangan Peran Komite sebagai Pemberi Pertimbangan

Komite sekolah berperan sebagai lembaga pendidikan yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan pendidikan memegang peran penting dalam pengembangan kualitas pendidikan di sekolah.¹⁶⁵ Komite SMA Negeri 3 Ponorogo diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif terkait berbagai aspek mulai dari kebijakan dalam penyusunan RKAS hingga penggunaan

¹⁶³ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

¹⁶⁴ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

¹⁶⁵ Suhadi Winoto, *Komite Sekolah atau Madrasah dan Manajemen Mutu Pendidikan*, (Yogyakarta: CV Bildung Nusantara, 2021), 17.

alokasi dana. Namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi sebagai pemberi komite.

a. Kurangnya pemahaman anggota komite tentang tugas dan fungsi

Komite di SMA Negeri 3 Ponorogo belum sepenuhnya menyadari pentingnya kontribusi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan kurangnya maksimal masukan yang diberikan kepada pihak sekolah dalam hal kebijakan pendidikan yang seharusnya lebih berdampak pada perbaikan kualitas pendidikan.

b. Keterbatasan informasi yang diterima oleh komite

Komite SMA Negeri 3 Ponorogo membutuhkan akses terhadap informasi yang cukup terkait kondisi sekolah dan kebijakan yang sedang dijalankan. Di SMA Negeri 3 Ponorogo transparansi informasi merupakan salah satu tantangan. Contohnya terkait anggaran sekolah dan rencana pengembangan fasilitas pendidikan tidak selalu dibagikan secara detail kepada komite yang dapat menghambat kemampuan komite dalam memberikan pertimbangan yang efektif.

c. Keterbatasan waktu

Anggota komite SMA Negeri 3 Ponorogo sebagian besar memiliki kesibukan lain di luar tugas mereka sebagai anggota. Banyak dari anggota komite sekolah memiliki kegiatan lain sehingga sulit meluangkan waktu untuk ikut rapat atau berdiskusi tentang kebijakan sekolah.

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa komite SMA Negeri 3 Ponorogo memiliki peran penting sebagai pemberi pertimbangan dalam membantu pihak sekolah membuat keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan, termasuk dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran sekolah. Namun, di SMA Negeri 3 Ponorogo, peran ini belum berjalan secara optimal karena masih menghadapi beberapa tantangan. Pertama, banyak anggota komite yang belum memahami dengan baik tugas dan fungsi mereka, sehingga masukan yang diberikan kepada sekolah masih kurang maksimal. Kedua, keterbatasan informasi

dari pihak sekolah membuat komite kesulitan dalam memberikan pertimbangan yang tepat, terutama terkait anggaran dan rencana pengembangan sekolah. Ketiga, kesibukan para anggota komite di luar tugas sekolah juga membuat mereka sulit meluangkan waktu untuk aktif dalam rapat atau kegiatan sekolah lainnya. Oleh karena itu, perlu ada upaya bersama untuk meningkatkan pemahaman, transparansi, dan kerja sama agar peran komite sebagai pemberi pertimbangan bisa berjalan lebih efektif dan bermanfaat bagi kemajuan sekolah.

2. Tantangan Peran Komite sebagai Pendukung Finansial dan Non Finansial

Komite sekolah berperan penting sebagai pendukung serta penyelenggara pendidikan baik dalam bentuk dukungan finansial berupa pendanaan dan non finansial berupa tenaga dan pikiran.¹⁶⁶ Namun berdasarkan data dilapangan beberapa tantangan yang dihadapi dalam menjalankan peran komite di SMA Negeri 3 Ponorogo. Tantangan peran komite sebagai pendukung finansial di SMA Negeri 3 Ponorogo yaitu keberagaman kondisi ekonomi orang tua. Sedangkan tantangan peran komite sebagai pendukung non finansial di SMA Negeri 3 Ponorogo yaitu keterbatasan sumber dana, non finansial yaitu keterbatasan jaringan atau relasi, minimnya kapasitas dan wawasan pendidikan

3. Tantangan Peran Komite sebagai Pengontrol Tranparansi dan Akuntabilitas

a. Kurangnya Komunikasi Dua Arah yang Efektif

Salah satu tantangan yang dihadapi komite SMA Negeri 3 Ponorogo adalah komunikasi yang belum berjalan dua arah dengan baik. Dalam beberapa kegiatan seperti rapat RKAS atau laporan keuangan, informasi lebih banyak disampaikan oleh pihak sekolah, sedangkan kesempatan bagi komite untuk memberikan masukan atau bertanya masih terbatas. Hal ini menyebabkan komite kurang bisa

¹⁶⁶ Hasmiana Hasan, "Fungsi Komite Sekolah Dalam Perkembangan dan Implementasi Program Sekolah Di SD Negeri 19 Kota Banda Aceh", Jurnal Pesona Dasar, Vol. 2 No. 3 (2014), 3-4.

menyampaikan pendapat atau aspirasi secara maksimal, sehingga fungsinya sebagai pengawas belum berjalan optimal.

b. Kurangnya Pemahaman tentang Laporan Keuangan

Sebagian anggota komite tidak memiliki latar belakang di bidang keuangan atau administrasi sekolah. Akibatnya, mereka kesulitan memahami isi laporan keuangan sekolah, seperti rincian dana BOS atau realisasi anggaran. Hal ini membuat komite sulit menilai apakah penggunaan dana sudah sesuai atau belum, dan menyulitkan mereka dalam memberikan saran atau pengawasan secara tepat.

c. Akses Informasi yang Terbatas

Informasi tentang keuangan sekolah umumnya hanya disampaikan saat rapat atau dalam momen tertentu. Komite tidak memiliki akses rutin atau sistem informasi terbuka yang bisa diakses kapan saja. Kondisi ini menyulitkan komite dalam memantau penggunaan dana secara terus-menerus dan membuat pengawasan hanya dilakukan secara formal, bukan menyeluruh.

Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa peran komite sekolah sebagai pengawas di SMA Negeri 3 Ponorogo belum berjalan optimal karena beberapa kendala utama. Komunikasi dua arah antara sekolah dan komite masih kurang, sehingga masukan dari komite tidak tersampaikan dengan baik. Selain itu, kurangnya pemahaman anggota komite terhadap laporan keuangan serta terbatasnya akses informasi membuat fungsi pengawasan sulit dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

4. Tantangan Peran Komite sebagai *Mediator Agency*

Salah satu tantangan utama yang dihadapi komite SMA Negeri 3 Ponorogo yaitu sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat. Dalam hal ini kurangnya komunikasi yang terstruktur menjadi salah satu tantangan.¹⁶⁷ Selama ini, komunikasi antara komite, orang tua, dan pihak sekolah belum berlangsung secara rutin dan sistematis. Aspirasi dari orang

¹⁶⁷ Syaiful Sagala, Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, (Bandung: Cv: Pustaka Setia), 251.

tua atau masyarakat sekitar sekolah sering kali disampaikan secara informal, sehingga tidak terdokumentasi dengan baik dan berisiko tidak ditindaklanjuti. Selain itu, tidak adanya forum komunikasi tetap seperti pertemuan berkala antara komite dengan perwakilan wali murid dan sekolah membuat informasi penting sering terlambat sampai atau bahkan terlewat. Akibatnya peran komite sebagai penyambung suara masyarakat menjadi kurang maksimal dan beberapa usulan atau kebutuhan pendidikan tidak terakomodasi dengan baik.

Dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul selama pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan, komite sekolah SMA Negeri 3 Ponorogo terus melakukan berbagai upaya agar tetap dapat menjalankan perannya dengan baik. Tantangan-tantangan tersebut tidak serta merta menjadi penghambat, melainkan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sinergi antara sekolah dan komite.

a. Upaya Mengatasi Tantangan Komite sebagai Pemberi Pertimbangan.

Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan seringkali dihadapkan pada tantangan berupa kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi komite, keterbatasan informasi terkait kebijakan sekolah, serta terbatasnya waktu yang dimiliki anggota komite untuk terlibat aktif. Untuk mengatasi hal ini, SMA Negeri 3 Ponorogo bersama komite melakukan sosialisasi rutin mengenai peran dan tanggung jawab komite, menyediakan akses informasi yang lebih terbuka dan transparan, serta menjadwalkan pertemuan secara fleksibel agar anggota komite tetap dapat berkontribusi meskipun memiliki keterbatasan waktu. Dengan beberapa tersebut, diharapkan peran komite SMA Negeri 3 Ponorogo sebagai pemberi pertimbangan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak positif bagi pengambilan kebijakan sekolah. Berikut beberapa upaya yang dilakukan komite SMA Negeri 3 Ponorogo:

- 1) Akses Informasi yang Lebih Terbuka. SMA Negeri 3 Ponorogo menyediakan sistem informasi berbasis digital program sekolah.

2) Penjadwalan Rapat yang Fleksibel. Dalam hal ini SMA Negeri 3 Ponorogo membuat jadwal rapat dengan ketersediaan waktu mayoritas anggota komite.

b. Upaya Mengatasi Tantangan Komite sebagai Pendukung Finansial dan Non-Finansial

Dalam menjalankan peran sebagai pendukung finansial dan non-finansial, komite SMA Negeri 3 Ponorogo dihadapkan pada tantangan seperti keberagaman kondisi ekonomi wali murid, keterbatasan jaringan kemitraan, serta kapasitas sumber daya yang belum merata. Untuk mengatasi hal ini, komite bersama pihak sekolah melakukan pendekatan yang lebih inklusif dan proporsional dalam penggalangan dukungan, dengan mempertimbangkan kemampuan masing-masing pihak. Selain itu, komite juga berupaya membangun kemitraan strategis dengan pihak luar, seperti dunia usaha, alumni, dan instansi pemerintah, guna memperluas jaringan dukungan. Upaya peningkatan kapasitas anggota komite juga dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan, agar mereka lebih siap berperan aktif dalam mendukung kebutuhan sekolah, baik secara materiil maupun non-materiil. Berikut upaya yang dilakukan SMA Negeri 3 Ponorogo dalam menghadapi tantangan diatas:

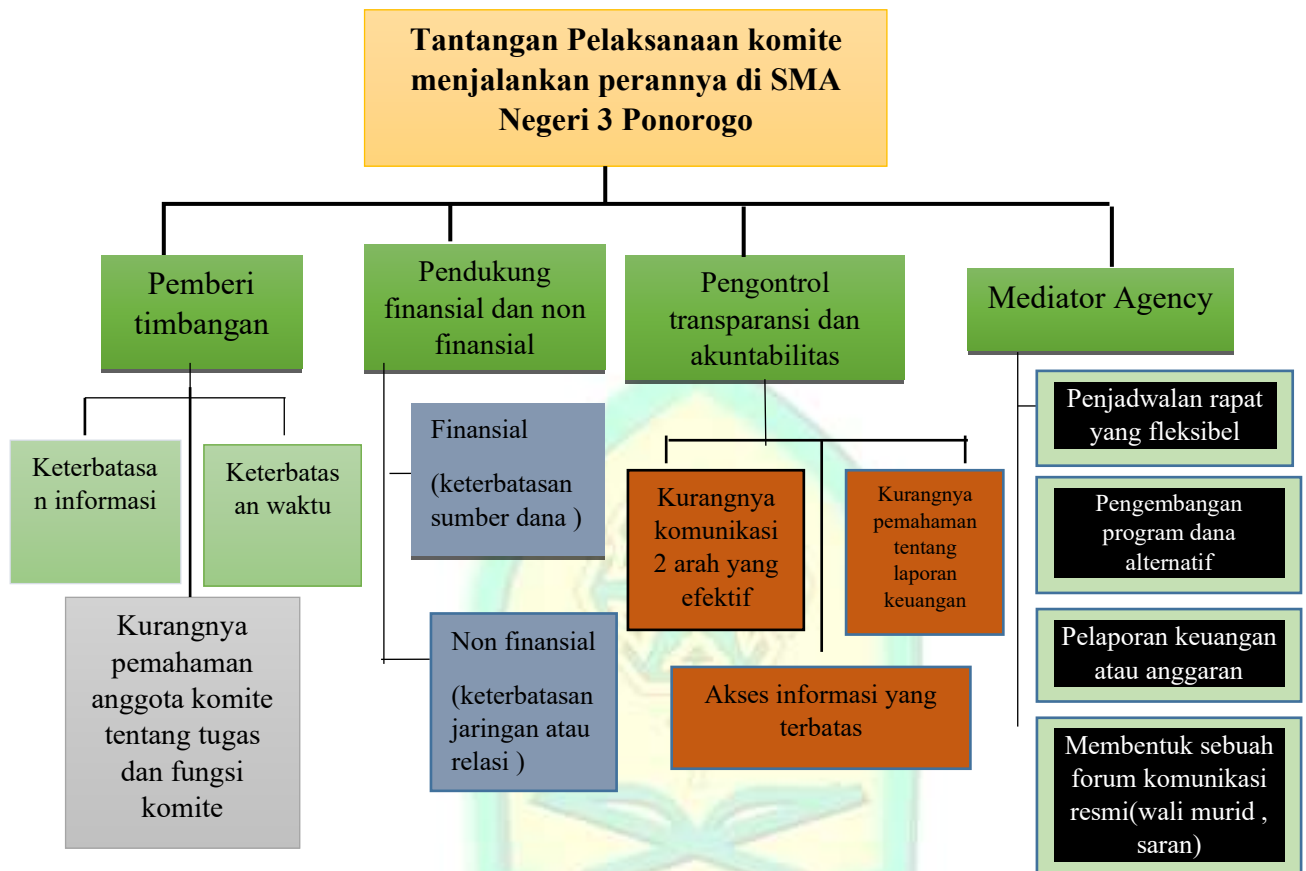
- 1) Pengembangan Program Dana Alternatif. Komite dan SMA Negeri 3 Ponorogo mengajukan proposal ke pada dinas pendidikan dalam pembangunan gedung kelas SICP.
- 2) Kemitraan dengan Pihak Eksternal. Komite SMA Negeri 3 Ponorogo membangun kerja sama dengan instansi luar yaitu Cambridge University untuk mendukung program non-finansial sekolah yaitu peningkatan mutu pendidikan dan menjalin kerja sama dengan polri melalui kegiatan diklatsar untuk meningkatkan kedisiplinan siswa.

c. Upaya Mengatasi Tantangan Komite sebagai Pengontrol Transparansi dan Akuntabilitas.

Peran komite sebagai pengontrol transparansi dan akuntabilitas di sekolah sering kali menghadapi kendala berupa komunikasi yang masih bersifat satu arah, keterbatasan pemahaman terhadap laporan keuangan, serta akses informasi yang belum merata. Untuk mengatasi tantangan tersebut, SMA Negeri 3 Ponorogo bersama komite sekolah menerapkan mekanisme evaluasi bersama secara berkala, yang dilaksanakan setiap akhir semester atau akhir tahun ajaran. Melalui forum ini, komite dan pihak sekolah duduk bersama untuk membahas secara terbuka penggunaan anggaran, pelaksanaan program, serta kebijakan yang telah dijalankan. Evaluasi ini tidak hanya menjadi sarana untuk memperkuat transparansi, tetapi juga meningkatkan pemahaman anggota komite terhadap sistem pelaporan keuangan serta mendorong terwujudnya akuntabilitas yang lebih baik di lingkungan sekolah.

d. Upaya Mengatasi Tantangan Komite sebagai *Mediator Agency*

Dalam menjalankan fungsi sebagai mediator antara sekolah dan masyarakat, komite sekolah kerap menghadapi tantangan berupa kurangnya forum komunikasi yang efektif serta belum terstrukturinya mekanisme penyampaian aspirasi dari orang tua atau masyarakat sekitar. Untuk mengatasi hal tersebut, SMA Negeri 3 Ponorogo bersama komite sekolah membentuk sebuah forum komunikasi resmi, seperti Forum Wali Murid, yang menjadi wadah interaktif untuk menyampaikan masukan, saran, maupun keluhan secara terbuka. Pertemuan rutin dijadwalkan minimal enam bulan sekali, melibatkan komite, perwakilan orang tua siswa, dan pihak sekolah. Forum ini menjadi langkah strategis untuk mempererat hubungan antar stakeholder, meningkatkan keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan, serta memastikan aspirasi masyarakat dapat ditampung dan ditindaklanjuti dengan baik oleh pihak sekolah.



Gambar 5.1 Peta Konsep Tantangan Pelaksanaan komite menjalankan perannya di SMA Negeri 3 Ponorogo

C. Sinkronisasi dan Tranformasi

Dalam pelaksanaannya, komite sekolah memiliki peran penting sebagai mitra strategis dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan sekolah yang berkualitas. Namun, sebagaimana lembaga yang bersifat partisipatif, komite tidak terlepas dari berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas perannya. Berdasarkan temuan di lapangan, khususnya di SMA Negeri 3 Ponorogo, komite sekolah menghadapi sejumlah tantangan baik dalam aspek internal seperti keterbatasan pemahaman dan waktu, maupun aspek eksternal seperti akses informasi dan komunikasi dengan pihak sekolah.

Setiap peran yang melekat pada komite baik sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengawas, maupun penghubung memiliki tantangan yang khas. Untuk memahami dan mencari solusi atas berbagai kendala tersebut, diperlukan analisis yang tidak hanya menggambarkan kondisi saat ini (sinkronisasi) tetapi juga menggambarkan arah perbaikan dan penguatan fungsi ke depan (transformasi).

Pertama, Komite sekolah sebenarnya memiliki peran penting dalam memberi masukan untuk kebijakan pendidikan di sekolah. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada beberapa hambatan. Salah satunya adalah masih banyak anggota komite yang belum benar-benar memahami tugas dan fungsinya. Akibatnya, keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan di sekolah belum maksimal. Hal ini membuat para anggota komite kesulitan memberikan saran atau pertimbangan yang tepat. Di sisi lain, sebagian besar anggota komite juga memiliki kesibukan lain di luar, sehingga sulit meluangkan waktu untuk aktif terlibat dalam kegiatan sekolah. Untuk mengatasi hal tersebut, komite perlu mendapatkan pelatihan atau pembekalan agar lebih paham tentang tugasnya. Sekolah juga perlu memberikan informasi secara terbuka dan jelas agar komite bisa ikut berpikir dan memberi saran. Selain itu, jadwal pertemuan bisa dibuat lebih fleksibel agar anggota komite yang sibuk tetap bisa berpartisipasi. Dengan begitu, komite bisa lebih aktif

dan berperan strategis dalam membantu sekolah membuat kebijakan yang tepat.

Kedua, Komite sekolah memiliki peran penting dalam membantu penyelenggaraan pendidikan, baik melalui dukungan dana maupun bantuan tenaga dan pikiran. Namun di SMA Negeri 3 Ponorogo, masih ada beberapa kendala yang dihadapi. Salah satunya adalah kondisi ekonomi orang tua atau wali murid, sehingga hal ini berdampak pada terbatasnya kontribusi finansial yang dapat dihimpun oleh komite sekolah, terutama saat melakukan penggalangan dana pendidikan. Akibatnya, beberapa program atau kebutuhan sekolah yang seharusnya bisa segera direalisasikan harus ditunda atau disesuaikan kembali dengan kemampuan yang ada. Selain itu, situasi ini juga menuntut pihak sekolah dan komite untuk lebih hati-hati dan bijak dalam merancang kegiatan agar tetap inklusif dan tidak membebani wali murid. Selain itu, dari sisi non-finansial, tantangan yang muncul adalah minimnya relasi kerjasama dengan pihak luar seperti instansi pemerintah atau dunia usaha, serta kurangnya wawasan tentang pendidikan dari sebagian anggota komite. Hal ini membuat dukungan yang diberikan belum sepenuhnya maksimal.

Agar peran komite sebagai pendukung bisa lebih kuat, perlu dibangun kerjasama yang lebih luas dengan berbagai pihak seperti dinas pendidikan, dunia usaha, atau organisasi masyarakat. Komite juga perlu diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan, seminar, atau diskusi agar lebih paham tentang dunia pendidikan. Dengan begitu, komite tidak hanya bisa membantu dari sisi pendanaan, tetapi juga bisa memberikan ide dan solusi yang bermanfaat bagi kemajuan sekolah.

Ketiga, Komite sekolah bertugas mengawasi agar pendidikan berjalan transparan dan akuntabel. Namun, di SMA Negeri 3 Ponorogo, fungsi ini belum berjalan optimal karena komunikasi masih satu arah dan komite belum diberi ruang cukup untuk memberi masukan. Banyak anggota juga belum memahami laporan keuangan sekolah, sehingga kesulitan menilai penggunaan dana. Informasi pun hanya disampaikan saat rapat, tidak tersedia

secara berkala. Agar pengawasan lebih efektif, dibutuhkan komunikasi dua arah yang terbuka, akses informasi yang rutin dan mudah dijangkau, serta pelatihan bagi anggota komite untuk memahami laporan keuangan.

Keempat, Komite sekolah seharusnya menjadi jembatan antara sekolah dan masyarakat. Namun, di SMA Negeri 3 Ponorogo, komunikasi belum berjalan dengan baik. Masukan dari orang tua sering disampaikan secara lisan dan tidak tercatat, sehingga mudah terlupakan. Agar peran komite sebagai penghubung lebih maksimal, perlu dibuat sistem komunikasi yang teratur seperti pertemuan berkala, kotak saran, atau grup online. Setiap masukan perlu dicatat agar bisa ditindaklanjuti. Dengan komunikasi yang jelas dan terbuka, komite bisa lebih efektif menyampaikan aspirasi masyarakat ke pihak sekolah.



BAB VI

EFEKTIVITAS PROGRAM KOMITE DALAM MENDUKUNG KEGIATAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

A. Paparan Data

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, peran komite sekolah di SMA Negeri 3 Ponorogo dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan dinilai telah berjalan cukup efektif. Komite tidak hanya berperan sebagai pendamping, tetapi juga aktif dalam memberikan masukan, dukungan moral, serta terlibat langsung dalam berbagai kegiatan strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Ponorogo, Bapak Sasmito Pribadi, M.Pd. Menyampaikan bahwa: “Komite berperan cukup efektif dalam mendukung peningkatan mutu di sekolah, contohnya aktif memberi masukan, dukungan moral, dan juga ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan sekolah.”¹⁶⁸

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ketua Komite SMA Negeri 3 Ponorogo:

Peran komite SMA Negeri 3 Ponorogo menurut saya berjalan cukup optimal, selama ini selalu berusaha untuk terlibat aktif dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo. Tanggung jawab dalam dunia pendidikan bukan hanya ada di tangan sekolah saja, tapi juga menjadi bagian dari tugas komite sebagai perwakilan orang tua dan masyarakat. Jadi, dari komite sendiri berusaha ikut berkontribusi, mulai dari memberi masukan ketika sekolah menyusun program, ikut diskusi dalam rapat-rapat, sampai ikut mendampingi jalannya kegiatan. Kami juga sering memberikan dukungan moral, misalnya dengan hadir di kegiatan siswa atau acara sekolah.¹⁶⁹

Selaras dengan penjelasan diatas, Bapak Muhammad Iskak selaku anggota komite sekolah menambahkan bahwa:

¹⁶⁸ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

¹⁶⁹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

Tugas komite disini cukup berjalan, Menurut saya, keberhasilan komite dalam mendukung program sekolah cukup baik, walaupun tidak semua program bisa kami handle, namun tidak dapat dipungkiri bahwa komite juga memiliki keterbatasan waktu, wawasan dan juga wewenang. Karena begini mbak, tidak semua anggota komite berasal dari dunia pendidikan dan mayoritas dari kami juga memiliki profesi lain diluar tugas kami sebagai komite. Namun komite selalu berusaha untuk terlibat dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan.¹⁷⁰

Untuk mengetahui sejauh mana kontribusi komite sekolah dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan, penting untuk melihat peran komite dalam proses pengambilan keputusan di sekolah. Salah satu indikatornya adalah seberapa efektif komite sekolah dalam memberikan masukan atau pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan yang disusun oleh pihak sekolah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Dalam proses pemberian pertimbangan dalam penentuan kebijakan, komite SMA Negeri 3 Ponorogo cukup efektif dalam memberikan pertimbangan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Ponorogo, beliau menyampaikan bahwa: “dalam perannya sebagai pemberi pertimbangan, sekolah selalu membuka ruang untuk komite dalam setiap rapat-rapat penting seperti penyusunan RKAS, program penguatan karakter siswa, hingga kebijakan peningkatan sarana prasarana. Sehingga komite dapat menjalankan perannya dengan efektif.”¹⁷¹

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Ketua Komite SMA Negeri 3 Ponorogo, beliau menyampaikan:

Sebagai pihak yang ikut memberi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di sekolah, komite SMAN 3 Ponorogo berperan memberi masukan dan pertimbangan. Komite terlibat terutama pada waktu sekolah menyusun RKAS diawal semester. Biasanya kami komite memberi masukan berupa masukan soal prioritas program, kadang juga tentang anggaran yang perlu disesuaikan dengan kondisi di lapangan.¹⁷²

¹⁷⁰ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 03/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

¹⁷¹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

¹⁷² Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

Sesuai dengan pernyataan diatas, adapun hasil dokumentasi mengenai pelaksanaan rapat yang dihadiri oleh komite sekolah. Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk keikutsertaan komite dalam mendukung program atau kegiatan dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah.¹⁷³

Kemudian dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, ketersediaan dana yang cukup menjadi salah satu faktor penting. Meskipun sekolah menerima Dana BOS dari pemerintah, kebutuhan di lapangan seringkali melebihi anggaran yang tersedia. Keterlibatan sekolah dalam membantu sekolah mencari atau memobilisasi sumber daya finansial tambahan menjadi aspek yang penting untuk ditelusuri. Untuk itu efektivitas komite SMA Negeri 3 Ponorogo dalam melaksanakan perannya berjalan dengan baik dan sangat efektif. Sesuai dengan hasil wawancara bersama Kepala Sekolah, beliau menyampaikan bahwa: “Keterlibatan komite dalam peningkatan mutu pendidikan sebagai pendukung finansial dan non finansial yaitu membantu sekolah menjembatani kerjasama dengan instansi pemerintah, terutama dalam kegiatan atau program pendidikan yang anggarannya belum tercover dana BOS. Seperti contoh dalam program pengadaan sarana prasarana.”¹⁷⁴

Sejalan dengan penjelasan diatas, Ketua Komite Sekolah juga menyampaikan terkait dengan keterlibatan komite dalam menyumbangkan aspirasi mengenai program sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan. Ketua Komite menyampaikan:

Menurut saya, keberhasilan komite dalam mendukung program sekolah cukup baik, walaupun tidak semua program bisa kami handle, karena keterbatasan waktu, wawasan dan juga wewenang yang dimiliki komite. Jadi begini mbak, tidak semua anggota komite berasal dari dunia pendidikan dan mayoritas dari kami juga memiliki profesi lain diluar tugas kami sebagai komite. Kapasitas komite SMA Negeri 3 Ponorogo masih jauh dari kata sempurna, namun komite selalu berusaha untuk berkontribusi membantu sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan.¹⁷⁵

¹⁷³ Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 04/D/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

¹⁷⁴ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

¹⁷⁵ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, sejalan dengan pemaparan data diatas bahwasanya anggota komite SMA Negeri 3 Ponorogo merupakan tokoh masyarakat yang diambil dari perwakilan masyarakat dan wali murid, beberapa anggotanya merupakan bagian instansi pemerintah maupun instansi pendidikan.¹⁷⁶

Kemudian keberhasilan komite SMA Negeri 3 Ponorogo dalam memberikan dukungan moral dan motivasi baik kepada siswa maupun guru juga sangat efektif. Pasalnya komite turut hadir dalam beberapa kegiatan sekolah seperti perpisahan sekolah, peresmian gedung sekolah, dies natalis sekolah, dan kegiatan penting sekolah lainnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Ponorogo, bahwasanya: “sekolah menghadirkan komite sebagai perwakilan dari masyarakat dan merupakan badan internal sekolah yang berkontribusi membantu sekolah dalam menjalankan perannya sebagai mitra sekolah. Kehadiran komite sangat kami harapkan karena disetiap *event* sekolah. Keberhasilan perannya sangat dirasakan tentu oleh saya sebagai kepala SMA Negeri 3 Ponorogo dan juga rekan-rekan guru sekalian.”¹⁷⁷

Hal ini sesuai dengan penjelasan Ketua Komite SMA Negeri 3 Ponorogo:

Jika dikatakan efektif menurut saya dukungan moral yang diberikan sangat efektif. Komite itu bagian internal sekolah yang anggotanya berasal dari luar sekolah, tapi perannya terlihat aktif dalam beberapa program sekolah. Komite SMA Negeri 3 Ponorogo menjalankan peran sesuai dengan keempat peran komite yang salah satunya adalah ikut serta menghadiri kegiatan di sekolah. Dalam kegiatan peresmian gedung, dies natalis, perpisahan kelas akhir, dan kegiatan lainnya.¹⁷⁸

Selaras dengan hal tersebut, Bapak Muhammad Iskak juga menyampaikan terkait dukungan moral komite dalam peningkatan mutu pendidikan dengan peresmian gedung 3 ruang untuk program *SICP* (*Smaga*

¹⁷⁶ Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 01/D/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

¹⁷⁷ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

¹⁷⁸ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

International Class Program) yang dilaksanakan oleh komite sekolah bersama dengan jajaran pimpinan sekolah yang dihadiri oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Hal ini didukung dengan dokumentasi mengenai kegiatan pelaksanaan peresmian gedung yang dilaksanakan oleh komite sekolah pada Desember 2023.¹⁷⁹

Kemudian sebagai mediator agency, peran komite tentu sangat berpengaruh pada peningkatan mutu pendidikan. Efektivitas komite SMA Negeri 3 Ponorogo sangat membantu membangun iklim positif di sekolah. Sebagaimana penjelasan Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Ponorogo, beliau menyampaikan:

Saya menilai komite mampu membantu membangun iklim positif di sekolah. Dengan keterlibatan komite dalam berbagai kegiatan dan keputusan penting, tercipta suasana saling percaya antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Ini tentu saja menjadi pondasi yang kuat untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung peningkatan mutu pendidikan.¹⁸⁰

Hal serupa sesuai dengan penjelasan Ketua Komite Sekolah, yang berpendapat bahwa: “dengan keterlibatan aktif kami selaku komite dalam berbagai program, suasana di sekolah terasa semakin terbuka dan komunikatif. Kami percaya bahwa kehadiran komite yang aktif dan peduli bisa membantu membangun hubungan yang harmonis antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Lingkungan yang positif ini tentu jadi modal penting untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo.”¹⁸¹

B. Analisis Data

Komite sekolah memiliki peran sebagai mitra strategis kepala sekolah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas. Berdasarkan

¹⁷⁹ Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 09/D/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

¹⁸⁰ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

¹⁸¹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/W/19-02/2025 Dalam Lampiran Hasil Penelitian

data yang dilakukan peneliti memperoleh gambaran yang cukup komprehensif mengenai keterlibatan komite dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo.

David J. Lawless dalam Gibson, Invancevich dan Donnelly mengatakan bahwa efektifitas memiliki tiga tingkatan yaitu:¹⁸²

1. Efektivitas Individu

Efektivitas individu adalah kemampuan individu dalam memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan bersama, yaitu peningkatan mutu pendidikan. Efektivitas individu merujuk pada kontribusi anggota komite secara personal terhadap pencapaian mutu pendidikan. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan menunjukkan bahwa anggota komite SMA Negeri 3 Ponorogo terbukti memiliki inisiatif yang tinggi. Komite terlibat langsung dalam penyusunan program sekolah seperti RKAS, serta mendampingi kegiatan sekolah seperti hadir dalam perpisahan siswa kelas akhir, dies natalis, dan peresmian ruang kelas program *SICP*. Kontribusi ini menunjukkan bahwa secara individu anggota komite SMA Negeri 3 Ponorogo mampu menjalankan tugas dengan baik meskipun memiliki keterbatasan waktu. Selain itu, komite SMA Negeri 3 Ponorogo juga berperan dalam memberikan motivasi kepada siswa dan guru terlihat pada saat memberikan sambutan dalam event sekolah. Dari penjelasan tersebut memperkuat bukti bahwa efektivitas peran individu komite cukup baik dan berdampak dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan.

2. Efektivitas Kelompok

Berdasarkan data efektivitas kelompok komite sekolah di SMA Negeri 3 Ponorogo tercermin dari kerjasama antar anggota komite dalam menjalankan fungsi bersama. Komite SMA Negeri 3 Ponorogo terlibat dalam pengambilan keputusan penting, dan bersama-sama mengupayakan solusi untuk kebutuhan sekolah. Salah satunya adalah kolaborasi dalam

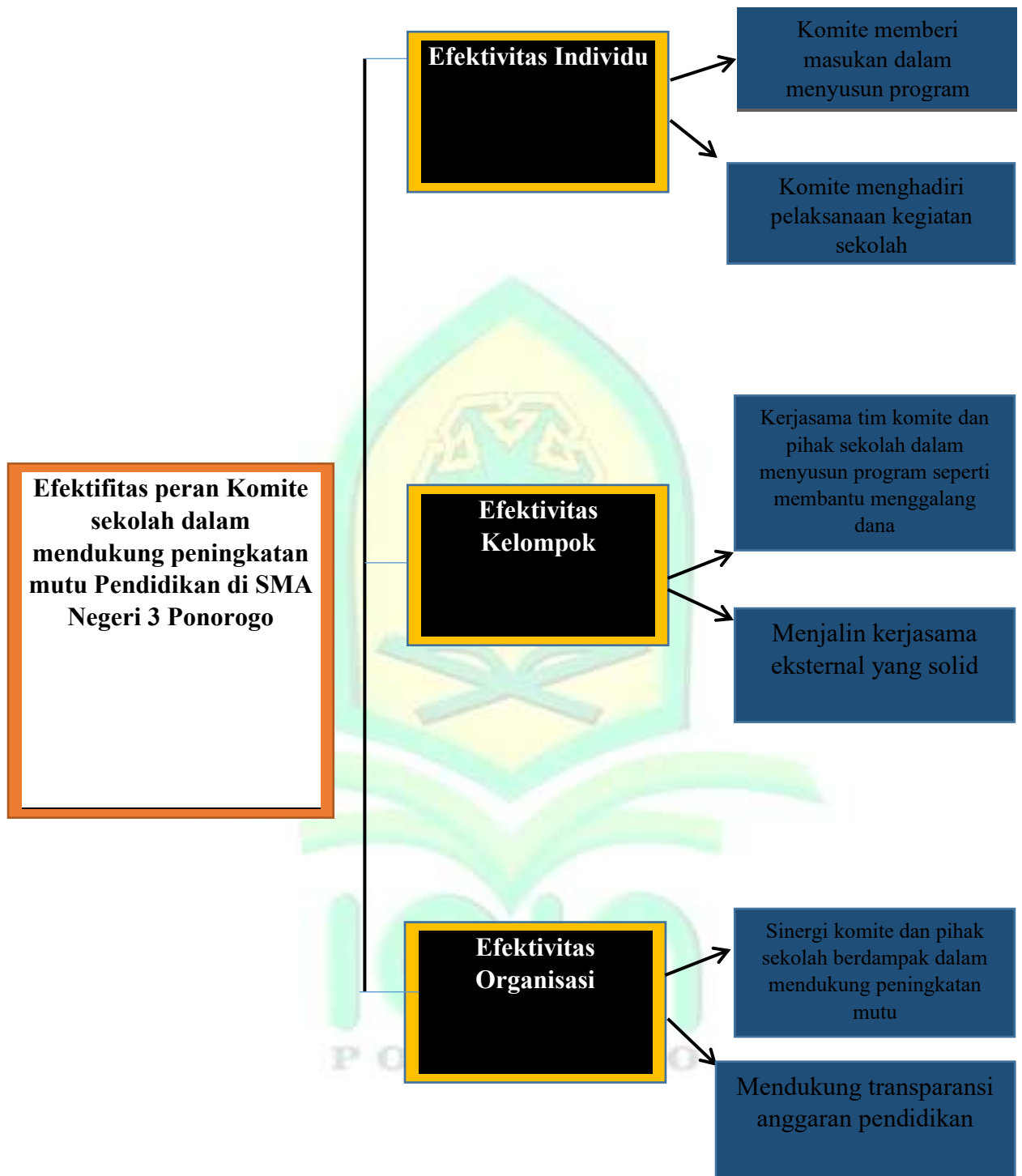
¹⁸² Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly, Organisasi, terjemahan Agus Dharma, (Jakarta: Erlangga, 2001), hal 120.

pengadaan tiga ruang kelas untuk program unggulan SICP, yang merupakan bentuk kerjasama tim yang solid antara komite dan pihak sekolah. Kemudian kegiatan penggalangan dana, keterlibatan komite dalam musyawarah bersama wali murid serta menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah mencerminkan komite sebagai satu kesatuan yang mampu menjalankan perannya secara efektif.

3. Efektivitas Organisasi

Berdasarkan data komite sekolah SMA Negeri 3 Ponorogo menunjukkan efektivitas organisasi yang baik melalui sinergi antara efektivitas individu dan kelompok. Efektivitas organisasi komite sekolah SMA Negeri 3 Ponorogo terlihat dari keberhasilan pihak sekolah dan juga komite dalam membangun lingkungan sekolah yang positif, mendukung program unggulan seperti *SICP*, menjembatani kerjasama dengan pihak luar, dan berperan sebagai pengontrol transparansi dana sekolah. Sinergi antara sekolah dan komite ditunjukkan dalam berbagai kegiatan baik formal seperti rapat penyusunan RKAS, maupun non formal seperti kehadiran komite dalam acara sekolah. Hal ini menunjukkan keberhasilan komite dalam membantu menciptakan kontribusi yang berdampak besar terhadap pencapaian tujuan sekolah, terutama dalam meningkatkan mutu pendidikan dan membangun lingkungan belajar yang kondusif.





Gambar 6.1 Peta Konsep Efektifitas peran Komite sekolah dalam mendukung peningkatan mutu Pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo

C. Sinkronisasi dan Transformasi

Efektivitas individu, kelompok, dan organisasi di komite SMA Negeri 3 Ponorogo berjalan dengan baik berkat kerjasama yang terorganisir. Setiap anggota komite memiliki peran penting dalam mencapai tujuan bersama yaitu meningkatkan mutu pendidikan. Secara individu, anggota komite aktif berkontribusi dalam kegiatan sekolah memberi masukan yang relevan serta memberikan dukungan moral yang membangun. Anggota komite SMA N 3 Ponorogo juga membantu penggalangan dana yang sangat penting untuk kelancaran kegiatan sekolah.

Sementara itu, efektivitas kelompok terlihat dari bagaimana anggota komite saling melengkapi dan bekerjasama dalam merencanakan dan menjalankan program. Kerjasama ini membuat setiap kegiatan berjalan lancar baik itu evaluasi program atau penggalangan dana. Semua anggota komite berperan dalam menjembatani komunikasi antara sekolah dan orang tua, serta memberikan masukan yang konstruktif. Secara keseluruhan sinergi antara efektivitas individu dan kelompok membentuk kekuatan organisasi yang lebih besar. Komite sekolah bekerja bersama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan mendukung perkembangan mutu pendidikan. Dengan kolaborasi yang erat komite SMA Negeri 3 Ponorogo berhasil memperkuat iklim belajar yang positif dan menyukseskan tujuan pendidikan sekolah.

Komite SMA Negeri 3 Ponorogo tidak hanya berperan dalam kegiatan sehari-hari tetapi juga mendorong perubahan yang signifikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Melalui kolaborasi yang terorganisir komite menjadi motor penggerak yang memperbaiki berbagai aspek di sekolah dari pembiayaan hingga dukungan moral. Inisiatif mereka dalam memberikan masukan kebijakan yang konstruktif dan penggalangan dana membantu mewujudkan program-program yang lebih efektif.

Dengan adanya peran aktif setiap individu dan kerjasama kelompok yang solid komite telah menciptakan suasana yang lebih baik di sekolah, mendorong keterlibatan orang tua, dan memotivasi siswa untuk berkembang

lebih baik. Transformasi ini membawa dampak positif yang tidak hanya terbatas pada peningkatan fasilitas atau kegiatan, tetapi juga terhadap kualitas pembelajaran yang lebih baik di sekolah.



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Peran Komite SMA Negeri 3 Ponorogo sangat penting dalam memberikan pertimbangan untuk kebijakan sekolah, mendukung pendanaan, serta mengawasi transparansi dan akuntabilitas. Komite aktif terlibat dalam penyusunan kebijakan serta memberi masukan berdasarkan kebutuhan orang tua dan masyarakat. Komite SMA N 3 Ponorogo juga memastikan pengelolaan dana dan pelaksanaan program sekolah berjalan transparan. Selain itu, komite berperan sebagai penghubung antara sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan mendukung mutu pendidikan.
2. Tantangan utama yang dihadapi komite SMA Negeri 3 Ponorogo dalam menjalankan fungsinya yang pertama yaitu sebagai pemberi pertimbangan, komite masih menghadapi hambatan antara lain minimnya pemahaman peran, keterbatasan informasi, dan waktu yang sempit. Kedua sebagai pendukung finansial dan non-finansial, tantangan muncul dari kondisi ekonomi wali murid yang beragam serta terbatasnya jaringan dan kapasitas anggota. Ketiga komite SMA N 3 Ponorogo dalam menjalankan fungsi pengawasan transparansi dan akuntabilitas, kendala utamanya adalah komunikasi satu arah, kurangnya pemahaman keuangan, dan terbatasnya akses informasi. Keempat komite berperan sebagai mediator agency. Dalam hal ini komite masih kesulitan karena belum adanya sistem komunikasi yang terstruktur dan berkelanjutan antara sekolah dan masyarakat. Semua tantangan ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas, sistem komunikasi, serta dukungan informasi agar peran komite dapat dijalankan secara optimal demi peningkatan mutu pendidikan.

3. Efektivitas peran komite sekolah di SMA Negeri 3 Ponorogo dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan terlihat dari kontribusinya dalam aspek kebijakan, finansial, dan dukungan moral. Komite aktif memberikan masukan yang relevan dalam penyusunan kebijakan sekolah dan memastikan transparansi pengelolaan keuangan. Selain itu, komite SMA N 3 Ponorogo juga memberikan dukungan moral yang positif kepada siswa dan guru serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses pembelajaran. Hal ini merupakan upaya komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian mengenai peran komite sekolah dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di SMAN 3 Ponorogo, maka diperlukan sejumlah saran yang bertujuan untuk memperkuat kontribusi komite baik dari aspek kebijakan, pendanaan, pengawasan, maupun sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat.

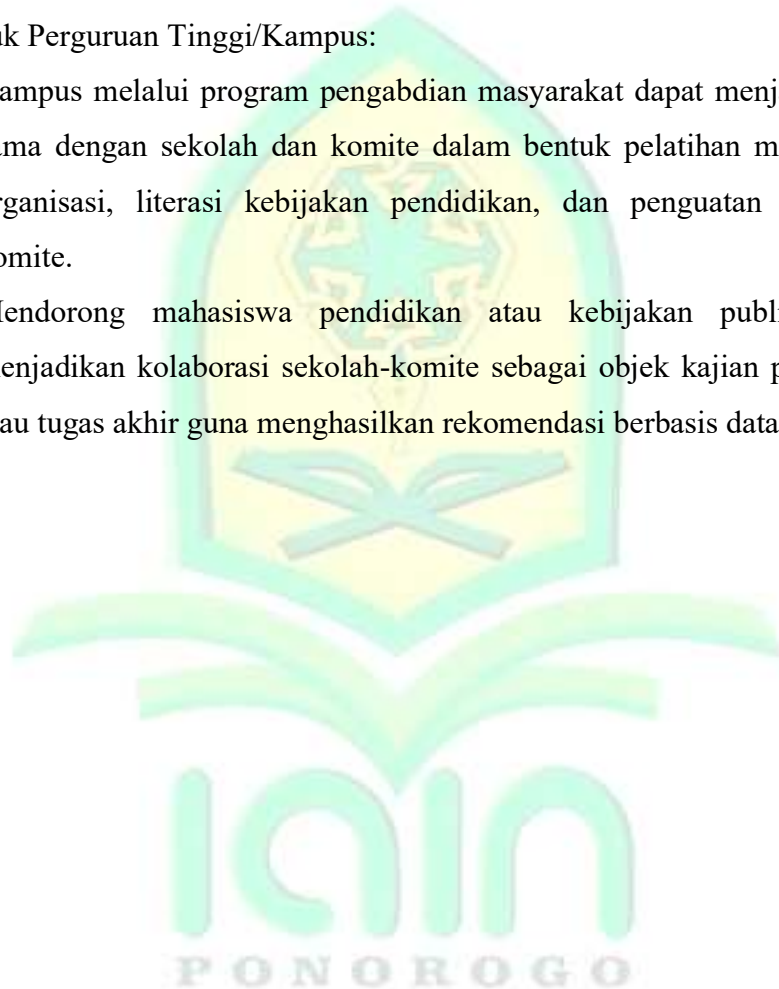
1. Untuk Lembaga SMA Negeri 3 Ponorogo
 - a. Diharapkan sekolah terus memperkuat kemitraan dengan komite sekolah dengan memberikan ruang partisipasi yang lebih luas dalam perumusan dan evaluasi kebijakan.
 - b. Disarankan sekolah menyusun program komunikasi rutin dan terbuka antara pihak sekolah, komite, orang tua, dan masyarakat untuk memperkuat koordinasi dan transparansi.
 - c. Mendukung pelatihan atau pembekalan bagi anggota komite agar semakin profesional dalam menjalankan fungsi-fungsinya.
2. Untuk Praktisi Pendidikan:
 - a. Perlu menjadikan model peran komite di SMA N 3 Ponorogo sebagai contoh kolaborasi yang baik antara sekolah dan masyarakat.
 - b. Mendorong partisipasi komite sekolah sebagai salah satu indikator dalam penilaian mutu pendidikan di sekolah-sekolah lainnya.

3. Untuk Peneliti:

- a. Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan terkait efektivitas peran komite sekolah di berbagai konteks dan jenjang pendidikan, guna memperkaya referensi dalam penguatan tata kelola sekolah berbasis partisipatif.
- b. Penelitian juga dapat difokuskan pada strategi meningkatkan komunikasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam pendidikan.

4. Untuk Perguruan Tinggi/Kampus:

- a. Kampus melalui program pengabdian masyarakat dapat menjalin kerja sama dengan sekolah dan komite dalam bentuk pelatihan manajemen organisasi, literasi kebijakan pendidikan, dan penguatan kapasitas komite.
- b. Mendorong mahasiswa pendidikan atau kebijakan publik untuk menjadikan kolaborasi sekolah-komite sebagai objek kajian praktikum atau tugas akhir guna menghasilkan rekomendasi berbasis data.



DAFTAR PUSTAKA

- Ambarita, Alben. *Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2015.
- Amerta, I Putu Eka. Sudjarwo. Alben Ambarita. "Peran Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan." *Jurnal Manajemen Mutu Pendidikan*. Vol 3. No 1. (2015). 2.
- Arbangi, Dakir, Umiarso, *Manajemen Mutu Pendidikan*. Depok: Prenadamedia Group. 2016.
- Arcaro, Jarome S. *Pendidikan Berbasis Mutu*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2014.
- Asy'ari, Hasyim. Zahruddin. Syifa Fauziah. "Implementasi Prinsip-Prinsip Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di SMK Ekonomika Depok Jawa Barat." *Jurnal Manageria* Vol. 2 Nomor. 2. (2017). 211.
- Denzin, Norman K. *Sociological Method*. New York: MC Grow Hill. 1978.
- Depdiknas 2004. *Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 2004.
- Depdiknas. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Buku I*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. 2002.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan* Jakarta: Departemen Agama RI. 2006.
- Engkoswara dan Aan Komariah. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: CV. Alfabeta. 2012.
- Fadhallah. *Wawancara*. Jakarta: UNJ Press. 2020.
- Fadhli, Muhammad Nurul. "Implementasi Manajemen Mutu Untuk Meningkatkan Kompetensi Guru di SDIT AL HIJRAH Laut Dendang." *Journal Educational Research and Sosial Studies*. Vol 2. No 2. (2021). 50.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2013.
- Hasan, Nur. *Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia, Kurikulum untuk Abad 21: Indikator Cara Pengukuran dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Mutu Pendidikan*. Jakarta: PT Sindo. 1994.

- Huberman, Miles Mathew B, A, Michael Huberman dan Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebooks Edition 3*. Sage Publications: Singapore. 2014.
- Huda, Miftahul. “*Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan Di Madrasah Aliyah Ma’arif NU Kencong Jember.*” Tesis. Jember: PascaSarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2021.
- Imron, Ali. *Manajemen Hubungan dan Partisipasi Masyarakat Sekolah*. Malang: Universitas Negeri Malang. 2017.
- Jeka, Firdaus. “*Peran Komite Madrasah dalam Meningkatkan Mutu pendidikan di MTS Swasta Se Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.* ” Tesis. Riau: PascaSarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2022.
- Karno, Edy. *Mutu Pendidikan dan Inovasi Pembelajaran*. Kendari: Uho EduPress. 2019.
- Kompri. *Manajemen Sekolah Teori dan Praktek*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Minarti, Sri. *Manajemen Sekolah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2011.
- Mulyasa. *Manajamen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2013.
- Mulyono. *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2014.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books. 2014.
- Pantjastuti, Sri Renani. *Komite Sekolah: Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*. Yogyakarta: Hikayat Publishing. 2008.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 75 Tahun 2016. 2016.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. 2016.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara. 2021.

- Riyanik, "Peran Komite Sekolah dalam Pembiayaan Pendidikan di SDIT Al-Manan Boyolali." Tesis. Semarang: Universitas PGRI Semarang. 2024.
- Rosnani, Leni. *Analisis Peran dan Keterlibatan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu pendidikan di SMA Taman Siswa PematangSiantar.* Tesis. Sumatera Utara: Universitas muhammadiyah Sumatera Utara. 2021.
- Sagala, Syaiful. *Manajemen Strategi dalam Peningkatan Mutu Pendidikan.* Bandung: Alfabeta. 2013.
- Sallis, Edward. *Total Quality Management.* Yogyakarta: IRCiSoD. 2019.
- Saputra, Dadang. *Peran Komite Dalam Manajemen Sarana dan Prasarana di Pesantren Tahfidz Qur'an Dewan Dakwah Lampung.* UIN Raden Intan Lampung. 2020.
- Saraswati, Niken Fathia. "Implementasi Metode Pembelajaran Small Grup Discussion Untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar Pada Kompetensi Dasar Jurnal Penyesuaian Siswa Kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah Kretek Tahun Ajaran 2017/2018." *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*: Vol XVI. No 2. (2018). 19.
- Sidiq, Umar dan Miftahul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan.* Ponorogo: Nata Karya. 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian.* Bandung: Alfabeta. 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D.* Bandung: alfabeta. 2016.
- Sujanto, Bedjo. *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah: Model Pengelolaan Sekolah di Era Otonomi Daerah.* Jakarta: CV. Sagung Seto. 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Memperkenalkan Sosiologi.* Jakarta: Rajawali. 1982.
- Tjiptono, Fandy. *Total Quality Manajemen.* Yogyakarta: Andi Offset. 2016.
- Tim Dosen Administrasi pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. *Universitas Pendidikan Indonesia.* 2020.
- Torang, Syamsir. *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi).* Bandung: Alfabeta. 2014.
- Winoto, Suhadi. *Komite Sekolah atau Madrasah dan Manajemen Mutu Pendidikan,* Yogyakarta: CV Bildung nusantara. 2021.
- Wiyanto, Joko. *Manajemen Komite Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan di Sekolah Dasar Muhammadiyah Palur, Kecamatan*

Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.” Tesis. Surakarta: UIN Raden Mas Said Surakarta. 2022.

Zahroh, Aminatul. *Total Quality Management*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2016.

